



PEMKAB  
MAJALENGKA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
**INSPEKTORAT**

Jalan K.H. Abdul Halim Nomor 520, Majalengka, Jawa Barat, 45413,  
Telepon (0233) 281157, Laman [inspektorat.majalengkakab.go.id](http://inspektorat.majalengkakab.go.id)  
Pos-el [inspektorat@majalengkakab.go.id](mailto:inspektorat@majalengkakab.go.id)

---

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, sebagian besar tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Majalengka, 19 Maret 2025

Inspektur Kabupaten Majalengka



HENDRA KRISNIAWAN, S.STP., M.Tr.IP., CGCAE  
NP. 19780226 199703 1 002



## KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada pemerintah daerah selama Tahun 2024 yang merupakan perjalanan tahun pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai upaya aktualisasi akuntabilitas kinerja dan publikasi informasi tentang realisasi anggaran serta capaian target indikator kinerja, maka pada akhir pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Tahun 2024 disusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Majalengka Tahun 2024. Penyusunan dokumen ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejumlah capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka yang ditargetkan telah berhasil dilaksanakan. Capaian kinerja ini telah dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui hambatan dan kelemahan yang terjadi, serta merencanakan strategi pemecahan masalah yang diperlukan sebagai umpan balik (*feedback*) untuk perencanaan yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini menjadi ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang dijalankan serta dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan dan mendorong peningkatan kinerja bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka.



Majalengka, 25 Maret 2025  
Bupati Majalengka,

H. Eman Suherman



### Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Pemerintah Kabupaten Majalengka memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 rata-rata sebesar 101,36%. Sebanyak 4 (empat) indikator mencapai kinerja 100%, yaitu:

1. Meningkatnya Kondusivitas Wilayah menggunakan Indeks Trantibum dengan capaian 109,29% dan efisiensi sebesar 7,5% atau Rp1.040.319.465,00.
2. Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian 136,73% dan efisiensi sebesar 13,93% atau Rp2.770.821.929,00.
3. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan Kemampuan Keuangan Daerah dengan capaian 100% dan efisiensi sebesar 3,56% atau Rp528.729.356,00.
4. Meningkatnya Produktivitas Daerah dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tercapai 110,72% dan efisiensi sebesar 0,73% atau Rp149.852.148,00.

Sebanyak 7 Indikator tidak mencapai 100%, yaitu:

1. Menurunnya Penduduk Miskin menggunakan indikator Persentase Penduduk Miskin dengan capaian 95,84%.
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan menggunakan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dengan capaian 98,95%.
3. Meningkatnya Derajat Kesehatan menggunakan 2 indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dengan capaian 99,94% dan Prevalensi Stunting 72,03%.
4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan menggunakan indikator Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah dengan capaian 95,41%.
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian 96,21%.
6. Meningkatnya Produktivitas Daerah dengan indikator Nilai PDRB (ADHK) tercapai 99,45%.

Rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 yaitu sebesar 101,36% dengan efisiensi dari keseluruhan program adalah 3,97% atau Rp131.611.808.942,00.





# IV

# DAFTAR ISI

**Pernyataan Telah di Reviu** I

**Kata Pengantar** II

**Ringkasan Eksekutif** III

**Daftar Isi** IV

**Daftar Tabel** V

**Daftar Gambar** VI

**BAB I PENDAHULUAN** 1

Gambaran Umum PEMDA  
Data Kepegawaian  
Isu Strategis

**BAB II PERENCANAAN KINERJA** 10

Data Kepegawaian  
Perjanjian Kinerja 2024  
Rencana Anggaran 2024

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** 14

Pengukuran Kinerja 2024  
Analisis Capaian Kinerja  
Akuntabilitas Keuangan

**BAB IV PENUTUP** 215

**LAMPIRAN** 218



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	11
Tabel 2.2 Rencana Anggaran Tahun 2024 .....	12
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024 .....	15
Tabel 3.2 Program yang Mendukung IKU 1 .....	38
Tabel 3.3 Program yang Mendukung IKU 2 .....	45
Tabel 3.4 Program yang Mendukung IKU 3 .....	55
Tabel 3.5 Program yang Mendukung IKU 4 .....	71
Tabel 3.6 Program yang Mendukung IKU 5 .....	88
Tabel 3.7 TPS3R di Kabupaten Majalengka .....	96
Tabel 3.8 Program yang Mendukung IKU 6 .....	102
Tabel 3.9 Rekap Operasi Pasar Tahun 2024 .....	111
Tabel 3.10 Program yang Mendukung IKU 7 .....	127
Tabel 3.11 Program yang Mendukung IKU 8 .....	142
Tabel 3.12 Program yang Mendukung IKU 9 .....	163
Tabel 3.13 Rincian Nilai SAKIP .....	169
Tabel 3.14 Interval Pemberian TPP Komponen Capaian Kinerja .....	172
Tabel 3.15 Transaksi pada Aplikasi Srikandi V.3 .....	178
Tabel 3.16 Komponen Sistem Merit .....	184
Tabel 3.17 Hasil PEKPPP .....	191
Tabel 3.18 Program yang Mendukung IKU 10 .....	198
Tabel 3.19 Realisasi PAD Tahun 2024 .....	204
Tabel 3.20 Program yang Mendukung IKU 11 .....	212
Tabel 3.21 Akuntabilitas Keuangan .....	213





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Infografik ASN Majalengka .....	3
<b>IKU 1</b>	
Gambar 3.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Majalengka 2015-2024 .....	18
Gambar 3.2 Komposisi Persentase Penduduk Miskin Tahun 2024 .....	19
Gambar 3.3 Penghargaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem .....	19
Gambar 3.4 Penduduk Miskin Ciayumajakuning Tahun 2024 .....	20
Gambar 3.5 Aplikasi BANGKIT .....	21
Gambar 3.6 Pelayanan Kartu Indonesia Pintar .....	22
Gambar. 3.7 Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial .....	23
Gambar. 3.8 Pemberian Perlengkapan Siswa SD dan SMP .....	24
Gambar. 3.9 Puskesmas Nganjang Ka Imah .....	25
Gambar. 3.10 Akreditasi RSUD Talaga .....	26
Gambar 3.11 Garis Kemiskinan Tahun 2024 .....	26
Gambar 3.12 Inflasi Tahun 2024 .....	27
Gambar 3.13 Pemantauan Stabilitas Harga .....	27
Gambar 3.14 Inflasi Tahun 2024 .....	28
Gambar 3.15 Operasi Pasar Murah .....	28
Gambar 3.16 Panen Raya .....	29
Gambar 3.17 Penghargaan Ketahanan Pangan .....	29
Gambar 3.18 Rumah Tangga Layak Huni .....	30
Gambar 3.19 Pembangunan Jalan Lingkungan .....	31
Gambar 3.20 Pemeliharaan Berkala Jalan .....	31
Gambar 3.21 URC tambal Jalan .....	32
Gambar 3.22 Tingkat Pengangguran Terbuka .....	33
Gambar 3.23 Balai Latihan Kerja Cakraningrat .....	34
Gambar 3.24 Bantuan Modal Usaha .....	35
Gambar 3.25 Nilai Tukar Petani .....	35
Gambar 3.26 Desil 1 Kabupaten Majalengka .....	36
Gambar 3.27 Monitoring Irigasi .....	37
<b>IKU 2</b>	
Gambar 3.1 Penyerahan Perlengkapan Peserta Didik .....	41
Gambar 3.2 Sosialisasi Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini .....	43





Gambar 3.3 Rapat kerja PT. Astra dengan sekolah Binaan .....	44
Gambar 3.4 Rehabilitasi SD Sindanghaji 2 Kecamatan Palasah .....	44
<b>IKU 3</b>	
Gambar 3.1 Pelatihan SDM .....	48
Gambar 3.2 Penyerahan Puskesmas Keliling .....	49
Gambar 3.3 RSUD Talaga .....	50
Gambar 3.4 Sosialisasi Gaya Hidup Sehat Melalui Media Sosial .....	52
Gambar 3.5 Peresmian GOR GGM Talaga Manggung .....	52
Gambar 3.6 Senam Hari Jumat .....	53
Gambar 3.7 Kegiatan Pembinaan Kader STBM .....	54
<b>IKU 4</b>	
Gambar 3.1 Kegiatan Posbindu .....	60
Gambar 3.2 Kelas Ibu Hamil dan Balita .....	61
Gambar 3.3 Pemberian PMT .....	61
Gambar 3.4 Kegiatan Posyandu .....	62
Gambar 3.5 <i>Workshop</i> Penurunan Stunting .....	63
Gambar 3.6 SPAM Jaringan Perpipaan .....	64
Gambar 3.7 Tangki Septik Individu .....	65
Gambar 3.8 Verifikasi ODF .....	66
Gambar 3.9 Pemberian penghargaan ODF .....	67
Gambar 3.10 Kegiatan P2L oleh Kelompok Wanita Tani .....	68
Gambar 3.11 Pembangunan Posyandu Model .....	68
Gambar 3.12 Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial .....	69
<b>IKU 5</b>	
Gambar 3.1 Pengawasan Konrtaktual .....	76
Gambar 3.2 Rehabilitasi Jalan .....	77
Gambar 3.3 Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan .....	77
Gambar 3.4 Kejadian Bencana Periode November .....	79
Gambar 3.5 Pemeliharaan Jaringan Irigasi .....	79
Gambar 3.6 Penataan Sumber Mata Air .....	80
Gambar 3.7 Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Majalengka .....	81
Gambar 3.8 Pemetaan Tutupan Lahan .....	82
Gambar 3.9 Pemeriksaan Fisik di Lokasi Bangunan .....	83
Gambar 3.10 V/C <i>Ratio</i> Rata-rata 2024 .....	84
Gambar 3.11 Pemasangan PJU .....	85
Gambar 3.12 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni .....	86
Gambar 3.13 Pembangunan Jalan Lingkungan .....	88





## **IKU 6**

Gambar 3.1 Pengambilan Sampel Kualitas Air Sungai .....	93
Gambar 3.2 Pemeriksaan Ketaatan Izin Lingkungan .....	94
Gambar 3.3 Data Usaha/Kegiatan yang Tidak Taat .....	94
Gambar 3.4 Jumlah Sampah yang Ditangani .....	94
Gambar 3.5 Tim Sapu Bersih .....	95
Gambar 3.6 Bank Sampah Desa Gunungkuning dan Desa Palabuan .....	96
Gambar 3.7 Pengambilan Sampel Udara .....	98
Gambar 3.8 Penyuluhan Lingkungan Hidup .....	98
Gambar 3.9 Inovasi Terhadap Isu Lingkungan Prioritas .....	101

## **IKU 7**

Gambar 3.1 BUM Desa Aktif .....	106
Gambar 3.2 Program Padat Karya .....	106
Gambar 3.3 Penurunan Produktivitas Pertanian .....	107
Gambar 3.4 Jalan Usaha Tani .....	108
Gambar 3.5 Harga Bapokting .....	111
Gambar 3.6 Kegiatan Pembinaan Pengelola Pasar Rakyat .....	113
Gambar 3.7 Website imah.co.id .....	114
Gambar 3.8 Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor .....	115
Gambar 3.9 Obyek Wisata Situ Cipanten .....	117
Gambar 3.10 Promosi Wisata .....	118
Gambar 3.11 Promosi Batik Maja .....	121
Gambar 3.12 Inspeksi Lapangan ke PT. Harapan Global Apparel .....	123
Gambar 3.13 Festival Pelayanan Publik .....	124
Gambar 3.14 Peresmian Balai Latihan Kerja “Cakraningrat” .....	125

## **IKU 8**

Gambar 3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka .....	131
Gambar 3.2 TPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 .....	132
Gambar 3.3 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan .....	133
Gambar 3.4 Rencana Tenaga Kerja Makro .....	134
Gambar 3.5 Informasi Lowongan Pekerjaan melalui Instagram .....	134
Gambar 3.6 Job Fair 27 Februari 2024 .....	135
Gambar 3.7 Job Fair 28 Mei 2024 .....	135
Gambar 3.8 Job Fair 24 September 2024 .....	136
Gambar 3.9 Padat Karya Tunai di Kecamatan Leuwimunding .....	136
Gambar 3.10 Balai Latihan Kerja Cakraningrat .....	137





Gambar 3.11 Pelatihan Keterampilan Kejuruan Sigaret Kretek Tangan .....	138
Gambar 3.12 Pengawasan Penanaman Modal .....	139
Gambar 3.13 Jumlah Kunjungan MPP periode Februari-Maret 2025 .....	140
Gambar 3.14 Pendampingan Pengajuan NIB .....	141
Gambar 3.15 Pelatihan Pemasaran Digital .....	142
<b>IKU 9</b>	
Gambar 3.1 Penindakan Pelanggaran Perda .....	146
Gambar 3.2 Pengamanan Rokok Ilegal .....	147
Gambar 3.3 Pengamanan Unjuk Rasa .....	148
Gambar 3.4 Pembinaan Anggota Satpol PP .....	149
Gambar 3.5 Evakuasi Kebakaran .....	150
Gambar 3.6 Pemberdayaan Ormas .....	152
Gambar 3.7 Forum Kewaspadaan Dini .....	153
Gambar 3.8 Pembinaan Pendidikan Politik .....	155
Gambar 3.9 Penyaluran Bantuan Hibah .....	156
Gambar 3.10 Wawasan Kebangsaan <i>Goes to School</i> .....	156
Gambar 3.11 Kampung Pancasila .....	157
Gambar 3.12 Pasukan Pengibar Bendera .....	157
Gambar 3.13 Pembinaan Anggota FKUB .....	158
Gambar 3.14 Rakor Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana ....	160
Gambar 3.15 Rekap Rencana Kejadian Banjir .....	161
Gambar 3.16 Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Banjir .....	161
Gambar 3.17 Evakuasi Korban Longsor .....	162
<b>IKU10</b>	
Gambar 3.1 Gelar Musrenbang RKPD dan RPJPD 2025-2045 .....	167
Gambar 3.2 Penyusunan Rencana Aksi .....	168
Gambar 3.3 Kepbup tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi .....	170
Gambar 3.4 Penyusunan Dokumen Perencanaan .....	170
Gambar 3.5 Pendampingan Penyusunan LKIP .....	171
Gambar 3.6 Evaluasi Internal Dokumen SAKIP .....	171
Gambar 3.7 Penghargaan SAKIP Terbaik se-Kabupaten Majalengka .....	172
Gambar 3.8 Laman JDIH Kabupaten Majalengka .....	173
Gambar 3.9 Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum .....	173
Gambar 3.10 LHE ITKP .....	174





Gambar 3.11 Hasil Survei Penilaian Integritas .....	175
Gambar 3.12 Rapat Pembahasan Proses Rencana Kerja Zona Integritas .....	176
Gambar 3.13 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan .....	177
Gambar 3.14 Pendampingan Aktivasi Srikandi V.3 .....	180
Gambar 3.15 Live Streaming Talkshow KenCAN Data dan Kerja Sama dengan Insan Media .....	180
Gambar 3.16 <i>Quick Response</i> Majalengka 112 .....	181
Gambar 3.17 Rekap Pengaduan Tahun 2024 .....	181
Gambar 3.18 Pembinaan Pembuatan Metadata .....	182
Gambar 3.19 Laman Open Data Majalengka .....	182
Gambar 3.20 Pencanaan Desa Cinta Statistik .....	183
Gambar 3.21 Pembinaan Statistik Sektoral .....	183
Gambar 3.22 Perencanaan Kebutuhan ASN .....	185
Gambar 3.23 Seleksi Penerimaan CASN .....	186
Gambar 3.24 Aplikasi Kepegawaian SMART .....	188
Gambar 3.25 Metode Perhitungan Nilai IKM .....	189
Gambar 3.26 Monev Pelayanan Publik .....	190
Gambar 3.27 Sertifikat Juara Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Majalengka .....	191
Gambar 3.28 Peresmian Mal Pelayanan Publik .....	192
Gambar 3.29 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Majalengka .....	192
Gambar 3.30 Majalengka Yanlik Fest 1.0 .....	193
Gambar 3.31 Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek .....	194
<b>IKU 11</b>	
Gambar 3.1 Inovasi Sosialisasi Pajak .....	204
Gambar 3.2 Pelayanan di Mal Pelayanan Publik .....	205
Gambar 3.3 Rekonsiliasi Pengelolaan PAD .....	205
Gambar 3.4 Opini LKPD Tahun 2019-2023 .....	208
Gambar 3.5 Bimtek Penyusunan LKPD .....	209
Gambar 3.6 Rekonsiliasi Barang Milik Daerah .....	210



# BAB 1



1

## PENDAHULUAN

- 1 Gambaran Umum Pemda
- 2 Data Kepegawaian
- 3 Isu Strategis
- 4 Sistematika Pelaporan





## BAB I

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### **A. Gambaran Umum Pemerintah Daerah**

Kabupaten Majalengka memiliki kedudukan yang sama dengan Daerah lainnya yaitu sebagai Daerah Otonom yang diharapkan mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka mencakup seluruh urusan pemerintahan konkuren, kecuali urusan bidang Politik Luar Negeri, Pertanahan, Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama, serta Kewenangan Bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.



Urusan konkuren tersebut terdiri atas:

1. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketertarikan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Urusan Sosial.
2. Urusan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

## B. Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Majalengka per Desember Tahun 2024 berjumlah 11.752 orang dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Infografik ASN Majalengka

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



### C. Isu Strategis

Berikut isu strategis Kabupaten Majalengka yang tertuang pada dokumen RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026:

#### 1. Masih Rendahnya Pembangunan Manusia

Kemiskinan menjadi isu global yang menjadi Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Memasuki Tahun 2021, kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sehingga pada Tahun 2021 kemiskinan mengalami kenaikan yaitu pada angka 12,33 persen dan pada Tahun 2022 turun lagi menjadi 11,94 persen.

Kemiskinan ini disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat. Kemiskinan di Kabupaten Majalengka terutama disebabkan oleh daya beli masyarakat yang rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Daya beli berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan berusaha.

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka yang mencapai 1,3 juta jiwa menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kabupaten Majalengka mampu bersaing secara regional, dan nasional. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain belum optimalnya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM untuk pendidikan dasar yang belum mencapai seratus persen. Selain itu masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, serta belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang





ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah.

Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan masih tingginya prevalensi stunting. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemi COVID-19 dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19, masyarakat tetap dituntut untuk terus berdaya guna dan beradaptasi dengan pola kehidupan baru/beradaptasi dalam kondisi pandemic COVID-19.

## **2. Peningkatan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19, Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 mengalami penurunan drastis meskipun pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 4,75%.

Hal yang sama terjadi pada realisasi investasi, terjadi penurunan nilai investasi yang cukup signifikan pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara serta wilayah di Indonesia yang berdampak pada dinamika ekonomi sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha dan menimbulkan keraguan pasar dalam berinvestasi. Namun di Tahun 2021 hingga Tahun 2022 nilai realisasi investasi kembali berangsur mengalami peningkatan yang cukup signifikan.





Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan, petani kesulitan dalam akses pasar; SDM petani masih terbatas, teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian, sehingga mengakibatkan lonjakan harga pada beberapa komoditi pangan. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah antara lain seperti meningkatnya jumlah masyarakat miskin rawan pangan, masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan pangan dari sisi harga dan kualitas sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi gizi masyarakat.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten, kedepannya diyakini akan ditunjang juga dengan pengembangan ekonomi kreatif sebagai poros ekonomi baru. Asumsi tadi berdasarkan bukti empirik masyarakat di Kabupaten sudah bergerak untuk mengembangkan di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Sebagai start point pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten ditandai dengan predikat Kabupaten sebagai ekosistem ekonomi kreatif terbaik kabupaten di Pulau Jawa melalui seni pertunjukan di Tahun 2019. Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari kekuatan pentahelix yakni Akademisi (*Academician*), Bisnis (*Business*), Komunitas (*Community*), Pemerintah (*Government*), dan Media atau disingkat ABCGM.

Kekuatan tersebut akan dirasakan memiliki dampak jika sentuhan kekuatan sinerginya betul-betul dapat diaplikasikan, bukan hanya *lips service*. Diharapkan pula baik pada proses dan *outcome* dari pergerakan ekonomi kreatif yang konsisten





bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pariwisata, sudah tentu secara *direct* dan *indirect* akan membantu pertumbuhan berbagai sektor dalam PDRB, artinya dengan ekonomi kreatif sebagai polar baru tersebut memiliki dampak positif bagi LPE Kabupaten di masa yang akan datang.

Saat ini subsektor unggulan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka sesuai amanat dalam RPJMD 2018-2023 terdiri dari subsektor pertunjukan, subsektor kuliner dan subsektor kriya. Meskipun pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka pada periode sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, namun pembangunan infrastruktur masih perlu dilaksanakan terutama dalam mendukung infrastruktur sanitasi, air minum, pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif. Selain itu, pembangunan infrastruktur lanjutan periode sebelumnya mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur seperti jalan, jembatan dan transportasi yang menghubungkan antarwilayah di Kabupaten Majalengka sehingga dapat menekan kesenjangan antar wilayah merupakan perwujudan dari konektivitas antar wilayah. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur dasar berupa fasilitas jalan yang berasal dari APBD Kabupaten Majalengka maupun dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan jalan maupun prasarana perhubungan lainnya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas yang diharapkan berdampak pada meningkatnya daya saing daerah.

Konektivitas yang rendah menyebabkan daya saing Kabupaten Majalengka menjadi rendah pula karena konsentrasi pengembangan hanya terjadi pada wilayah tertentu saja. Hasil pertanian maupun perdagangan kurang optimal karena ada hambatan dalam distribusi keseluruhan wilayah Kabupaten Majalengka. Hambatan lain yang disebabkan kurang optimalnya konektivitas antar wilayah adalah pertumbuhan investasi yang kurang merata.





### **3. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Belum Maksimal**

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih perlu ditingkatkan antara lain profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan dampak dalam pengelolaan kepegawaian baik pengembangan karir maupun pembiayaannya.

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka, kepuasan masyarakat atas layanan Pemerintah Daerah baik untuk sektor perijinan maupun non perizinan dan profesionalisme aparturnya belum berjalan efektif dan optimal namun Kabupaten Majalengka secara konsisten terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dari waktu ke waktu.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Majalengka Tahun 2022 dengan kategori “CC”, capaian ini menunjukkan PR besar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Majalengka harus menyelesaikan permasalahan terkait kapasitas aparatur dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

#### **D. Sistematika Pelaporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum, data kepegawaian, isu strategis dan sistematika pelaporan.



## **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Anggaran Tahun 2024

## **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menyajikan uraian mengenai pengukuran kinerja Tahun 2024, analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran setiap indikator, serta akuntabilitas keuangan.

## **Bab IV Penutup**

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

## **Lampiran**

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, *Cascading*, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dipublikasikan, dokumentasi penyerahan LKIP kepada Kepala Daerah, bukti penyebaran LKIP kepada Perangkat Daerah, prestasi dan SK Tim LKIP.

# BAB 2



10

## PERENCANAAN KINERJA

1 RPD

2 PERKIN Tahun 2024

3 Rencana Anggaran Tahun 2024





## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Mengingat tidak adanya Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan, maka dokumen RPD Tahun 2024-2026 tidak memuat visi dan misi sebagai fokus pembangunan daerah, melainkan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berikut ditetapkan tujuan dan sasaran Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Meningkatnya pembangunan manusia dengan sasaran menurunnya penduduk miskin, meningkatnya kualitas pendidikan dan meningkatnya derajat kesehatan.
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kualitas produktivitas daerah dan meningkatnya konduktivitas wilayah.
3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima serta meningkatnya kemampuan keuangan daerah.

#### B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024:

Tabel 2.1 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,37
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	Tahun	7,61





		Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,35
			Prevalensi Stunting	Persen	17,36
2	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	Persen	65,18
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67,08
		Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK)	Triliun Rupiah	27,58
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,44
		Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	Indeks Trantibum	Kategori	C
3	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC
		Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Kategori	Tinggi

### C. Rencana Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan Rencana Anggaran Tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel 2.2 Rencana Anggaran Tahun 2024

Uraian	Rencana Anggaran (Rp)	%
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	578.441.911.908,00	17,79
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.360.463.935.935,00	72,60
Pendapatan Transfer Antar Daerah	312.597.465.447,00	9,61





Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.251.503.313.290,00</b>	
<b>BELANJA</b>		
Belanja Operasi	2.399.727.565.708,00	72,46
Belanja Modal	428.646.473.205,00	12,94
Belanja Tak Terduga	8.323.502.586,00	0,25
Belanja Transfer	474.902.157.978,00	14,34
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.311.599.699.477,00</b>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(60.096.386.187,00)</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>		
Penerimaan Pembiayaan	60.096.386.187,00	
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>60.096.386.187,00</b>	



# BAB 3



14

## AKUNTABILITAS KINERJA

- 1 Pengukuran Kinerja 2024
- 2 Analisis Capaian Kinerja
- 3 Akuntabilitas Keuangan

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka tercemrin dari capaian 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam RPD. Capaian Kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 rata-rata sebesar 101,36%, sebanyak 4 (empat) Indikator tercapai kinerjanya 100% atau lebih dan sebanyak 7 (tujuh) indikator tidak tercapai kinerjanya 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :





### BAB III

#### AKUNTABILITASI KINERJA

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 rata-rata sebesar 101,36%. Sebanyak 4 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 7 Indikator tidak mencapai 100%.

#### PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	10,37	10,82	95,84
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	7,61	7,53	98,95
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,35	71,31	99,94
		Prevalensi Stunting	17,36	24,10*	72,03
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	65,18	62,19	95,41
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,08	64,54	96,21





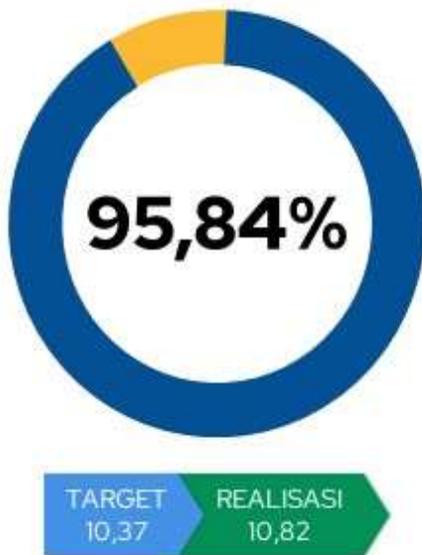
No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK)	27,58	27,43	99,45
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44	4,01	110,72
7	Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	Indeks Trantibum	C	B	109,29
8	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	A	136,73
9	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Tinggi	Tinggi	100

\*data realisasi Tahun 2023

# PERSENTASE PENDUDUK MISKIN **IKU 1**

## MENURUNNYA PENDUDUK MISKIN

### CAPAIAN 2024



### PERBANDINGAN DENGAN



### FAKTOR

Yang mempengaruhi

- ❖ Tatakelola pengentasan kemiskinan
- ❖ Pengurangan beban pengeluaran
- ❖ Peningkatan pendapatan
- ❖ Pengurangan kantong-kantong kemiskinan

### PROGRAM

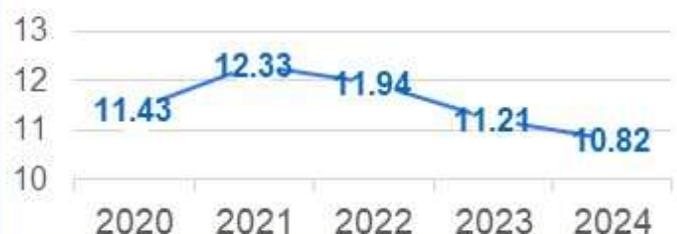
Yang mendukung

- ❖ Program Rehabilitasi Sosial
- ❖ Program Perlindungan dan Jaminan
- ❖ Program Pemberdayaan Sosial
- ❖ Program Penempatan Tenaga Kerja
- ❖ Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- ❖ Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- ❖ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- ❖ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- ❖ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- ❖ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- ❖ Program Penyelenggaraan Jalan
- ❖ Program Pengelolaan Pendidikan

### EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja indikator ini tidak ada dikarenakan capaian IKU hanya 95,84%

### PERSENTASE PENDUDUK MISKIN





## SASARAN 1: MENURUNNYA PENDUDUK MISKIN

Sasaran ini diukur dengan **Presentase Penduduk Miskin** yang merupakan persentase Masyarakat dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk melempokan apakah seseorang atau suatu keluarga dianggap miskin atau tidak.

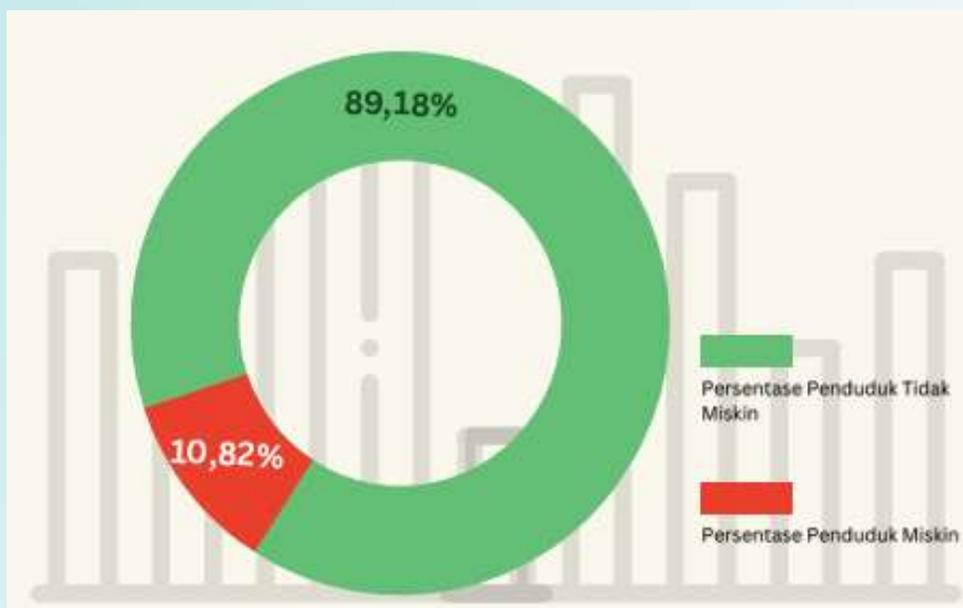
Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator kinerja ini adalah Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Kesehatan.

### Persentase Penduduk Miskin



Gambar 3.1 Persentase Penduduk Miskin Kab. Majalengka 2015-2024  
Sumber : BPS Majalengka

Pada Tahun 2024 Persentase Penduduk miskin di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan jika **dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023**. Pada Tahun 2023 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Majalengka sebesar 11,21% sedangkan di Tahun 2024 sebesar 10,82%, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan capaian sebesar 3,33% terlihat dari realisasi Persentase Penduduk Miskin yang berkurang sebesar 0,39% dari tahun sebelumnya.



Gambar 3.2 Komposisi Persentase Penduduk Miskin Tahun 2024

Sumber : BPS Majalengka

Terbukti dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 berkurang sebanyak 4.160 ribu jiwa dari total penduduk miskin di tahun sebelumnya yang mencapai 138.740 jiwa, sehingga pada Tahun 2024 ini total penduduk miskin berjumlah 134.580 jiwa.



Gambar 3.3 Penghargaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Sumber : Sekretariat Daerah

Sedangkan untuk kemiskinan ekstrem di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 sebesar 0,46%, turun 0,4% jika dibandingkan dengan kemiskinan ekstrem pada Tahun 2023 sebesar 0,86%.





Gambar 3.4 Penduduk Miskin Ciayumajakuning Tahun 2024  
Sumber : BPS Majalengka

Menurut data BPS Jika **dibandingkan dengan angka kemiskinan rata-rata di Wilayah Ciayumajakuning**, Persentase Penduduk miskin Kabupaten Majalengka berada di urutan kedua lebih baik daripada Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon, naik satu peringkat dibandingkan dengan posisi pada Tahun 2023, akan tetapi masih berada di bawah Kota Cirebon. Rata-rata Persentase Penduduk miskin di wilayah Ciayumajakuning yaitu 10,93% selisih 0,11% dengan Kabupaten Majalengka. Namun jika dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat masih lebih rendah 3,36% dengan realisasi 7,46%.

Realisasi penurunan Persentase Penduduk miskin jika **dibandingkan dengan target akhir RPD** baru mencapai 89%. Hal ini menggambarkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mengurangi kemiskinan masih harus ditingkatkan lagi karena target pada akhir RPD 9,63% belum tercapai.

Meskipun realisasi Tahun 2024 lebih baik 0,39% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, namun jika **realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan target Tahun 2024** masih belum mencapai 100%, hanya sebesar 95,84% dengan realisasi penurunan angka kemiskinan berada di angka 10,82% dari target 10,37%.

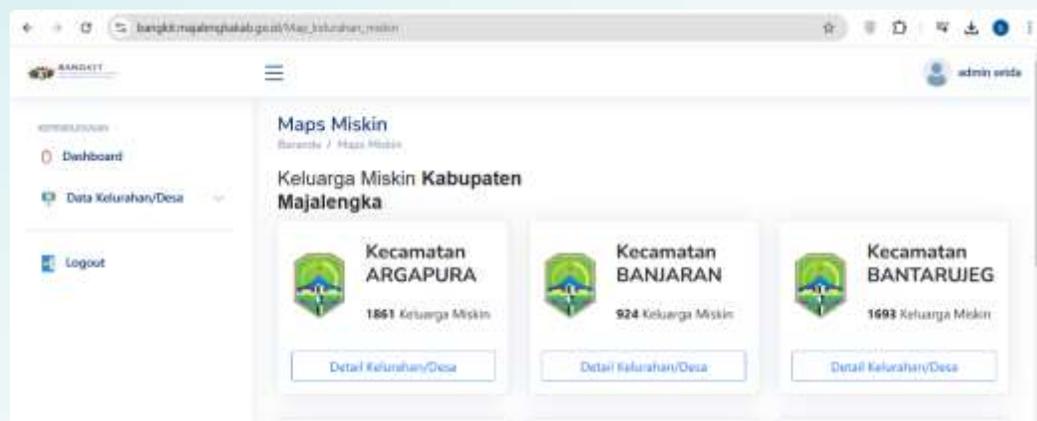
Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia terdapat beberapa **faktor** yang dapat menurunkan kemiskinan, diantaranya tata kelola pengentasan kemiskinan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.





## 1. Tatakelola Pengentasan Kemiskinan

Sebelum mengimplementasikan strategi penurunan kemiskinan, ada langkah fundamental yang harus dilakukan yaitu terkait tatakelola pengentasan kemiskinan terutama akurasi data penduduk miskin sehingga sasaran yang akan diintervensi menjadi lebih tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Majalengka telah membentuk tim khusus untuk menangani kemiskinan yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Namun **data yang tersedia saat ini masih belum cukup akurat** sehingga pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah meluncurkan aplikasi BANGKIT untuk memperbaiki data kemiskinan yang ada di Kabupaten Majalengka, data yang akurat dan terkini akan memastikan bahwa bantuan dan program yang disediakan benar-benar tepat sasaran.



Gambar 3.5 Aplikasi BANGKIT

Sumber : <https://bangkit.majalengkakab.go.id/>

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan kerjasama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk memvalidasi dan memverifikasi data kemiskinan berbasis elektronik. Sebanyak 757 Praja IPDN telah melakukan verifikasi dan validasi sebanyak 50.058 dari total 151.000 kepala keluarga.

Kabupaten Majalengka menurut data BPS memiliki persentase penduduk miskin sebesar 11,21% pada Tahun 2023. Setelah dilakukan validasi dengan mengacu kepada 15 indikator oleh Praja IPDN dan disinergikan dengan aplikasi BANGKIT serta Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), saat ini diketahui tercatat **8,34%** persentase penduduk miskin di Majalengka.

Diharapkan dari kegiatan ini dapat menjadikan data lebih akurat dan dapat mendeteksi keluarga miskin yang sudah graduasi kedepannya secara berkelanjutan.





Selain perbaikan data, diperlukan juga perbaikan proses bisnis dan SOP dalam pengentasan kemiskinan.

Upaya yang harus dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan tatakelola pengentasan kemiskinan adalah:

- a) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi BANGKIT secara berkelanjutan agar intervensi program-program tepat sasaran.
- b) Meningkatkan komitmen setiap Kepala Perangkat Daerah dalam program pengentasan kemiskinan.
- c) Memetakan logical framework yang lebih berorientasi hasil.
- d) Menyusun perencanaan yang lebih terpadu.
- e) Memprioritaskan anggaran untuk pengentasan kemiskinan.
- f) Menyusun Proses Bisnis.
- g) Menyusun SOP pengentasan kemiskinan.
- h) Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang dilaksanakan.

## 2. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

### a. Bantuan Jaminan Sosial

Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 telah memberikan bantuan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bantuan sosial sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun pada Tahun 2024 peningkatan kesejahteraan sosial bagi **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial belum optimal** dari 335.511 jiwa yang harusnya mendapat bantuan namun hanya 325.830 jiwa yang mendapat bantuan. Pemerintah Kabupaten Majalengka terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara:



Gambar 3.6 Pelayanan Kartu Indonesia Pintar  
Sumber : Dinas Sosial



- Memberikan rekomendasi Kartu Indonesia Pintar sebanyak 2.482 penerima manfaat.
- Menerbitkan rekomendasi bantuan iuran jaminan kesejahteraan sosial sebanyak 172.002 bantuan yang berupa BPJS dan PBI.
- Memberikan bantuan perlindungan sosial kepada 2.283 orang.
- Memberikan bantuan kepada keluarga miskin berupa Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai kepada 151.099 keluarga.



Gambar. 3.7 Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial  
Sumber : Dinas Sosial

- Memberikan bantuan Rantang Kanyaah kepada masyarakat lansia yang hidup sebatangkara.

#### **b. Akses Pendidikan**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah sebuah indikator yang digunakan dalam bidang pendidikan untuk mengukur proporsi atau persentase populasi usia sekolah yang berada pada tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan total populasi usia sekolah di suatu negara atau wilayah pada tahun tertentu.

APM PAUD mengukur seberapa banyak anak pendidikan usia dini (usia 5-6 tahun) yang mengikuti Pendidikan, APM SD mengukur seberapa banyak anak usia sekolah dasar (usia 7-12 tahun) yang mengikuti pendidikan, APM SMP mengukur seberapa banyak anak usia sekolah menengah pertama (usia 13-15 tahun) yang mengikuti pendidikan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi APM adalah masih terdapat keluarga yang **menghadapi kendala ekonomi sehingga anak-anaknya tertunda masuk sekolah bahkan tidak sekolah**, masih rendahnya kesadaran akan Pendidikan terutama di daerah





pedesaan, dan beberapa wilayah di Majalengka memiliki kondisi akses belum baik menuju sekolah.

**APM PAUD pada Tahun 2024 tercapai 97,16% dengan target 95,37 dan realisasi 92,66, APM SD/MI pada Tahun 2024 tercapai 96,49% dengan target 91,25 dan realisasi 90,27 dan APM SMP/MTs pada Tahun 2024 tercapai 96,91% dengan target 88,15 dan realisasi 85,43.**

Untuk meningkatkan akses pendidikan di Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan:

- Pemberian bantuan perlengkapan peserta didik dari keluarga tidak mampu sebanyak 1550 orang yang tersebar di 800 Satuan Pendidikan.
- Pemberian bantuan kepada siswa SD dari keluarga tidak mampu berupa perlengkapan sekolah seperti alat tulis, tas dan seragam sekolah untuk 269 siswa.



Gambar. 3.8 Pemberian Perlengkapan Siswa SD dan SMP  
Sumber : Dinas Pendidikan

- Pemberian bantuan kepada siswa SMP dari keluarga tidak mampu berupa perlengkapan sekolah seperti alat tulis, tas dan seragam sekolah untuk 251 siswa.
- Pengelolaan dana Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD yang transparan dan akuntabel sebanyak 824 Satuan pendidikan.
- Penyaluran dana BOSP sebanyak 671 satuan pendidikan jenjang SD.
- Penyaluran dana BOSP sebanyak 124 satuan pendidikan jenjang SMP.
- Berkoordinasi dengan berbagai sektor terkait sosialisasi implementasi wajib PAUD satu tahun Pra SD.



- Penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar jenjang SD sebanyak 120.308 siswa dengan proses pencairan 4 tahap.
- Penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar jenjang SMP sebanyak 21.028 siswa dengan proses pencairan 4 tahap.
- Menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perkembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI).

### c. Akses Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berupaya memberikan kemudahan akses kesehatan melalui:

- Peningkatan jumlah peserta **Program Penerima Bantuan Iuran (PBI)** pada Tahun 2024 sebesar 175.000 orang.



Gambar. 3.9 Puskesmas Nganjang Ka Imah  
Sumber : Dinas Kesehatan

- Melakukan pengecekan kesehatan secara berkala melalui layanan jemput bola dengan **Program “Puskesmas Nganjang Ka Imah”**. Telah melakukan intervensi PIS-PK sebanyak 130.412 Keluarga pada Tahun 2024, namun masih ada 102.417 Keluarga lagi yang belum di intervensi pada Tahun 2024.
- Rumah Sakit Umum Daerah Talaga pada Tahun 2024 telah mendapatkan akreditasi **utama** setelah melaksanakan kegiatan survey akreditasi pada tanggal 6, 10 dan 11 Juni 2024 oleh tim surveyor Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP).



Pengoperasionalan RSUD Talaga sudah berjalan, **namun belum maksimal karena dari segi tenaga kesehatan spesialis masih minim.**



Gambar. 3.10 Akreditasi RSUD Talaga  
Sumber : RSUD Talaga

#### d. Stabilitas Harga



Gambar 3.11 Garis Kemiskinan Tahun 2024  
Sumber : BPS

Berdasarkan data BPS Garis Kemiskinan Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 sebesar Rp547.912,00 per kapita per bulan dan pada Tahun 2023 sebesar Rp520.713,00. Selama periode 2023 hingga 2024 telah terjadi kenaikan **garis kemiskinan Rp27.199,00 per kapita per bulan atau naik 5,22%**. Garis Kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan GKNM adalah





kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.



Gambar 3.12 Inflasi Tahun 2024

Sumber : BPS

Meskipun Garis Kemiskinan di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan **namun tidak sejalan** dengan laju inflasi yang justru cenderung menurun di angka 1,6% YoY pada Desember 2024. Hal ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka jangan sampai terjebak ke dalam zona stagnansi yang berakibat menambah jumlah penduduk miskin baru.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka secara rutin melakukan Pemantauan Stabilitas Harga terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru.



Gambar 3.13 Pemantauan Stabilitas Harga

Sumber : Sekretariat Daerah

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga fokus dalam pengendalian stok barang yang tersedia di masyarakat sehingga pada Tahun 2024 mendapatkan penghargaan dari Pj. Gubernur Jawa Barat sebagai Juara Harapan II Kategori Non IHK PINUNJUL Award Tahun 2024 yang diberikan pada bulan November Tahun 2024.





Gambar 3.14 Inflasi Tahun 2024  
Sumber : BPS

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan Operasi Pasar Murah pada beberapa kecamatan sehingga masyarakat dapat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.



Gambar 3.15 Operasi Pasar Murah  
Sumber : Sekretariat Daerah

Pemerintah Kabupaten Majalengka juga telah melakukan Program Panen Raya pada Tahun 2024 untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan keterjangkauan bahan pokok di masyarakat.





Gambar 3.16 Panen Raya  
Sumber : Sekretariat Daerah

Akan tetapi dampak Operasi Pasar Murah dan Panen Raya terhadap kenaikan harga pangan belum signifikan, maka dari itu Pemerintah harus terus hadir untuk **memastikan bahan-bahan pokok tersedia dengan harga terjangkau** pada saat harga bahan pokok meningkat atau terjadi kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga bahan pokok juga dipengaruhi oleh biaya produksi maka Pemerintah harus mampu menekan biaya produksi dan memberikan kepastian alur produksi pasca panen sehingga ketahanan pangan suatu wilayah dapat terjamin.



Gambar 3.17 Penghargaan Ketahanan Pangan  
Sumber : Sekretariat Daerah

Upaya yang harus dilakukan di masa mendatang untuk menurunkan beban pengeluaran Masyarakat adalah:

- a) Memberikan bantuan jaminan dan perlindungan sosial kepada seluruh PPKS yang ada di Kabupaten Majalengka.





- b) Meningkatkan kualitas pemberian rekomendasi jaminan Kesehatan dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
- c) Mendistribusikan tenaga medis di tingkat puskesmas agar lebih merata dan mendistribusikan atau merekrut dokter spesialis pada RSUD Talaga agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d) Meningkatkan jumlah bantuan bagi siswa yang keluarganya berada di bawah garis kemiskinan seperti buku, alat tulis, seragam, sepatu, tas dan lainnya
- e) Menyediakan transportasi bagi siswa dengan jarak tempuh ke sekolah yang jauh, uang saku, biaya kursus/les tambahan agar bisa meminimalisir kendala yang dihadapi baik itu secara ekonomi, lingkungan maupun secara internal.
- f) Mencadangkan stok pangan yang cukup agar stabilitas harga dapat terjaga.
- g) Meningkatkan pengawasan terhadap pasar beras dan gabah untuk mencegah praktik spekulasi harga yang tidak sehat.
- h) Meningkatkan jangkauan dan kuantitas Operasi Pasar Murah.
- i) Membuat sistem distribusi yang lebih efisien dari pelaku usaha sampai ke konsumen untuk menurunkan harga jual. Salah satu contohnya Pemerintah melalui BUMD membeli bahan pokok dari produsen langsung untuk disalurkan ke BUMDES hingga bisa dibeli masyarakat dengan harga terjangkau. Perlu juga diatur SOP agar barang tepat sasaran kepada penduduk miskin.

### **3. Pengurangan Kantong Kemiskinan**

#### **a. Pembangunan rumah tangga layak huni**



Gambar 3.18 Rumah Tangga Layak Huni

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



Dalam hal pengurangan kantong kemiskinan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang dapat dilihat dari rumah tangga hunian layak sebanyak 368.132 unit dari total jumlah hunian sebanyak 381.253 unit rumah. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah merehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 386 unit rumah namun masih terdapat rumah **tidak layak huni yang belum mendapat manfaat dari rehabilitasi rutilahu**. ini. Pemerintah Kabupaten Majalengka juga telah membangun jaringan perpipaan sebanyak 1.400 SR (sambungan rumah)/KK yang tersebar di 18 Desa dan membangun jalan lingkungan sepanjang 22 km yang tersebar pada 72 Desa untuk memudahkan transportasi antar desa.



Gambar 3.19 Pembangunan Jalan Lingkungan  
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

#### **b. Pembangunan Infrastruktur Jalan**



Gambar 3.20 Pemeliharaan Berkala Jalan  
Sumber : Dinas PUTR

Salah satu peranan penting infrastruktur yaitu meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk membuka akses ke pasar yang lebih luas. Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024





telah meningkatkan jalan mantap sepanjang 782,34 km dari total jalan sepanjang 915,02 km. Namun pada Tahun 2024 **Capaian Kinerja persentase jalan mantap hanya 96,30% dengan target 89,50% dan realisasi 86,19%** dikarenakan keterbatasan anggaran yang mengakibatkan prioritas perbaikan hanya dilakukan pada beberapa ruas jalan tertentu ditambah lagi dengan faktor alam seperti curah hujan yang cukup tinggi, longsor dan banjir mengakibatkan percepatan kerusakan jalan. Selain itu, pemeliharaan rutin yang kurang maksimal menyebabkan adanya tingkat kerusakan ringan yang berkembang menjadi kerusakan lebih parah.



Gambar 3.21 URC Tambal Jalan  
Sumber : Dinas PUTR

**Menindaklanjuti rekomendasi LKIP pada Tahun 2023** terkait membuat layanan aduan dan tanggapan terhadap perbaikan jalan, maka **dibuatlah inovasi Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan (URC)** yang dilaksanakan oleh 7 UPTD PKBTR, tim ini bertugas melakukan penanganan darurat jalan yang dilaporkan oleh masyarakat secara langsung. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan pemeliharaan darurat jalan berdasarkan laporan masyarakat pada 649 titik Lokasi di 70 ruas jalan. Selain itu, telah dilaksanakan pemeliharaan berkala jalan pada 175 titik Lokasi di sepanjang 76,82 km dan melakukan rehabilitasi jalan di 9 titik Lokasi sepanjang 28,58 km.



Upaya yang harus dilakukan di masa mendatang untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan adalah

- a) Dinas PUTR harus mendata dimana saja peta kantong kemiskinan dan fokus untuk meningkatkan aksesnya.
- b) Meningkatkan sosialisasi rutilahu dan memudahkan prosedur rutilahu secara tepat sasaran termasuk kepada masyarakat yang tidak mampu.
- c) Melakukan pemeliharaan rutin terhadap jalan kabupaten yang kondisinya sudah baik dan sedang agar tetap dalam kondisi mantap, melanjutkan rekonstruksi, peningkatan, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi terhadap jalan kabupaten yang saat ini kondisinya rusak dan rusak berat.
- d) Membuat Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan yang lebih luas ke kecamatan-kecamatan sehingga pengaduan jalan rusak baik itu di media sosial atau melalui *call center* bisa ditindaklanjuti dengan cepat.

#### 4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

##### a. Peningkatan penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja



Gambar 3.22 Tingkat Pengangguran Terbuka  
Sumber : BPS

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu melalui penempatan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerjanya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 di Kabupaten Majalengka menunjukkan angka yang baik yaitu 4,01% dari jumlah angkatan kerja. Sebanyak 95,99% telah bekerja namun 45,36% masih didominasi oleh lulusan SD. Angka ini lebih baik jika dibandingkan pada Tahun 2023 dengan realisasi TPT sebesar 4,12% dan



penduduk yang telah bekerja didominasi oleh lulusan SD sebanyak 53%.

Pemerintah harus hadir sebagai jembatan antara dunia kerja dengan masyarakat, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menempatkan pencari kerja sebanyak 14.971 orang dari jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 15.313 orang melalui pelatihan pencari kerja sebanyak 1.510 orang, melakukan identifikasi lowongan kerja sebanyak 7.209 lowongan kerja serta mengidentifikasi pencari kerja melalui *job fair* sebanyak 11.344.

Ketercapaian ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka salah satunya dengan **menindaklanjuti rekomendasi LKIP Tahun 2023** yaitu “Membentuk Lembaga Pelatihan Kerja Digital atau bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja dan memperbanyak program magang dengan Perusahaan maupun Pemerintah”. Pada bulan September Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah membentuk Balai Latihan Kerja (BLK) Cakraningrat dengan memanfaatkan bangunan yang lokasinya berada di Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) di desa Cikasarung Kecamatan Majalengka, dengan adanya BLK membantu calon tenaga kerja melaksanakan pelatihan-pelatihan sebagai persiapan memasuki dunia kerja maupun wirausaha.



Gambar 3.23 Balai Latihan Kerja Cakraningrat  
Sumber : Sekretariat Daerah

Namun untuk meningkatkan kompetensi dari para pencari kerja Pemerintah Kabupaten Majalengka masih perlu **meningkatkan kegiatan pelatihan yang baru dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pada Tanggal 24 september 2024 dan 4 November 2024.**





Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 telah memberikan bantuan modal usaha untuk PPKS yang berupa gerobak sebanyak 55 KPM, Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) daerah sebanyak 5 Kelompok dan provinsi sebanyak 10 Kelompok, Program Bantuan Modal Usaha dari Kementerian Sosial berupa PENA sebanyak 67 KPM dan Bantuan Rumah Sosial Terpadu (RST) sebanyak 33 KPM/Rumah.



Gambar 3.24 Bantuan Modal Usaha  
Sumber : Dinas Sosial

### b. Peningkatan Produktivitas Pertanian



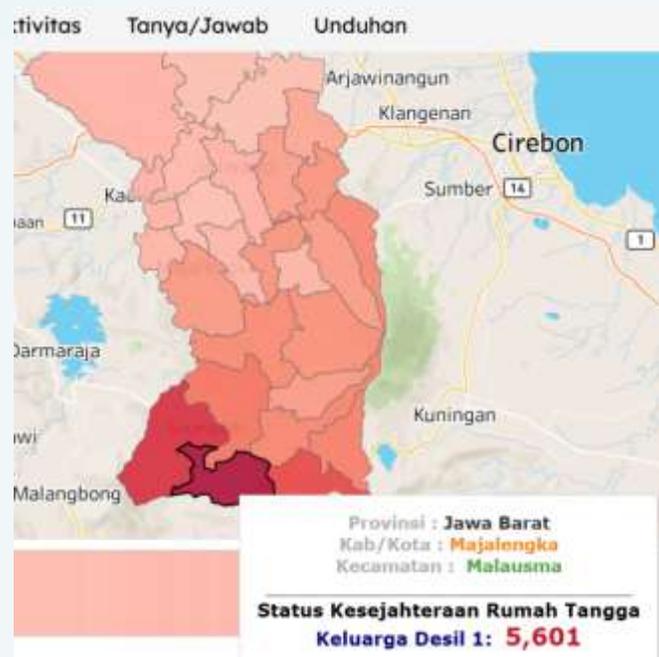
Gambar 3.25 Nilai Tukar Petani  
Sumber : BPS



Berdasarkan data BPS Pada Tahun 2024, Nilai Tukar Petani turun pada Bulan September menjadi 111,98. Subsektor Tanaman Pangan mengalami kenaikan sebesar 1,38 persen; subsektor tanaman Hortikultura mengalami penurunan sebesar 7,86 persen; subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat mengalami kenaikan 2,16 persen; subsektor Peternakan mengalami kenaikan sebesar 0,08 persen; dan subsektor Perikanan cenderung stabil.

Berdasarkan data BPS tahun 2023 usaha dengan pertanian terbanyak di Kabupaten Majalengka adalah Kecamatan Lemahsugih sebanyak 12.305, Bantarujeg 8.689, dan Malausma 6.858 unit atau 18,9% dari total usaha pertanian perorangan di Kabupaten Majalengka.

Ironisnya Kecamatan Lemahsugih, Malausma dan Bantarujeg termasuk kedalam salah satu desil 1 (kelompok kesejahteraan yang paling rendah) terbanyak di Kabupaten Majalengka yaitu sebanyak 4.377, 5.601, dan 2.583 keluarga. Oleh karena itu, Pemerintah harus hadir untuk **memberikan bantuan kepada petani agar petani menjadi sejahtera** dan keluar dari garis kemiskinan.



Gambar 3.26 Desil 1 Kabupaten Majalengka  
Sumber : P3KE

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan berbagai upaya, diantaranya:

- Membangun prasarana pertanian dalam bentuk irigasi usaha tani yang dilakukan dalam bentuk irigasi pertanian di 6 lokasi





Gambar 3.27 Monitoring Irigasi

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

- Memberikan bantuan alat mesin pertanian berupa alat mesin potong rumput dan pencacah rumput.
- Memberikan bibit bawang merah unggul dengan pupuk ke kelompok penerima bantuan untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil panen.

Berbagai bantuan tersebut dimaksudkan untuk memicu agar masyarakat bisa tergerak meningkatkan usahanya. Upaya yang harus dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat adalah:

- a) Meningkatkan kegiatan pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja baik *offline* maupun *online* dan memperbanyak program magang dengan Perusahaan maupun Pemerintah.
- b) Meningkatkan bantuan berupa pupuk murah, alat mesin pertanian kepada petani serta perbaikan sistem distribusi dan penyuluhan mulai dari penanaman sampai panen.
- c) Meningkatkan produktivitas melalui penggunaan teknologi modern, penggunaan pupuk organik dan praktik pertanian berkelanjutan.
- d) Membantu mendapatkan akses pembiayaan pertanian.
- e) Meningkatkan pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Miskin.





Intervensi Pemerintah Kabupaten Majalengka juga menjadi faktor keberhasilan penurunan angka kemiskinan melalui **program-program** sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Program yang Mendukung IKU 1

No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	1.282.228.200	1.281.928.200
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	3.960.882.900	3.947.534.500
3.	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	847.925.000	844.925.000
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	416.463.948	415.894.900
5.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	18.790.505.650	18.709.356.950
6.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.747.820.000	1.745.792.000
7.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.499.477.000	12.648.357.000
8.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	117.185.733.908	115.285.515.938
9.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	12.482.892.000	12.289.821.723
10.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.631.962.600	2.590.997.550,00
11.	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	110.080.538.707	108.119.295.165
12.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	559.430.392.467	543.041.374.111

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Penduduk Miskin pada sasaran Menurunnya Penduduk Miskin tidak ada karena IKU hanya mencapai 95,84%.



## MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

### CAPAIAN 2024



### PERBANDINGAN DENGAN



### FAKTOR

Yang mempengaruhi

- ❖ Ketidakmampuan membayar biaya
- ❖ Lingkungan dan pemahaman atas pentingnya Pendidikan
- ❖ Ketersediaan sarana/prasarana Pendidikan

### PROGRAM

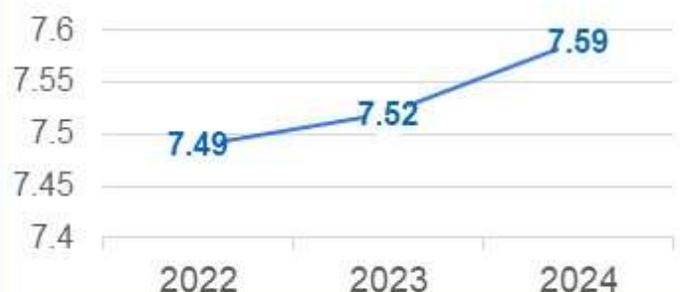
Yang mendukung

- ❖ Program Pengelolaan Pendidikan

### EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja indikator ini tidak ada dikarenakan capaian IKU hanya 98,95%

### RLS





## **SASARAN 2: MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN**

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. RLS adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini adalah Dinas Pendidikan.

### **Rata-Rata Lama Sekolah**

Pada Tahun 2024 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan realisasi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Majalengka sebesar 7,52 sedangkan di Tahun 2024 sebesar 7,53, hal ini menunjukkan adanya perbaikan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 0,01 poin. Capaian kinerja Tahun 2024 lebih rendah **jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023** sebesar 1,05 poin terlihat dari capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 98,95% dan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 100%.

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan target di Tahun 2024 sebesar 7,61 namun kinerja pada tahun tersebut belum mampu mencapai target karena hanya bisa merealisasikan di angka 7,53 sehingga **capaian pada Tahun 2024 hanya sebesar 98,95%**

Target akhir RPD pada Tahun 2026 adalah 7,82 sehingga **perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan target akhir RPD** sudah mencapai 96,29%, meskipun sudah berada di jalur yang benar namun perlu ada strategi untuk mencapai target Rata-rata Lama Sekolah dalam 2 tahun kedepan.

Pada Tahun 2024 Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Barat adalah 8,87 dan untuk Rata-rata Lama Sekolah Nasional yaitu 8,85, sehingga **jika dibandingkan dengan RLS Provinsi Jawa Barat** lebih rendah 1,26 poin dengan peringkat Kabupaten Majalengka diantara Kabupaten/Kota





se-Jawa Barat menempati posisi ke 5 terbawah dan jika dibandingkan dengan RLS Nasional lebih rendah 1,24 poin.

Rata-rata lama sekolah (RLS) **dipengaruhi oleh** angka putus sekolah akibat ketidakmampuan membayar biaya pendidikan. Di samping itu masih terdapat **beberapa faktor** yang menyebabkan anak putus sekolah, seperti **faktor lingkungan dan pemahaman** atas pentingnya pendidikan serta **ketersediaan sarana/prasarana pendidikan**.

### 1. Ketidakmampuan Membayar Biaya

Berdasarkan data BPS pada Tahun 2024 penduduk miskin di Kabupaten Majalengka berjumlah 134.580 jiwa sehingga masih terdapat keluarga yang belum memfokuskan anak-anaknya untuk bersekolah. Karena tidak hanya biaya sekolahnya saja yang menjadi masalah, namun biaya perlengkapan sekolah seperti seragam, buku, transportasi dapat menjadi penghalang bagi keluarga berpenghasilan rendah. Ditambah untuk anak sekolah usia menengah yang seharusnya duduk di bangku SMP berpotensi berhenti sekolah untuk membantu keluarganya bekerja mencari nafkah.

Disinilah peran pemerintah harus hadir untuk memastikan setiap anak dapat bersekolah dengan menanggung biaya Pendidikan dan penunjang pendidikannya.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyalurkan bantuan perlengkapan siswa dari keluarga miskin sebanyak 1.550 orang jenjang PAUD dengan anggaran Rp.198.400.000, jenjang SD sebanyak 269 orang dengan anggaran Rp. 228.397.500 dan jenjang SMP sebanyak 251 orang dengan anggaran Rp. 250.325.000. **Namun bantuan yang diberikan masih belum signifikan.**



Gambar 3.1 Penyerahan Perlengkapan Peserta Didik  
Sumber : Dinas Pendidikan



Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 telah menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar jenjang SD sebanyak 120.308 siswa, jenjang SMP sebanyak 21.2028 siswa dengan proses pencairan 4 tahap.

## 2. Lingkungan dan Pemahaman atas Pentingnya Pendidikan

Keluarga yang mendukung pendidikan anak-anaknya cenderung memiliki RLS yang lebih tinggi. Dukungan ini bisa berupa motivasi, bantuan finansial, atau penyediaan fasilitas belajar. Orang tua yang berpendidikan tinggi biasanya lebih memahami pentingnya pendidikan dan cenderung mendorong anak-anaknya untuk bersekolah lebih lama. Masih terdapatnya **akses ke sekolah yang belum memadai** dikarenakan jarak yang jauh atau kurangnya infrastruktur Pendidikan dapat menjadi faktor penyebab siswa putus sekolah.

Selain itu, pemahaman atas pentingnya Pendidikan juga dapat mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah. Masyarakat yang memahami bahwa pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup, peluang kerja, dan pendapatan cenderung lebih mendorong anak-anaknya untuk bersekolah lebih lama. Namun untuk sebagian masyarakat dengan kemampuan finansial kurang memadai terkadang tidak terlalu sadar akan pentingnya Pendidikan dikarenakan lebih penting untuk membantu orang tua bekerja misalnya ke sawah atau berdagang bahkan banyak sektor informal yang menyerap tenaga kerja di usia sekolah.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan sosialisasi terkait Penyelenggaraan Perkembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Sosialisasi Gerakan Masuk PAUD 1 Tahun Pra SD, Sosialisasi peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah melalui Pendidikan kesetaraan.

Untuk meningkatkan RLS, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berkolaborasi bersama dengan kecamatan dan desa dengan melakukan inovasi Aksi Ramah (Akselerasi capaian Rata-rata Lama Sekolah). Perlu adanya kolaborasi dari kecamatan dan desa untuk mengidentifikasi anak usia sekolah yang tidak sekolah dan memberikan bantuan yang tepat untuk membuat anak tersebut menjadi sekolah.





Gambar 3.2 Sosialisasi Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini  
Sumber: Dinas Pendidikan

### 3. Ketersediaan Sarana/Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan Pendidikan. Ketersediaan sekolah di setiap wilayah yang dapat dijangkau oleh masyarakat baik itu PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan akan memudahkan akses terhadap Pendidikan. **Gedung sekolah yang layak, aman dan nyaman** akan mendorong siswa untuk tetap bersekolah, sebaliknya jika gedungnya rusak atau tidak memadai dapat mengurangi minat siswa untuk belajar. Ruang kelas yang memadai dengan rasio siswa-guru yang seimbang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, namun apabila siswa dan guru tidak seimbang atau tidak merata dapat menyebabkan **tidak terpenuhinya rombongan belajar** minimal sehingga sekolah tidak dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

Fasilitas lainnya seperti perpustakaan dan Laboratorium dapat meningkatkan minat belajar siswa dan mendukung keberlanjutan Pendidikan. Buku Pelajaran, modul dan alat tulis juga penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Ketersediaan teknologi Pendidikan juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran seperti tersedianya **internet, komputer dan proyektor** menjadikan pembelajaran lebih modern.





Gambar 3.3 Rapat kerja PT. Astra dengan sekolah Binaan  
Sumber : Dinas Pendidikan

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah bekerjasama dengan pihak PT Astra Tol Cipali terkait pemberian bantuan peralatan multimedia di SDN Bongas Kulon III dan 4 sekolah lainnya yang terdampak tol Cipali.

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah membangun ruang kelas SD sebanyak 17 Ruang, Pembangunan ruang kelas SMP sebanyak 2 ruang, Pembangunan laboratorium SD sebanyak 20 ruang, Pembangunan sarana prasarana utilitas sekolah sebanyak 51 unit dan Pembangunan ruang UKS sebanyak 12 ruang. Selain itu, rehabilitasi ruang kelas pada SD telah dilaksanakan sebanyak 312 ruang, rehabilitasi ruang kelas SMP sebanyak 191 ruang, dan rehabilitasi ruang kelas PAUD sebanyak 28 ruang.



Gambar 3.4 Rehabilitasi SD Sindanghaji 2 Kecamatan Palasah  
Sumber : Dinas Pendidikan





Upaya yang harus dilakukan dimasa yang akan datang untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Majalengka yaitu:

- a. Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan dan Desa untuk mendata seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Majalengka dan melakukan intervensi kepada anak yang tidak sekolah baik itu secara finansial maupun edukasi agar dapat memastikan seluruh anak di wilayah kerjanya dapat bersekolah;
- b. Meningkatkan bantuan kepada siswa PAUD, SD, SMP baik itu berupa perlengkapan maupun penunjang lainnya agar terus melanjutkan sekolahnya;
- c. Meningkatkan akses pendidikan dengan menyiapkan transportasi bagi siswa yang memiliki jarak jauh ke sekolah;
- d. Meningkatkan akses pendidikan dengan mendata ulang berdasarkan skala prioritas sekolah mana yang harus direhabilitasi terlebih dahulu;
- e. Meningkatkan kompetensi guru dengan cara pelatihan metode pembelajaran terbaru yang efektif;
- f. *Campaign* tentang pentingnya sekolah;
- g. Meningkatkan sarana prasarana sekolah dengan pembelajaran berbasis IT;
- h. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan non formal.

Berikut program-program yang mendukung capaian kinerja RLS:

Tabel 3.3 Program yang Mendukung IKU 2

No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	559.430.392.467	543.041.374.111

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator RLS (Rata-rata Lama Sekolah) pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan tidak ada karena IKU hanya mencapai 98,95%.



## MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN

### CAPAIAN 2024



### PERBANDINGAN DENGAN



### FAKTOR

Yang mempengaruhi

- ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada fasilitas Kesehatan
- ❖ Pemenuhan sarana prasarana dan alat untuk standar layanan di rumah sakit
- ❖ Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat
- ❖ Meningkatnya kesehatan lingkungan
- ❖ Meningkatnya kualitas SOM Kesehatan dan tersedianya farmasi, alat kesehatan dan makan minum
- ❖ Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular
- ❖ Meningkatnya kualitas layanan RSUD Talaga
- ❖ Meningkatnya akses pelayanan Gizi
- ❖ Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan bidang Kesehatan
- ❖ Meningkatnya kualitas Kesehatan pelayanan
- ❖ rujukan RSUD Majalengka dan RSUD Cideres

### PROGRAM

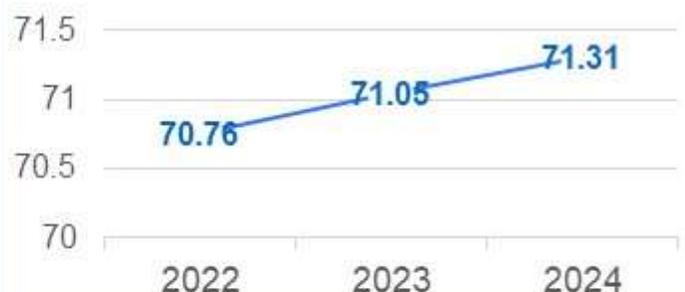
Yang mendukung

- ❖ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- ❖ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

### EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja indikator ini tidak ada dikarenakan capaian IKU hanya 99,94%

### AHH





### SASARAN 3:

#### Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran ini diukur dengan dua indikator, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dan Prevalensi Stunting. AHH merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu dan dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut Umur SP2010. **Namun indikator ini perlu disesuaikan pada tahun yang akan datang karena sudah tidak sesuai dengan indikator terbaru. Untuk mengukur Derajat Kesehatan Masyarakat yaitu menggunakan Umur Harapan Hidup SP2020.**

Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator kinerja ini adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga.

#### Angka Harapan Hidup (AHH)

**Realisasi AHH pada Tahun 2024 yaitu 71,31** lebih kecil 0,04 dari target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, **jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023** realisasi AHH pada Tahun 2024 mengalami peningkatan 0,26. **Jika dibandingkan dengan target akhir RPD** sudah mencapai 99,04% dan **jika dibandingkan dengan realisasi di Provinsi Jawa Barat**, AHH Kabupaten Majalengka Tahun 2024 lebih kecil 2,76.

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2026 (Akhir RPD)	Realisasi Jawa Barat
71,35	71,31	71,05	72	74,07

**Faktor-faktor** yang mempengaruhi capaian indikator Angka Harapan Hidup di Kabupaten Majalengka dianalisis menggunakan beberapa pendekatan yaitu kualitas pelayanan kesehatan, dan perilaku hidup bersih dan sehat, lingkungan kesehatan, serta penyakit menular dan tidak menular.

#### 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Kualitas pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dapat dilihat melalui fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Sampai dengan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka memiliki 3 Rumah Sakit Umum





Daerah (RSUD), 1 Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan 32 Puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan. Dari 32 Puskesmas yang berada di Kabupaten Majalengka 26 Puskesmas mendapatkan status akreditasi Paripurna dan 6 Puskesmas lainnya berstatus akreditasi Utama. Dari 3 RSUD yang ada di Kabupaten Majalengka 2 RSUD mendapatkan akreditasi Paripurna yaitu RSUD Cideres dan RSUD Majalengka sedangkan 1 RSUD mendapatkan akreditasi Utama yaitu RSUD Talaga. Untuk Labkesda Kabupaten Majalengka telah mendapatkan akreditasi Paripurna. Akreditasi ini menjadi penting karena sebagai pengakuan terhadap fasilitas kesehatan sudah memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.



Gambar 3.1 Pelatihan SDM  
Sumber : Dinas Kesehatan

Selain akreditasi, sertifikasi pada Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) juga penting. Sertifikasi kompetensi SDM dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional (LSP) di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Pada Tahun 2024 telah diberikan pelatihan yang dapat menunjang kompetensi SDM seperti Pelatihan Pandu Penyakit Tidak Menular di 30 Puskesmas, Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada petugas sanitarian, Pelatihan *Ante Natal Care* kepada dokter umum serta pelatihan petugas imunisasi dan koordinator imunisasi.

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan promotif dan preventif. Untuk meningkatkan pelayanan di Puskesmas, pada Tahun 2024 telah didistribusikan alat kesehatan





ke 32 Puskesmas meliputi resusitasi set, *footstep*, *exam table*, *bed 2 crank manual*, *bed side cabinet*, kursi tunggu poned, *stretcher*, kursi roda puskesmas, *emergency trolley*. Pada Tahun 2024 juga sebanyak 7 ambulans telah didistribusikan ke Puskesmas Balida, Bantarujeg, Kasokandel, Kertajati, Leuwimunding, Panyingkiran dan Salagedang. Ada pula 9 Puskesmas Keliling (Pusling) roda 4 yang disebar ke Puskesmas Kasokandel, Kertajati, Salagedang, Sindang, Margajaya, Leuwimunding, Balida, Panyingkiran dan Lemahsugih. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga dilaksanakan melalui program Puskesmas Nganjang ka Imah yang merupakan pelayanan kesehatan dengan mengunjungi langsung ke rumah masyarakat yang memerlukan layanan keehatan. Puskesmas Nganjang ka Imah dilaksanakan di 32 puskesmas dengan jumlah penduduk yang di kunjungi sebanyak 138.253 KK.



Gambar 3.2 Penyerahan Puskesmas Keliling  
Sumber: Dinas Kesehatan

Pada saat ini RSUD Cideres dan RSUD Majalengka menjadi rumah sakit rujukan lintas kecamatan dan puskesmas yang ada di Kabupaten Majalengka. Kedua RSUD tersebut melaksanakan pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Pada Tahun 2024 jumlah kunjungan RSUD Cideres sebanyak 177.946 orang dengan rincian rawat jalan sebanyak 157.012 orang, rawat inap termasuk IGD sebanyak 20.934 orang.

Untuk menunjang pemberian layanan medis dan non medis yang berkualitas, pada Tahun 2024 telah dilakukan distribusi sarana prasarana dan alat kesehatan berupa *Meja Mayo*, *Instrument Trolley*,





*General Bone Instrument, IUD Instruments Set, Surgical Handpiece System, Wire Instrument Set, Laryngoscope Set, Probe Laryngoscope Set (Naso-Pharyngo-Laryngoscope Therapeutic), Probe Laryngoscope Set (Naso-Pharyngo-Laryngoscope Small), Vital Sign Monitor, Examination Bed, Radial Shockwave Therapy (RSWT), Arm Ergocycle, Leg Ergocycle, Vaccine Storage 75 L, Lemari instrument, Syringe Pump, Infusion Pump, Bed Gynek, Phototherapy, Suction Pump, Electrocardiograph ( EKG ) 12 Channels, CTG, Centrifuge High RPM, Roller mixer, Centrifuge, Automated Blood Culture and sterile body fluid, Water bath, Platelet Incubator, Refrigerator Storage 525 L, CRRT, Ventilator HFO, CPAP HFO, USG + Printer, Plasma Sterilizer.*

Pada Tahun 2024 jumlah kunjungan RSUD Majalengka sebanyak 146.675 orang dengan rincian rawat jalan sebanyak 101.497 orang, rawat inap sebanyak 21.188 orang dan IGD sebanyak 23.990 orang. Untuk menunjang pemberian layanan medis dan non medis yang berkualitas, pada Tahun 2024 telah dilakukan distribusi sarana prasarana dan alat kesehatan berupa tempat tidur 22 unit, *Infus Stand* 8 unit, *Trolley Medical* 18 unit, *Suction Pump* 1 unit, *Suction Pump* 3 unit, *Transfer Stretcher* 4 unit, *Operating Lamp* 2 unit, *Operating Table Electric* 2 unit, *ESWL* 1 unit, *EKG* 1 unit, *Infus Pump* 6 unit, *Patient Monitor* 5 unit, *Suction Pump* 2 unit, *USG* 1 unit, *Ventilator* 1 unit, *Endourology* 1 unit, *Mesin Reuse* 1 unit, *Transfer Stretcher* 3 unit.

RSUD Majalengka juga telah membuka pelayanan baru yaitu Pelayanan Urologi yang ditangani oleh dokter spesialis urologi yang tersertifikasi, alat modern dan melalui prosedur *Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy* (ESWL) yang merupakan tindakan non invasif untuk memecah batu pada ginjal atau saluran kemih.



Gambar 3.3 RSUD Talaga  
Sumber: Dinas Kesehatan



RSUD Talaga merupakan rumah sakit yang dibuka pada 14 Oktober 2023 dan sampai saat ini pelayanan masih difokuskan pada pelayanan rawat jalan. Pada Tahun 2024 jumlah kunjungan RSUD Talaga sebanyak 6.887 orang dengan rincian rawat jalan 2.757 orang, IGD 3.758 orang, Ponsek 97 orang dan rawat inap 275 orang. RSUD Talaga menyediakan layanan kesehatan berupa Poli Penyakit Dalam, Poli Bedah, Poli Anak, Poli Kebidanan dan Kandungan. Alat kesehatan yang terdistribusi pada Tahun 2024 antara lain *Meja Mayo, Instrument Trolley, General Bone Instrument, IUD Instruments Set, Surgical Handpiece System, Wire Instrument Set, Laryngoscope Set, Probe Laryngoscope Set (Naso-Pharyngo-Laryngoscope Therapeutic), Probe Laryngoscope Set (Naso-Pharyngo-Laryngoscope Small), Vital Sign Monitor, Examination Bed, Radial Shockwave Therapy (RSWT), Arm Ergocycle, Leg Ergocycle, Vaccine Storage 75 L, Lemari instrument, Syringe Pump, Infusion Pump, Bed Gynek, Phototherapy, Suction Pump, Electrocardiograph ( EKG ) 12 Channels, CTG, Centrifuge High RPM, Roller mixer, Centrifuge, Automated Blood Culture and sterile body fluid, Water bath, Platelet Incubator, Refrigerator Storage 525 L, CRRT, Ventilator HFO, CPAP HFO, USG + Printer, Plasma Sterilizer.*

## **2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur – jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Untuk meningkatkan PHBS di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan sosialisasi pengetahuan masyarakat tentang gaya hidup sehat. Sosialisasi ini dilaksanakan rutin setiap satu bulan sekali melalui program Bincang Sehat di Radio. Kemudian Sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial instagram Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas. Sosialisasi langsung ke masyarakat dilaksanakan 144 kali dalam gedung dan 96 kali di luar gedung, dilaksanakan oleh puskesmas yang ada di Kabupaten Majalengka. Sosialisasi ini memuat tema seputar gaya





hidup sehat, makanan bergizi seimbang dan manfaat memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.



Gambar 3.4 Sosialisasi Gaya Hidup Sehat Melalui Media Sosial

Sumber : Dinas Kesehatan

Selain itu olahraga merupakan salah satu upaya yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan berolahraga secara rutin dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Untuk menggugah partisipasi masyarakat dalam berolahraga, Pemerintah Kabupaten Majalengka berkolaborasi dengan berbagai pihak melaksanakan beberapa *event* olahraga seperti *Run for Fun 7KM* yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember Tahun 2024 di Kertajati, *KNPI Run 2024* yang dilaksanakan pada 8 September Tahun 2024, Turnamen Sepak Bola Buruh Industri Piala Bupati Majalengka Tahun 2024, *GGM Fest Majalengka* dalam rangka *Launching* GOR GGM Talaga Manggung Majalengka pada 8 Maret Tahun 2024.



Gambar 3.5 Peresmian GOR GGM Talaga Manggung  
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga





Pemerintah Kabupaten Majalengka juga telah menghimbau pada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan senam minimal setiap dua minggu satu kali pada Hari Jumat. Bahkan untuk instansi di level kelurahan boleh menyertakan masyarakat sekitar untuk ikut senam bersama.



Gambar 3.6 Senam Hari Jumat  
Sumber: Sekretariat Daerah

### 3. Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan merupakan suatu konsep terkait upaya dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia sehingga tercipta kondisi yang bersih, sehat, nyaman, aman dan terhindar dari berbagai penyakit. Salah satu upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengawasan terhadap faktor lingkungan yaitu dengan adanya sanitasi. Sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Majalengka telah memiliki 343. desa dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pemerintah Kabupaten Majalengka juga terus mengupayakan agar masyarakat dapat memahami pentingnya perilaku bersih dan sanitasi melalui sosialisasi terkait STBM. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh tim pembinaan kader STBM Dinas Kesehatan sekaligus pembinaan kepada 240 kader STBM yang tersebar di 12 wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Majalengka. Program pembinaan ini merupakan langkah penting dalam membangun budaya sehat yang mandiri di masyarakat. Kader STBM diharapkan menjadi pelopor dalam membangun 5 pilar STBM dengan pendekatan rumah tangga. 5 pilar tersebut meliputi perilaku stop buang air besar sembarangan, budaya cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, pengamanan makanan dan minuman rumah tangga, pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.





Gambar 3.7 Kegiatan Pembinaan Kader STBM  
Sumber : Dinas Kesehatan

#### 4. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Untuk mengendalikan penyakit menular dan tidak menular, Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan deteksi dini terhadap penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular yang dideteksi dini antara lain HIV/AIDS dan TB Paru. Jumlah kasus yang diduga/beresiko terjangkit penyakit menular yaitu terduga TB Paru sebanyak 17.893 orang dan beresiko HIV 26.602 orang dan beresiko AIDS 512 orang.

Kemudian untuk penyakit tidak menular yang dilakukan deteksi dini yaitu Hipertensi dan Diabetes Melitus. Jumlah penderita penyakit tersebut yaitu sebanyak 89.419 orang Hipertensi dan sebanyak 12.502 orang Diabetes Melitus.

Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang untuk meningkatkan derajat kesehatan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD secara inklusif serta meningkatkan jaminan kesehatan baik menggunakan BPJS atau menggunakan metode lainnya melibatkan gerakan fisik dan masyarakat secara kolektif;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memeriksakan diri ke layanan kesehatan (ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia sekolah dan lansia);
3. Meningkatkan kegiatan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular;



4. Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan terutama kompetensi pelayanan ke masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas Standar Pelayanan di setiap jenis pelayanan kesehatan agar masyarakat lebih nyaman dan pasti ketika mendapatkan pelayanan;
6. Meningkatkan kesehatan lingkungan dengan cara mengelola air minum dan makanan rumah tangga, mengelola sampah rumah tangga, mengelola air limbah rumah tangga dll (ODF);
7. Meningkatkan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat;
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga dengan cara campaign untuk ASN dan masyarakat pada umumnya;
9. Meningkatkan budaya berolahraga dengan diadakan event-event seperti CFD, *Fun Run*, pekan olahraga dan perlombaan lainnya.

Ada **beberapa program** yang mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup yaitu:

Tabel 3.4 Program yang Mendukung IKU 3

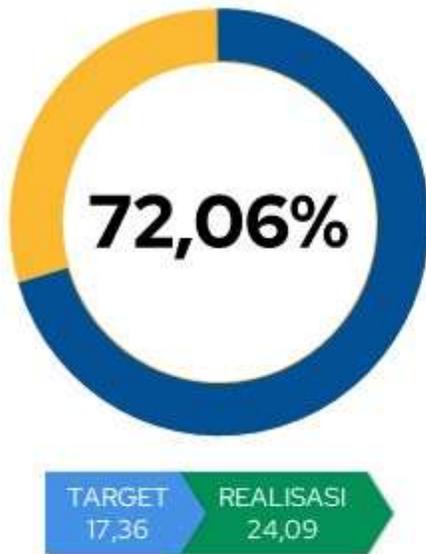
No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	117.185.733.908	115.285.515.938
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	14.308.984.900	13.837.340.605

**Efisiensi** anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Angka Harapan Hidup pada sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan tidak ada karena IKU hanya mencapai 99,94%.



## MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN

### CAPAIAN 2024



### PERBANDINGAN DENGAN



### FAKTOR

Yang mempengaruhi

- ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada fasilitas Kesehatan
- ❖ Meningkatnya Akses Pelayanan Gizi
- ❖ Meningkatnya Asupan Gizi pada Sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
- ❖ Meningkatnya Asupan Gizi Anak Balita dan Remaja Putri
- ❖ Meningkatnya Infrastruktur Air Minum
- ❖ Meningkatnya Kualitas Pengolahan Air Limbah
- ❖ Meningkatnya Kesehatan Lingkungan
- ❖ Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan Desa
- ❖ Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi Pemerlu
- ❖ Pelayanan Kesehatan (PPKS)

### PROGRAM

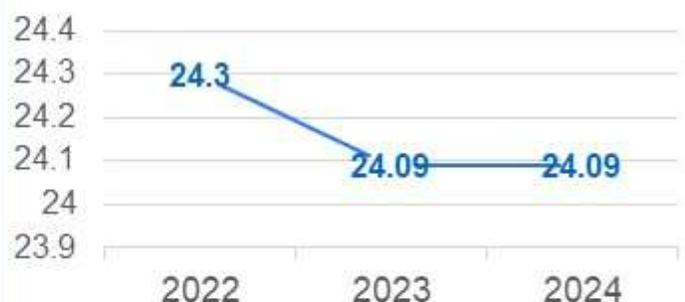
Yang mendukung

- ❖ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- ❖ Program Pengelolaan Pendidikan
- ❖ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- ❖ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- ❖ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- ❖ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- ❖ Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- ❖ Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- ❖ Program Informasi dan Komunikasi Publik

### EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja indikator ini tidak ada dikarenakan capaian IKU hanya 72,06%

### PREVALENSI STUNTING





### SASARAN 3

#### MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN

Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat diukur dengan dua indikator yaitu Angka Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting. Prevalensi Stunting merupakan persentase jumlah balita pendek dari keseluruhan balita yang diukur. Berdasarkan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dimaksud dengan Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan. Stunting juga bisa tergambar dari kondisi di mana pertumbuhan fisik dan perkembangan tubuh seorang anak terhambat atau terhenti sebagai akibat dari kurang gizi, kurangnya asupan nutrisi yang memadai, dan/atau kondisi lingkungan yang tidak sehat selama masa pertumbuhan awal mereka, terutama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator kinerja ini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

#### **Prevalensi Stunting**

Prevalensi *Stunting* Kabupaten Majalengka Tahun 2024 masih mengacu pada data hasil SKI (Survei Kesehatan Indonesia) Tahun 2023 dikarenakan data hasil SKI Tahun 2024 belum dirilis. Pada Tahun 2023 realisasi Prevalensi *Stunting* yaitu sebesar 24,09, sedangkan target Tahun 2024 sebesar 17,36. Sehingga capaian Prevalensi *Stunting* Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yaitu 72.06% dan **belum dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2023**. Sebagaimana data pada Tahun 2024, dari jumlah balita yang ditimbang sebanyak 79.039 balita, terdapat 2.459 balita yang mengalami *stunting*.

Jika dibandingkan dengan **Pemerintah Provinsi Jawa Barat** Prevalensi *Stunting* Kabupaten Majalengka 23,87 lebih tinggi dari Prevalensi





*Stunting* Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 21,70. Realisasi Prevalensi *Stunting* jika **dibandingkan dengan target akhir RPD** baru mencapai 82,32% dari target sebesar 19,83.

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2026 (Akhir RPD)	Realisasi Jawa Barat
17,36	24,09*	24,09	19,83	21,70

Kenaikan berat badan sesuai standar usianya terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi fokus utama. Berat badan anak merupakan prediktor berat badan anak menurut umur. Sejak anak terpapar masalah gizi atau kesehatan maka proses menuju stunting sudah dimulai. Pada saat terjadi kenaikan berat badan yang tidak sesuai dengan seharusnya (*faltering growth*) dan jika tidak ditangani akan menyebabkan BB/U turun dan berlanjut menjadi kurus dan gizi buruk BB/TB turun akhirnya menjadi stunting (TB/U). Meskipun capaian Tahun 2024 belum mencapai 100% atau Prevalensi Stunting di Kabupaten Majalengka masih cukup tinggi, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan intervensi sensitif dan intervensi spesifik yang dilaksanakan oleh semua unsur terkait.

Adapun **intervensi spesifik** yang telah dilakukan diantaranya:

1. Penerbitan SE percepatan penurunan stunting melalui Gerakan Bersama Majalengka New Stunting 2024.
2. Aksi bergizi dan gerakan literasi stunting, imunisasi, penimbangan dan pengukuran.
3. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir.
4. Promosi dan konseling menyusui kepada ibu bayi, sehingga bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
5. Bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ekstra protein hewani berbahan pangan lokal bagi balita bermasalah gizi dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK).
6. Pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil dan remaja putri, serta skrining anemia kepada remaja putri yang melibatkan pihak sekolah.
7. Melakukan penguatan tatalaksana gizi buruk dengan penanganan balita gizi buruk.





Adapun **intervensi sensitif** yang telah dilakukan diantaranya:

1. Pendampingan kepada keluarga beresiko stunting, balita stunting, calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS).
2. Pengumpulan dan pemantauan data stunting (profiling data stunting).
3. Pemberian sarana BKB Kit Stunting kepada Bina Keluarga Balita (BKB).
4. Pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat yang terindikasi masalah gizi.
5. Melakukan Workshop penurunan Prevalensi Stunting yang terdiri dari perwakilan Himpaudi, Ikatan Guru TK, Istri pemilik PAUD dan Dikmas.
6. Pelayanan KB pasca persalinan.
7. Gerakan pencegahan dan promosi kesehatan.
8. Peningkatan kapasitas petugas dan kader dalam pemantauan pertumbuhan.
9. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan, dan pembangunan toilet dan tangki septik sesuai standar.
10. Verifikasi status Desa ODF (*Open Defecation Free*) .
11. Pemberian bantuan Perbaikan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) kepada Kelompok Wanita Tani (KWT).
12. Fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu Model.
13. Penyaluran bantuan perlindungan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan prevalensi stunting yaitu:

### **1. Meningkatkan Akses Pelayanan Gizi**

Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan gizi, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan Intervensi spesifik diantaranya:

- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada ibu bersalin, sebanyak 5.571 ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar.
- Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sebanyak 5.242 bayi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar.



Adapun **intervensi sensitif** yang telah dilakukan diantaranya:

- Peningkatan pelayanan KB pasca persalinan sebanyak 16.436 peserta KB. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan tim pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE pascapersalinan, memastikan ibu pasca bersalin sudah menggunakan KB dan memastikan tidak terjadi komplikasi pasca nifas.
- Melakukan pencegahan dan promosi kesehatan kepada 369.151 warga, termasuk pengecekan kesehatan yang terdiri dari cek tekanan darah, gula darah dan kolesterol yang dilaksanakan di Posbindu.



Gambar 3.1 Kegiatan Posbindu

Sumber : Dinas Kesehatan

- Pemberian Jaminan Kesehatan bagi masyarakat terindikasi masalah gizi sebanyak 180.759.

## 2. **Meningkatnya Asupan Gizi pada Sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)**

Dalam rangka meningkatkan asupan gizi pada sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan intervensi spesifik diantaranya:

- Pemberian Tablet Tambah Darah kepada ibu hamil sebanyak 20.124.
- Pelaksanaan kelas ibu hamil dan balita, program ini memberikan edukasi dan dukungan gizi kepada ibu hamil dan orang tua balita guna memastikan pertumbuhan anak yang optimal. Selain itu,





dalam program dilakukan pengecekan kesehatan kepada ibu hamil yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini sebanyak 4.288.



Gambar 3.2 Kelas Ibu Hamil dan Balita  
Sumber : Sekretariat Daerah

- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mendukung produk lokal. Program ini menyediakan makanan sehat bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan bahan pangan dari daerah setempat. Melalui program ini, sudah terdistribusikan PMT untuk ibu hamil dan balita sebanyak 834.036 paket. Selama Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan PMT kepada ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) sebanyak 949 dan PMT kepada 447 balita. Dalam pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Majalengka berkolaborasi dengan mahasiswa KKN Universitas Pasundan untuk melaksanakan kegiatan bhakti sosial memberikan tambahan makan untuk balita.



Gambar 3.3 Pemberian PMT  
Sumber : Sekretariat Daerah

- Melakukan promosi dan konseling menyusui kepada ibu bayi, sehingga bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif sebanyak 15.646 bayi.
- Memberikan MP-ASI kaya protein hewani kepada bayi dua tahun sebanyak 2.858 baduta.





### 3. Meningkatnya Asupan Gizi Anak Balita dan Remaja Putri

Dalam rangka meningkatkan asupan gizi anak balita dan remaja putri, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan Dinas Pendidikan telah melaksanakan intervensi spesifik diantaranya:

- Pemberian tablet Tambah Darah kepada remaja putri sebanyak 48.060.
- Melakukan skrining anemia kepada remaja putri sebanyak 20.717.
- Melakukan penguatan Tatalaksana Gizi Buruk dengan penanganan balita gizi buruk sebanyak 51 balita.
- Melakukan supervisi layanan KIA dan gizi serta pengelolaan posyandu. Langkah ini memastikan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pemantauan gizi yang optimal di posyandu. Dengan pendekatan ini, pemerintah kabupaten Majalengka berupaya meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan anak secara menyeluruh. Adapun jumlah balita yang ditimbang selama tahun 2024 yaitu sebanyak 79.039.



Gambar 3.4 Kegiatan Posyandu  
Sumber : Sekretariat Daerah

Adapun intervensi sensitif yang telah dilakukan diantaranya:

- Melaksanakan Workshop penurunan stunting yang dihadiri oleh 300 orang dari perwakilan Himpaudi, Ikatan Guru TK, Istri pemilik PAUD dan Dikmas, serta dari kecamatan dan desa. Edukasi kepada wali murid PAUD agar anak-anak di Kabupaten Majalengka diberikan makanan dengan gizi seimbang dan bisa memberikan pembinaan kepada masyarakat yang ada di lokus stunting.



Gambar 3.5 *Workshop* Penurunan Stunting  
Sumber : Dinas Pendidikan

- Memberikan pelayanan pemeriksaan pada calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 7.906 catin. Hal ini bertujuan untuk mengetahui faktor resiko *stunting*, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko *stunting* dalam upaya menghilangkan faktor tersebut.
- Melakukan pendampingan calon pengantin keluarga berisiko *stunting* dan balita *stunting* sebanyak 1.006 tim pendamping yang terdiri dari 3 orang/tim tersebar di Desa dan Kelurahan di Kabupaten Majalengka dan terdiri dari kader KB, PKK dan Bidan Desa.
- Melakukan Pendampingan keluarga berisiko *stunting* sebanyak 34.669 Kepala Keluarga yang dilakukan oleh tim yang telah dibentuk sebanyak 3.018 orang. Pendampingan keluarga berisiko *stunting* dilakukan dengan fokus pada masa inkubasi *stunting*, mengingat potensi tertinggi terjadinya *stunting* pada keluarga berisiko *stunting* ada pada masa inkubasi. Pada masa inkubasi, sasaran perlu difasilitasi untuk memperoleh akses terhadap makanan bergizi, asupan vitamin dan mineral, mengonsumsi keragaman pangan dan sumber protein hewani, layanan kesehatan, sanitasi dan air bersih. Intervensi pendampingan lebih difokuskan kepada calon pengantin /calon PUS, ibu hamil, pasca persalinan serta baduta dan balita .
- Melakukan pengumpulan dan pemantauan Data Stunting (*profiling data stunting*) oleh 3.018 pendamping yang tersebar di seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Majalengka.





- Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan kelompok melalui pemberian sarana BKB Kit Stunting kepada 25 kelompok BKB (Bina Keluarga Balita).

#### 4. **Meningkatnya Infrastruktur Air Minum**

Infrastruktur air minum merupakan sarana penting bagi masyarakat karena dapat meningkatkan kualitas hidup manusia yang mana infrastruktur air minum berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat. Dalam aspek kesehatan, hal ini memiliki korelasi terhadap asupan gizi dan memiliki pengaruh terhadap penurunan prevalensi stunting.

Dalam rangka meningkatkan infrastruktur air minum, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, pada tahun 2024 telah membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan sebanyak 1.400 sambungan rumah tangga/kepala keluarga yang tersebar di 18 Desa Kabupaten Majalengka. Terdapat permohonan infrastruktur air minum dari masyarakat melalui usulan musrenbang, ajuan proposal dari desa dan aspirasi dari pokok pikiran dewan dengan total permohonan yang masuk pada tahun 2024 sebanyak 25 usulan. Akan tetapi yang dapat diakomodir hanya 18 usulan berdasarkan skala prioritas. Terdapat 7 usulan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena keterbatasan anggaran dan tidak memenuhi kriteria program.



Gambar 3.6 SPAM Jaringan Perpipaan  
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

#### 5. **Meningkatnya Kualitas Pengolahan Air Limbah**

Pengolahan air limbah adalah sebuah proses yang bertujuan untuk membuang kontaminan dan air limbah dan mengubah air tersebut menjadi air bersih yang dapat dikembalikan ke siklus air.

**Pengolahan air limbah sangat penting** untuk menjaga kesehatan masyarakat, lingkungan, dan menjaga kualitas sumber daya air yang





terbatas. Tanpa pengolahan yang tepat, air limbah dapat mencemari sungai, danau, dan lautan, mengancam makhluk hidup di sekitarnya. Selain itu, air limbah yang tidak diolah juga dapat mencemari **sumber air tanah**, yang sering digunakan sebagai sumber air minum.



Gambar 3.7 Tangki Septik Individu

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengolahan air limbah, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah membangun toilet dan tangki septik sesuai dengan standar sebanyak 220 rumah yang tersebar di Blok Palasari Desa Sukasari Kidul Kec. Argapura, Blok Mekarsari Desa Sukasari Kidul Kec. Argapura, Desa Cibunut Kec. Argapura, Desa Cipinang Kec. Rajagaluh, Desa Panjalin Lor Kec. Sumberjaya dan Desa Sumberjaya Kec. Sumberjaya, dan fasilitasi bantuan sarana MCK sebanyak 183 KK. Terdapat permohonan pengolahan air limbah dari masyarakat melalui usulan musrenbang, ajuan proposal dari desa dan aspirasi dari pokok pikiran dewan dengan total permohonan yang masuk pada tahun 2024 sebanyak 17 usulan. Akan tetapi yang dapat di akomodir hanya 7 usulan berdasarkan skala prioritas. Terdapat 10 usulan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena keterbatasan anggaran dan ketidaktersediaan lahan dari pemohon.

## 6. Meningkatnya Kesehatan Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Kesehatan telah melakukan peningkatan kesehatan lingkungan dengan melakukan verifikasi status Desa ODF (*Open Defecation Free*) sebanyak 330 desa dan 13 kelurahan. Desa ODF (*Open Defecation Free*) adalah desa yang seluruh warganya telah berhenti melakukan buang air besar sembarangan (BABS) dan memiliki akses ke jamban sehat. Status ini





sangat penting karena berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kualitas hidup.



Gambar 3.8 Verifikasi ODF  
Sumber: Dinas Kesehatan

Verifikasi ODF adalah proses memastikan status ODF suatu komunitas masyarakat yang menyatakan bahwa secara kolektif mereka telah terbebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (Bebas ODF). Verifikasi ini dilakukan oleh tim dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit berbasis sanitasi. Selain jamban sehat, tim juga menilai kebersihan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, saluran drainase, serta ketersediaan tempat cuci tangan dengan sabun di rumah tangga dan fasilitas umum.

Pemerintah Kabupaten Majalengka menjadi salah satu dari enam Kabupaten Kota di Jawa Barat yang mendapatkan penghargaan *Open Defecation Free* (ODF) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atas keberhasilannya menjadi wilayah bebas dari perilaku bebas buang air besar sembarangan pada Tahun 2024. Dengan diraihnya ODF menunjukkan komitmen dari seluruh pihak untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Majalengka.





Gambar 3.9 Pemberian penghargaan ODF  
Sumber : Sekretariat Daerah

Selain Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan ikut andil dalam mempengaruhi peningkatan kesehatan lingkungan, yaitu dengan memberikan bantuan Perbaikan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) kepada 10 kelompok.

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) berupa pengadaan benih tanaman, media tanam, peralatan pertanaman, peralatan pengairan, dan kebutuhan pasca panen, yang dilaksanakan di beberapa lokasi diantaranya Kelompok Wanita Tani (KWT) Manggis Jaya Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg, KWT Mandiri Raharja Desa Garawangi Kecamatan Sumberjaya, KWT Dayang Sumbi Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka, KWT Jaha Motekar Desa Pajajar Kecamatan Rajagaluh, KWT Ciawi Sangraja Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong, KWT Hijau Daun Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga, KWT Sugih Mukti Desa Randegan Wetan Kecamatan Jatitujuh, KWT Dahlia Maju Desa Pinangraja Kecamatan Jatiwangi, KWT Rahayu Desa Babakansari Kecamatan Bantarujeg, dan KWT Putri Suji Raharja Desa Pancaksuji Kecamatan Sumberjaya.





Gambar 3.10 Kegiatan P2L oleh Kelompok Wanita Tani  
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

### **7. Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa**

Dalam rangka meningkatkan keberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu Model yang dibangun sebanyak 10 unit yang tersebar di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran, Desa Kareo Kecamatan Banjaran, Desa Kertajati Kecamatan Kertajati, Desa Mekarhurip Kecamatan Talaga, Desa Tarikolot Kecamatan Palasah, Desa Garawastu Kecamatan Sindang, Desa Putri Dalem Kecamatan Jatitujuh, Desa Salawangi Kecamatan Bantarujeg, Desa Enggalwangi Kecamatan Palasah, Desa Sidamukti Kecamatan Majalengka. Posyandu Model merupakan kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan menggunakan sistem 5 meja, dengan kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), imunisasi, peningkatan gizi, penanggulangan diare dan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dengan mengembangkan minimal satu program pilihan dan integrasikan dengan minimal satu kelompok kegiatan.



Gambar 3.11 Pembangunan Posyandu Model  
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa





## 8. Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kemiskinan merupakan faktor yang sangat berdampak terhadap munculnya resiko *stunting* pada keluarga. Dengan asumsi tersebut maka pendampingan keluarga beresiko *stunting* juga dalam rangka memberikan fasilitasi akses bantuan sosial.



Gambar 3.12 Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial  
Sumber : Dinas Sosial

Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Sosial telah melakukan upaya peningkatan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui kegiatan penyaluran bantuan perlindungan sosial. Bantuan perlindungan sosial adalah bantuan yang diberikan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial, bantuan ini dapat berupa bantuan sosial, jaminan sosial, dan program pemerintah lainnya. Untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat, Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan perlindungan sosial bagi Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 64.065 KPM dan Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 151.099 RTS.

**Upaya yang dapat dilakukan** untuk memaksimalkan kinerja penurunan prevalensi *stunting* di tahun mendatang yaitu:

1. Memaksimalkan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dan meningkatkan upaya promosi kesehatan.
2. Gencar melakukan sosialisasi gizi seimbang berbahan pangan lokal, sehingga masyarakat terdorong untuk turut serta dalam mengidentifikasi resiko *stunting*.
3. Penguatan pencegahan anemia pada remaja putri dengan rutin melakukan pemberian tablet tambah darah yang melibatkan pihak sekolah.





4. Memberikan pelatihan tumbuh kembang bagi kader sampai tingkat Desa sehingga pencatatan dan pelaporan mendapatkan data yang akurat dan akuntabel.
5. Melakukan *sweeping* atau kunjungan rumah segera setelah kegiatan penimbangan dan ditemukan balita yang terindikasi masalah gizi.
6. Mengidentifikasi Data Bayi Stunting melalui aplikasi yang bisa dicek secara *real time (by name)* kolaborasi dengan kader Posyandu untuk *updating data*, data yang disajikan tidak hanya jumlah balita stunting tapi terpadu mulai dari menikah, mengandung, s/d 1.000 HPK agar jelas intervensi programnya.
7. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal bagi balita dan ibu hamil sesuai prioritas agar tepat sasaran.
8. Memastikan ketersediaan air bersih dan memaksimalkan akses terhadap layanan air bersih melalui optimalisasi pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan khususnya di kawasan perdesaan.
9. Memaksimalkan pemeliharaan dan pemantauan MCK dan tangki septik sehingga dapat terus digunakan secara efektif oleh masyarakat.
10. Mengefektifkan pemberian perlindungan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai agar lebih tepat sasaran kepada keluarga beresiko stunting termasuk di dalamnya yang terdapat ibu hamil dan balita terindikasi masalah gizi. Dan memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan benar.
11. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu untuk percepatan penurunan *stunting*, melalui aplikasi yang bisa dipantau secara *real time (by name)* bisa berkolaborasi dengan kader posyandu untuk *updating data*, sehingga data tidak hanya jumlah balita stunting tapi terpadu mulai dari menikah, mengandung, s/d 1000 HPK.
12. Melakukan pemeriksaan dan *screening* mandiri untuk memastikan calon pengantin dalam kondisi sehat, yang meliputi pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar lengan dan kadar hemoglobin darah 3 bulan sebelum pernikahan. Hasil dari pemeriksaan dan *screening* mandiri tersebut kemudian akan





diberikan sertifikat rekomendasi perbaikan status kesehatan calon pengantin, yang kemudian akan diverifikasi kembali satu bulan sebelum pernikahan melalui pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Puskesmas (sebagai salah satu syarat pernikahan). Dan Bagi calon pengantin/calon PUS yang mengalami anemia harus difasilitasi untuk mengonsumsi TTD.

13. Mengoptimalkan kunjungan penyuluh KB kepada Ibu bersalin untuk mensosialisasikan program KB pascapersalinan, mengingat kehamilan dengan jarak yang sangat dekat mempunyai potensi 2 kali lebih besar resiko terjadinya *stunting*. Anggaran harus diprioritaskan dan Monev secara berkala oleh Tim Penanganan Stunting.

**Program-program** yang mendukung Penurunan Prevalensi Stunting yaitu:

Tabel 3.5 Program yang Mendukung IKU 4

No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	117.185.733.908	115.285.515.938
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	559.430.392.467	543.041.374.111
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.499.477.000	12.648.357.000
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.413.324.000	3.404.734.000
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	3.960.882.900	3.947.534.500





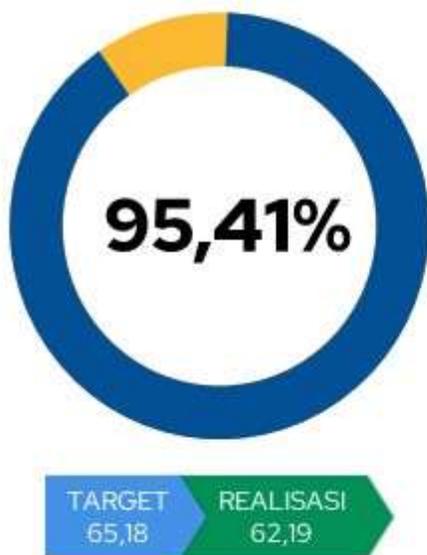
No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
6.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	185.000.000	178.333.500
7.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.884.076.657	3.874.190.300
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, Anak dan Keluarga Berencana	6.657.000.000	6.657.000.000
9.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.006.777.500	2.006.022.969

**Efisiensi** anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Prevalensi Stunting pada sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan tidak ada karena IKU hanya mencapai 72,06%.



**MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DAERAH DAN RUANG WILAYAH YANG BERKELANJUTAN**

**CAPAIAN 2024**



**PERBANDINGAN DENGAN**



**FAKTOR**

Yang mempengaruhi

- ❖ Kemantapan Jalan
- ❖ Ketersediaan air irigasi
- ❖ Penataan Ruang sesuai ketentuan
- ❖ Gedung laik fungsi
- ❖ Peningkatan Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan
- ❖ Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

**PROGRAM**

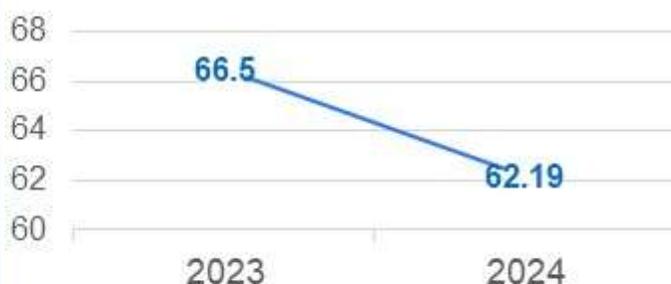
Yang mendukung

- ❖ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- ❖ Program Penyelenggaraan Jalan
- ❖ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- ❖ Program Penataan Bangunan Gedung
- ❖ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- ❖ Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- ❖ Program Kawasan Permukiman
- ❖ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- ❖ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- ❖ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- ❖ Program Penyelenggaraan Jalan

**EFISIENSI ANGGARAN**

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja indikator ini tidak ada dikarenakan capaian IKU hanya **95,41%**

TINGKAT KUALITAS INFRASTRUKTUR DAERAH DAN RUANG WILAYAH





#### **SASARAN 4:**

### **MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DAERAH DAN RUANG WILAYAH YANG BERKELANJUTAN**

Sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan diukur dengan Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah, indikator ini menggambarkan sejauh mana fasilitas pendukung (infrastruktur) dan perencanaan penggunaan lahan (ruang wilayah) di suatu daerah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi serta menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial. Formulasi dari indikator ini adalah menjumlahkan persentase Jalan dalam kondisi mantap + Persentase Debit Air Termanfaatkan + Persentase Gedung yang Memiliki SLF + Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang dibagi 4. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

#### **Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah**

Pada Tahun 2024 Tingkat kualitas infrastruktur dan ruang wilayah di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023 Tingkat kualitas infrastruktur dan ruang wilayah di Kabupaten Majalengka sebesar 66,50% sedangkan di Tahun 2024 sebesar 62,19%, hal ini menunjukkan adanya penurunan kualitas infrastruktur sebesar 2,31% capaian kinerja Tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 3,79% terlihat dari capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 96,21% dan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 100%.

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan target di Tahun 2024 sebesar 65,18, namun kinerja pada tahun tersebut belum mampu mencapai target karena hanya bisa merealisasikan di angka 62,19% sehingga capaian pada Tahun 2024 hanya sebesar 95,41%

Target akhir RPD pada Tahun 2026 adalah 68,49 sehingga perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan target akhir RPD baru mencapai 90,80%, hal ini perlu menjadi perhatian khusus dalam perbaikan infrastruktur di Kabupaten Majalengka. Apabila kami analisis indikator yang ada saat ini





perlu direviu kembali untuk diubah formulasi perhitungannya karena kurang spesifik dan measurable terhadap sasaran strategis yang sudah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama yang digunakan oleh Gubernur maupun Dinas Bina Marga dan Tata Ruang di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak sama dengan indikator yang digunakan di Kabupaten Majalengka sehingga Realisasi Tahun 2024 tidak bisa dibandingkan baik itu dengan se Wilayah 3 Cirebon, Provinsi Jawa Barat maupun dengan Nasional.

Adapun beberapa faktor yang memengaruhi target Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah belum dapat tercapai di Tahun 2024, yaitu:

### **1. Kemantapan Jalan**

Pada Tahun 2024 jalan mantap di Kabupaten Majalengka hanya terealisasi sebesar 86,19% atau sepanjang 555,03 km dari total Panjang jalan di Kabupaten Majalengka 915,02 km. Hal ini membuat capaian kinerja hanya 96,30% dikarenakan target yang sudah ditetapkan di Tahun 2024 adalah 89,50%. Ada beberapa hal yang membuat tidak tercapainya target di Tahun 2024 yaitu:

- a. Keterbatasan anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan jalan menjadi kendala dalam penanganan jalan yang mengakibatkan prioritas perbaikan jalan hanya bisa dilakukan pada beberapa ruas jalan saja dan tidak mencukupi kebutuhan ideal pemeliharaan jalan;
- b. Minimnya kegiatan pemeliharaan rutin seperti tambal sulam dan overlay jalan menyebabkan adanya jalan dengan Tingkat kerusakan ringan yang berkembang menjadi lebih rusak;
- c. Pada ruas jalan di daerah Majalengka Selatan sering terjadi bencana longsor dan banjir yang secara teknis akan mempercepat kerusakan jalan, selain itu curah hujan tinggi diatas normal seringkali menyebabkan aspal mudah terkelupas dan meningkatkan kerusakan lapisan permukaan jalan;
- d. Meningkatnya volume kendaraan berat akibat bertambahnya Kawasan industri dan aktivitas tambang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja mengingat tidak semua jalan kabupaten





yang ada saat ini dirancang untuk kendaraan bertonase berat sehingga membuat infrastruktur jalan menjadi cepat rusak.

Meskipun target jalan mantap tidak tercapai di Tahun 2024, ada beberapa cara yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka, diantaranya:



Gambar 3.1 Pengawasan Kontraktual  
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- a. Menyusun rencana kebijakan dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang bertujuan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan berjalan secara optimal, sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah serta standar teknis yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyusun 218 dokumen perencanaan jalan dan jembatan serta melaksanakan pengawasan kegiatan kontraktual di 5 Lokasi.
- b. Pemeliharaan Berkala Jalan adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terencana dan periodik untuk menjaga kondisi jalan agar tetap dalam keadaan mantap dan memperpanjang umur layanan jalan tersebut. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan pemeliharaan berkala jalan di 175 titik lokasi sepanjang 76,82 Km.



- c. Rehabilitasi jalan adalah proses perbaikan dan pemulihan kondisi jalan yang mengalami kerusakan agar dapat kembali berfungsi optimal sesuai standar teknis yang berlaku. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan Rehabilitasi Jalan di 9 titik lokasi sepanjang 28,58 Km.



Gambar 3.2 Rehabilitasi Jalan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- d. Salah satu inovasi yang telah pada Tahun 2024 adalah dibentuknya TIM UNIT REAKSI CEPAT TAMBAL JALAN (URC) yang dilaksanakan oleh 7 UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang. Tim ini bertugas melakukan penanganan darurat jalan yang dilaporkan oleh masyarakat secara langsung. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan pemeliharaan darurat jalan berdasarkan laporan masyarakat pada 649 titik lokasi di 70 ruas jalan. Kegiatan ini juga meliputi perawatan jalan yang dilakukan secara rutin (harian) oleh para Pemelihara Rutin jalan meliputi pembersihan bahu jalan dan pemeliharaan ringan untuk menjaga kondisi jalan agar tetap ada dalam keadaan baik, aman, dan nyaman bagi pengguna.



Gambar 3.3 Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



- e. Rehabilitasi Jembatan adalah serangkaian kegiatan perbaikan dan pemulihan struktur jembatan yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi untuk memastikan keamanan, kekuatan, dan kelayakan jembatan dalam mendukung lalu lintas. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan Rehabilitasi Jembatan di 34 titik Lokasi.

Upaya yang perlu dilakukan dimasa mendatang agar kondisi jalan di Kabupaten Majalengka terus meningkat adalah:

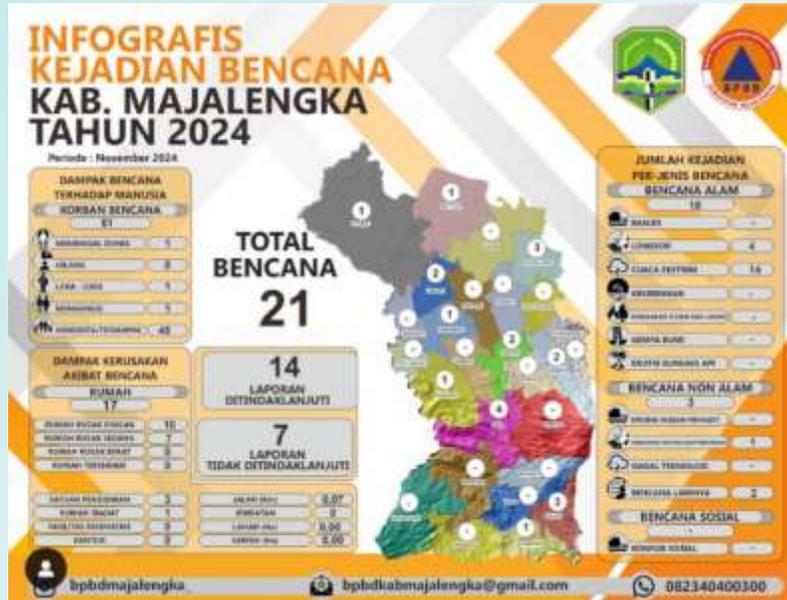
- a. Membuat perencanaan dan identifikasi yang lebih mendetail terkait prioritas kondisi jalan yang termutakhir sehingga kegiatan pemeliharaan jalan secara berkala, rehabilitasi jalan, rehabilitasi jembatan dan penanganan darurat jalan dapat lebih berdampak kepada masyarakat;
- b. Membuka jalur-jalur jalan baru untuk mempermudah dan mempercepat mobilitas masyarakat;
- c. Membuat Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan yang lebih luas ke kecamatan-kecamatan sehingga pengaduan jalan rusak baik itu di media sosial atau melalui *call center* bisa ditindaklanjuti dengan cepat.

## **2. Ketersediaan air irigasi**

Sama halnya dengan kemantapan jalan, Kinerja ketersediaan air irigasi tidak mencapai targetnya dikarenakan realisasinya hanya 83,78% atau 43.665 debit per detik sedangkan target yang ditetapkan di Tahun 2024 sebesar 85% atau 44.301 debit per detik sehingga capaian kinerja pada Tahun 2024 hanya 98,56%. Ada beberapa hal yang membuat tidak tercapainya target di Tahun 2024 yaitu:

- a. Terjadinya kebocoran pada saluran primer dan sekunder irigasi dan belum tertangani.
- b. Penurunan kapasitas daya tampung pada situ, embung, dan rawa dikarenakan adanya kebocoran.
- c. Terjadi sedimentasi pada sungai dan saluran irigasi yang membuat terhambatnya debit air serta bencana longsor pada Daerah Aliran Sungai yang menyebabkan rusaknya saluran irigasi.





Gambar 3.4 Kejadian Bencana Periode November  
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Meskipun target ketersediaan air irigasi tidak tercapai di Tahun 2024, ada beberapa cara yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka, diantaranya:

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan yang merupakan kegiatan perbaikan dan pemulihan fungsi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan atau penurunan kondisi agar sistem irigasi dapat berfungsi secara optimal dalam mendistribusikan air ke lahan pertanian. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di 247 titik Lokasi;



Gambar 3.5 Pemeliharaan Jaringan Irigasi  
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang





- b. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi permukaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan sistem irigasi berfungsi optimal dalam mendistribusikan air ke lahan pertanian secara efisien, merata, dan berkelanjutan. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan sebanyak 387 Daerah Irigasi;



Gambar 3.6 Penataan Sumber Mata Air

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- c. Pembangunan Infrastruktur untuk melindungi mata air adalah serangkaian kegiatan konstruksi dan konservasi lingkungan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber mata air, mengamankan kualitas dan kuantitas air, serta mencegah degradasi lingkungan di sekitar sumber air. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan kegiatan penataan sumber mata air di 3 titik lokasi.
- d. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya adalah serangkaian kegiatan perbaikan, pemulihan, dan peningkatan fungsi embung yang mengalami kerusakan atau penurunan kapasitas agar dapat kembali optimal dalam menampung, mengelola, dan mendistribusikan air. Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan kegiatan Rehabilitasi Embung di 4 titik lokasi.
- e. Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku adalah kegiatan pengeboran dan pembangunan konstruksi sumur dalam atau dangkal yang bertujuan untuk memperoleh sumber air tanah yang dapat digunakan sebagai air baku, baik untuk kebutuhan domestik, pertanian, industri, maupun penyediaan air bersih masyarakat. Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 telah melaksanakan pembangunan sumur bor untuk pertanian sebanyak 6 titik di 3 lokasi.





Upaya yang harus dilakukan dimasa yang akan datang untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi adalah:

- a. Meningkatkan penanganan saluran irigasi, situ, rawa dan embung;
- b. Melakukan normalisasi jaringan irigasi;
- c. Memetakan skala prioritas dan melakukan penambahan embung atau penampungan air lainnya untuk mengairi sawah, kebun, atau lahan pertanian, terutama di musim kemarau serta bisa dibangun di daerah rawan banjir.

### 3. Penataan Ruang sesuai ketentuan

Kinerja penataan ruang di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 tidak mencapai target dikarenakan realisasinya hanya 77,80% dari kesesuaian pola ruang 53,40%, kesesuaian struktur ruang 80% dan Kawasan strategis kabupaten 100% sedangkan target yang ditetapkan di Tahun 2024 sebesar 85,56% sehingga capaian kinerja pada Tahun 2024 hanya 90,93%.



Gambar 3.7 Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Majalengka

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Ada beberapa hal yang membuat tidak tercapainya target di Tahun 2024 yaitu:

- a. Proses penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum selesai dikarenakan masih pada tahap perbaikan evaluasi awal Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya dilaksanakan pembahasan di Provinsi (syarat administrasi sudah lengkap dan sudah pada tahap pra-validasi) sebelum dilakukan persetujuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait materi teknis



- dalam dokumen RTRW. Persetujuan ini penting untuk memastikan keselarasan kebijakan nasional dan regional;
- b. Keterbatasan SDM dan anggaran dalam pengawasan penataan ruang.

Meskipun belum mencapai target kinerja di Tahun 2024, namun Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan pemetaan unsur toponimi atau penamaan tempat yang mencerminkan sejarah, budaya lokal dan aktivitas masyarakat yang berkembang di wilayah utara Majalengka (Kecamatan Ligung dan Kecamatan Sumberjaya) serta melakukan pemetaan tutupan lahan untuk mengetahui perkembangan wilayah perkotaan menggunakan hasil interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT).



Gambar 3.8 Pemetaan Tutupan Lahan  
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Upaya yang harus dilakukan dimasa yang akan datang untuk meningkatkan penataan ruang yang sesuai ketentuan adalah:

- a. Melakukan percepatan revisi RTRW sesuai ketentuan dan kondisi perkembangan wilayah Majalengka;
- b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan investor tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan tata ruang;
- c. Meningkatkan SDM dan anggaran untuk pengawasan tata ruang.

#### **4. Gedung Laik Fungsi**

Berbeda dengan Kinerja lainnya, target persentase Gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi pada Tahun 2024 di Kabupaten Majalengka tercapai sebesar 165,58% dikarenakan realisasinya 1,02% atau sebanyak 5 Gedung memiliki sertifikat laik fungsi dari



total Gedung sebanyak 489 gedung sedangkan target yang ditetapkan di Tahun 2024 sebesar 0,62% atau sebanyak 3.

Faktor yang membuat target di Tahun 2024 tercapai adalah dengan cara meningkatkan pelayanan perizinan, pengawasan dan pendataan bangunan gedung melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang diantaranya menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB).



Gambar 3.9 Pemeriksaan Fisik di Lokasi Bangunan  
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dengan adanya SLF ini akan memberikan kepastian hukum atas Pembangunan, kepemilikan, dan keamanan dan keselamatan bangunan sebelum digunakan, selain itu dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses perizinan bangunan Gedung. Saat ini pelayanan permohonan dan pengelolaan data dilakukan secara online sementara pemeriksaan fisik dilakukan secara langsung di lokasi bangunan Gedung.

Upaya yang harus dilakukan dimasa yang akan datang untuk meningkatkan persentase Gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi adalah:

- a. Memindahkan seluruh pelayanan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi ke Mal Pelayanan Publik agar proses perizinan dilakukan terpadu satu pintu;
- b. Membuat Standar Pelayanan dan SOP yang lebih mudah dan pasti untuk mempercepat proses pelayanan pembuatan SLF bagi masyarakat.





## 5. Peningkatan Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan

Selain pembangunan infrastruktur secara fisik, diperlukan juga faktor pendukung infrastruktur agar masyarakat pengguna fasilitas dapat lebih tertib, lebih aman, lebih lancar dan tetap selamat dalam menggunakan alat transportasi sehingga kualitas infrastruktur dan ruang wilayah dapat meningkat.

Indikator yang digunakan untuk mencerminkan sasaran ketertiban, keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi adalah V/C ratio atau Tingkat pelayanan jalan. V/C ratio Rata-rata ruas jalan yang ada di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 diklasifikasikan ke dalam tingkat pelayanan B (0,31) Data tersebut diperoleh dari perhitungan Volume (V)/Kapasitas (C) rata-rata ruas jalan dimana volume (V) rata-rata sebesar 10.541,53 dan Kapasitas (C) rata-rata sebesar 33.580,71 sehingga V/C ratio rata-rata adalah sebesar 0,31 (Tingkat Pelayanan B). Tingkat Pelayanan B mempunyai karakteristik kondisi lalu lintas sebagai Arus lalu lintas stabil dengan volume lalu lintas **sedang** dan kecepatan sekurang-kurangnya **70 Km/Jam**.

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Alamat : Jalan Pajuaran Mahamad K.M.S Simpangan - Majalengka  
Telp / Fax : (0231) 281741

**TABEL 1**  
**V/C RATIO JALAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

NO	NAMA JALAN	VOLUME	CAPACITY	V/C RATIO
1	Jln. Derasan - Majalengka	255,7	628,8	0,41
2	Jln. Jatiwangi - Wanurekidhi	626,7	2294,08	0,27
3	Jln. Lingsing - Bantarawati	591,13	1246,66	0,47
4	Jln. Maya - Sukahaji	891,94	722,68	0,96
5	Jln. Sukahaji - Pinangraja	487,2	828,8	0,65
6	Jln. Rajapalah - Majalengka	724,62	985,93	0,74
7	Jln. Bantarawati - Ampel	593	8400	0,31
8	Jln. Heras - Tegal Aera	326,79	1869,28	0,19
9	Jln. Jatiwangi - Wanurekidhi	626,27	11482,04	0,05
10	Jln. Heras - Deber	408	2490	0,33
11	Jln. Giramukti - Jati Mulya	806	1285	0,67
12	Jln. Kasirandiri - Gunung Sari	172	222,68	0,78
13	Jln. Gandawati - Tegal Aera	226,79	1310,28	0,19
14	Jln. Gatrasong - Rajapalah	854,39	594,44	1,44
15	Jln. Bantarawati - Rajapalah	1423	2482,48	0,57
16	Jln. Bantia - Panyingkiran	345	1347	0,28
17	Jln. Panyingkiran - Bantia	345	1247	0,28
18	Jln. Sikaraja - Cikembar	503	1600	0,31
	<b>V/C Ratio Rata-Rata</b>	<b>10541,53</b>	<b>33580,71</b>	<b>0,31</b>

Majalengka, 21 Januari 2025  
Kepala Dinas Perhubungan  
  
**DIN. EDY SOE BUDAYANING, M.Eng.**  
Koridor 050210 155323 1 000

Gambar 3.10 V/C Ratio Rata-rata 2024  
Sumber : Dinas Perhubungan



Beberapa faktor yang mempengaruhi *V/C ratio* di Kabupaten Majalengka, yaitu:

- a. **Membangun Penerangan Jalan Umum (PJU)** sebanyak 135 unit dan menyediakan rambu lalu lintas sebanyak 32 unit serta cermin tikungan sebanyak 22 unit yang tersebar di wilayah Kabupaten Majalengka;



Gambar 3.11 Pemasangan PJU  
Sumber : Dinas Perhubungan

- b. **Meningkatkan kualitas pelayanan parkir** dengan menertibkan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir serta melakukan pengawasan parkir baik itu parkir umum maupun parkir di tempat-tempat khusus.
- c. **Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor** sebanyak 8.000 unit dan diberikan bukti lulus uji elektronik.
- d. **Melakukan pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan** seperti pengamanan dan pengawasan lalu lintas Angkutan lebaran, CFD, hari-hari besar, Natal dan Tahun Baru.

Upaya yang harus dilakukan dimasa yang akan datang untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi dan pengguna jalan adalah:

- a. Memastikan trotoar tersedia serta untuk trotoar yang ada berfungsi sebagaimana mestinya bagi pejalan kaki;





- b. Menertibkan kendaraan angkutan umum yang sudah tidak layak untuk beroperasi dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran aturannya;
- c. Membuat sistem pembayaran parkir secara digital agar masuk langsung ke kas daerah;
- d. Meningkatkan kualitas dan kenyamanan terminal beserta angkutan umum yang ada di Kabupaten Majalengka;
- e. Memastikan semua area dapat diakses dengan mudah oleh transportasi umum kemudian menginformasikan kepada seluruh masyarakat;
- f. Memastikan sarana prasarana penunjang infrastruktur jalan seperti lampu merah, rambu dan marka jalan terpasang dengan jelas dan tepat

#### **6. Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Dalam meningkatkan kualitas infrastruktur daerah perlu juga meningkatkan kualitas perumahan dan Kawasan permukiman yang diukur menggunakan persentase rumah tangga hunian layak. Pada Tahun 2024 capaian kinerja persentase rumah tangga hunian layak adalah 100,01% dari target 97,049% dan terealisasi 97,068%. Terdapat empat kriteria rumah tangga layak huni yang perlu diperhatikan seperti ketahanan bangunan, memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi layak dan kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m<sup>2</sup> per kapita. Adapun faktor yang berhasil meningkatkan kualitas perumahan dan Kawasan permukiman, yaitu:



Gambar 3.12 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni  
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

- a. Tertatanya Kawasan kumuh

Kawasan kumuh merupakan sebuah Kawasan dengan Tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni





- oleh masyarakat miskin. Dengan menata Kawasan kumuh kita bukan saja memperbaiki keadaan fiskal dan sosial tetapi memberi peluang kepada penduduk untuk menikmati kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berhasil merealisasikan 386 unit tidak layak huni.
- b. Korban bencana mendapatkan rumah layak  
Pada Tahun 2024 terjadi banyak bencana seperti angin puting beliung di Kecamatan Sukahaji, Longsor di Kecamatan Talaga dan Kecamatan Banjaran sehingga Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 11 rumah pada 9 desa.
  - c. Meningkatkan infrastruktur air minum  
Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka berhasil membangun jaringan perpipaan sebanyak 1.400 Sambungan Rumah/KK yang tersebar di 18 Desa Kabupaten Majalengka, namun dari 25 usulan pada Tahun 2024 hanya 18 usulan yang bisa diakomodir dikarenakan keterbatasan anggaran dan dokumen tidak memenuhi kriteria.
  - d. Meningkatkan kualitas pengolahan air limbah  
Pengolah air limbah sangat penting untuk menjaga Kesehatan masyarakat, lingkungan dan kualitas sumber daya air yang terbatas. Tanpa pengolahan yang tepat, air limbah dapat mencemari sungai, danau dan lautan. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka berhasil membangun sarana dan prasarana air limbah sebanyak 220 KK yang tersebar diberbagai kecamatan seperti Argapura, Rajagaluh, Sumberjaya.
  - e. Meningkatkan jaringan drainase  
Drainase adalah sistem pengelolaan air yang bertujuan untuk membuang air berlebih dari suatu wilayah. Sistem ini dapat mencegah banjir, genangan air dan masalah Kesehatan terkait air. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka berhasil membangun jaringan drainase sepanjang 288 meter yang dibangun di Kecamatan Argapura dan Kecamatan Leuwimunding.
  - f. Meningkatkan jaringan jalan lingkungan  
Total Panjang jalan lingkungan yang dibangun Tahun 2024 yaitu 22.002,5 meter yang tersebar pada 62 lokasi Desa/Kelurahan,





sebagian besaran usulan yang masuk dikarenakan kerusakan jalan untuk menunjang kelancaran akses perekonomian masyarakat.



Gambar 3.13 Pembangunan Jalan Lingkungan  
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Upaya yang harus dilakukan dimasa yang akan datang untuk meningkatkan kualitas perumahan dan Kawasan permukiman adalah:

- a. Pembangunan infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman seharusnya tidak hanya menerima terkait usulan namun juga menerima terkait aduan misalnya adanya genangan, rumah roboh atau hal lainnya yang memang bisa dibantu sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- c. Mempermudah pengajuan penyediaan akses air bersih agar seluruh desa di Kabupaten Majalengka dapat mengakses air bersih terutama sebagai langkah pencegahan pada musim kemarau.

Capaian kinerja indikator ini tidak terlepas dari intervensi program-program berikut ini:

Tabel 3.6 Program yang Mendukung IKU 5

No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	12.636.895.600	12.401.397.952
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	110.080.538.707	108.119.295.165





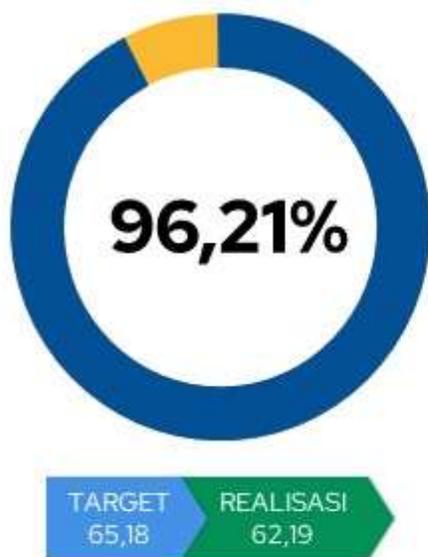
No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	68.872.920.690	67.891.029.685
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.173.900.000	3.118.476.100
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	707.000.000	678.324.100
6.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.747.820.000	1.745.792.000
7.	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	100.000.000	88.374.000
8.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	400.000.000	397.886.000
9.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.413.324.000	3.404.734.000
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.499.477.000	12.648.357.000
11	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.272.728.000	12.201.675.000

**Efisiensi** anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah pada sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan tidak ada karena IKU hanya mencapai 95,41%.



**MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

**CAPAIAN 2024**



**PERBANDINGAN DENGAN**



**FAKTOR**

Yang mempengaruhi

- ❖ Meningkatnya Kualitas Air
- ❖ Meningkatnya Kualitas Udara Ambien
- ❖ Meningkatnya Kualitas Lahan

**PROGRAM**

Yang mendukung

- ❖ Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- ❖ Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- ❖ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- ❖ Program Pengelolaan Persampahan
- ❖ Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

**EFISIENSI ANGGARAN**

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja indikator ini tidak ada dikarenakan capaian IKU hanya **96,21%**





## SASARAN 5

### MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Tingkat kualitas lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, IKLH merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang tidak mempunyai laut atau pantai. Oleh karena itu, IKLH Kabupaten Majalengka hanya nilai komposit dari IKA, IKU dan IKL saja.

Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

#### Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 sudah mencapai 92,03% jika **dibandingkan dengan target akhir RPD**. Akan tetapi jika **dibandingkan dengan Tahun 2023**, IKLH Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,35. **Capaian IKLH Tahun 2024** yaitu 96,21%, kurang 2,54 dari target yang telah ditetapkan. Jika jika **dibandingkan dengan realisasi provinsi** juga masih lebih rendah 1,48.

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2026 (Akhir RPD)	Realisasi Jawa Barat
67,08	64,54	65,89	69,45	66,02

Ketidaktercapaian target IKLH Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 dipengaruhi oleh dua faktor yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan yang tidak mencapai target yang telah ditentukan.

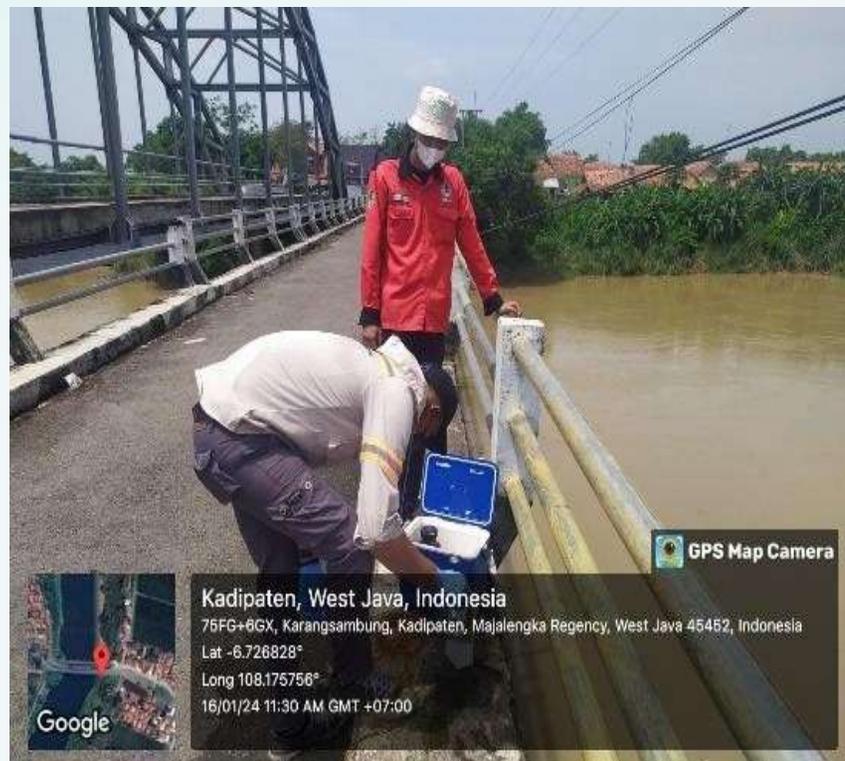
#### 1. Indeks Kualitas Air

Tingkat kualitas air diukur dengan Indeks Kualitas Air (IKA). Parameter yang digunakan untuk mengukur IKA adalah TSS, DO, BOD, COD, *Total Fosfat*, *Fecal Coli*, dan *Total Coliform*. Pengambilan





sampel dan pengujian kualitas air dilakukan pada air sungai. Pada Tahun 2024, pengambilan sampel kualitas air (sungai) di Kabupaten Majalengka dilakukan di 7 (tujuh) lokasi sungai, yaitu sungai Cilutung, Cideres, Cikeuruh, Cikoronjo, Cihieum, Ciwaringin dan Cimanuk, dilakukan pada 2 (segmen) yang mewakili daerah hulu dan hilir. Waktu pengambilan sampel dilakukan pada Bulan Februari saat musim kemarau. Perhitungan IKA dilakukan melalui penentuan Status Mutu Air di setiap titik pemantauan. Indeks Kualitas Air (IKA) akan didapat setelah dihitung melalui pemenuhan mutu air dikalikan bobot nilai indeks. Status mutu air di wilayah Kabupaten Majalengka dihitung dengan menggunakan metode STORET masuk pada kelas C yaitu dengan status Cemar Sedang. Sedangkan dengan metode Indeks Pencemaran (IP) status mutu air Kabupaten Majalengka masuk kategori Tercemar Ringan. Sehingga didapatkan indeks kualitas air di Kabupaten Majalengka yaitu 50 dengan predikat “sedang”. Capaian dari realisasi tersebut hanya 98% dari indeks kualitas air yang telah ditargetkan di Tahun 2024 yaitu sebesar 51.



Gambar 3.1 Pengambilan Sampel Kualitas Air Sungai  
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air di Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh beberapa hal seperti aktivitas sosial ekonomi masyarakat di sekitar Daerah Aliran Sungai yang dapat memengaruhi kualitas air. Pada Tahun 2024 sebagian besar usaha dan/atau industri skala besar yang memiliki izin telah memiliki pengelolaan air limbah atau IPAL





(Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemantauan/ pengujian kualitas air limbah di laboratorium minimal satu bulan sekali. Akan tetapi masih banyak pelaku usaha skala kecil-menengah yang membuang limbah cair ke sungai. Hal ini terbukti dengan adanya empat aduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup baik melalui SP4N Lapor maupun melalui surat terkait dengan pelaku usaha yang membuang limbah cair ke sungai.



Gambar 3.2 Pemeriksaan Ketaatan Izin Lingkungan  
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka telah melaksanakan pemeriksaan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Terdapat 41 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa ketaatannya terhadap izin lingkungan. Hasil dari pemeriksaan itu masih terdapat 11 usaha/kegiatan yang melanggar terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka. Usaha/kegiatan yang melanggar tersebut dikenai sanksi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Nomor 41 Tahun 2024 tentang Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah. Berikut perusahaan yang dikenai sanksi tersebut:





**JUMLAH PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MELANGGAR TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

No.	Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tanggal/tahun Pelaksanaan Pemeriksaan	Status
1	PT. Gistex Garment Indonesia	Industri	20 Agustus 2024	Tidak Taat
2	PT. Tunas Mertha Jaya/Hotel Fieris	Jasa Perhotelan	18 September 2024	Tidak Taat
3	PT. Indo Sung Il Jaya	Industri	23 September 2024	Tidak Taat
4	Klinik Utama Utama An-nisa	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	08 Oktober 2024	Tidak Taat
5	Klinik Utama Kebidanan Bunda Kartini	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	18 Oktober 2024	Tidak Taat
6	PT. Kemilau Surya Mandiri	Industri	24 Oktober 2024	Tidak Taat
7	PT. Hui Hao Indonesia	Industri	20 November 2024	Tidak Taat
8	Klinik Pratama Sinar Surya Medika	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8 Januari 2025	Tidak Taat
9	PT. Diamond International Indonesia	Industri	8 Januari 2025	Tidak Taat
10	PT. Lyg Garment Indonesia	Industri	13 Januari 2025	Tidak Taat
11	PT. Shin Woo Mulia	Industri	13 Januari 2025	Tidak Taat

Gambar 3.3 Data Usaha/Kegiatan yang Tidak Taat  
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Akan tetapi masih ada hambatan seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha/kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan mengenai fungsi, manfaat dan kewajiban perusahaan, termasuk didalamnya kewajiban pelaporan pengelolaan lingkungan. Hal ini dikarenakan keberhasilan pengendalian pencemaran air sungai dipengaruhi oleh ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan di tempat usaha.

Sampah menjadi faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas air sungai. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan sampah berupa penanganan sampah dan pengurangan sampah yang terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pada Tahun 2024 timbunan sampah di Kabupaten Majalengka mencapai 443.996 ton dengan 1.216,43 ton timbunan sampah per hari. Dari total timbunan tersebut, sebanyak 290.455,47 telah ditangani dengan rincian sebagai berikut:

**JUMLAH SAMPAH YANG DITANGANI**

No.	Keterangan	Tahun 2024	
		(m3/Tahun)	(Ton/Tahun)
1.	Jumlah Pengurangan Sampah	82.876	105.144,97
2.	Jumlah Penanganan Sampah	213.118	185.310,50
3.	Sampah yang ditangani/dikelola	193.636,98	290.455,47

Gambar 3.4 Jumlah Sampah yang Ditangani  
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup





Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Akan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat sehingga banyaknya sampah yang dibuang ke sungai serta keterbatasan armada pengangkut sampah yang terbatas membuat kualitas air sungai di Kabupaten Majalengka tak kunjung membaik. Oleh karena itu pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka membentuk **Tim Sapu Bersih** yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Majalengka. Pemerintah Kabupaten Majalengka juga menggunakan konsep **desentralisasi terkait pembersihan jaringan irigasi** yang berada di setiap kecamatan. Sehingga kewenangan pembersihan jaringan irigasi ini tidak lagi mutlak berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang melainkan menjadi kewenangan kecamatan juga. Pemerintah Kabupaten Majalengka juga membekali setiap kecamatan tersebut fasilitas berupa alat kebersihan dan cator.



Gambar 3.5 Tim Sapu Bersih  
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi kegiatan Pembatasan timbulan sampah, Pendaauran ulang sampah, dan Pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan sampah secara umum dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, diantaranya melalui pengelolaan TPS3R, Bank Sampah, Sektor Informal (Pelapak/Pengepul) dan Pengomposan. **Pada Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup telah membangun Bank Sampah** di dua lokasi





yaitu Desa Gunung Kuning Kecamatan Sindang dan Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji dengan dana alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Sehingga sampai Tahun 2024 sudah terdapat empat bank sampah di Kabupaten Majalengka.



Gambar 3.6 Bank Sampah Desa Gunungkuning dan Desa Palabuan  
Sumber Dinas Lingkungan Hidup

Sampai Tahun 2024 Kabupaten Majalengka juga telah memiliki TPS3R yang tersebar di 23 lokasi.

Tabel 3.7 TPS3R di Kabupaten Majalengka

Lokasi TPS3R
Desa Jatisura, Jatiwangi
Desa Panongan, Kecamatan Ligung
Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka
Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi
Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi
Desa Burujul Kulon, Kecamatan Jatiwangi
Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi
Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka
Desa Malausma, Kecamatan Malausma
Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing
Desa Cikoneng, Kecamatan Sukahaji
Desa Kutamunggu, Kecamatan Cigasong
Desa Babakan Manjeti, Kecamatan Sukahaji
Desa Mekarsari, Kecamatan Jatiwangi
Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran
Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh
Desa Karang Anyar, Kecamatan Dawuan
Desa Kramatjaya, Kecamatan Malausma
Desa Ligung Lor, Kecamatan Ligung
Desa Rajagaluh Lor, Kecamatan Rajagaluh





Lokasi TPS3R
Desa Sindangkerta, Kecamatan Maja
Desa Sukaraja Kulon, Kecamatan Jatiwangi
Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran

Akan tetapi dalam pengurangan sampah juga terdapat hambatan yaitu sebagian besar masyarakat belum memiliki kesadaran untuk mengelola sampah dengan cara yang benar, seperti dilakukannya pemilahan sampah sesuai jenisnya dan belum optimalnya pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Sistem *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) dan bank sampah.

Berdasarkan analisis kinerja dan hambatan di atas, maka di tahun selanjutnya Pemerintah Kabupaten Majalengka akan melaksanakan beberapa upaya, diantaranya:

- a. Menerapkan peraturan pembuangan limbah cair ke sungai yang berdasarkan daya tampung beban pencemaran air sungai.
- b. Melaksanakan pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Majalengka secara periodik.
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap industri yang berpotensi membuang limbah cair ke sungai agar kualitas limbah cair yang dibuang ke sungai memenuhi Baku Mutu Lingkungan (Baku Mutu Limbah Cair).
- d. Mendorong industri agar mengikuti Program Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper).
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan Bank Sampah dan TPS3R.
- f. Membuat sistem pengelolaan sampah terpadu dari hulu sampai hilir.
- g. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah dan sampah serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan air limbah dan sampah melalui sosialisasi atau pembinaan melalui kader lingkungan atau komunitas hijau yang ada di Kabupaten Majalengka.

## **2. Indeks Kualitas Udara**

Tingkat kualitas udara ambien diukur dengan Indeks Kualitas Udara (IKU). Parameter kualitas udara yang diambil dan dianalisis meliputi:





Sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>), Oksidan (O<sub>3</sub>), Debu (TSP), Pb (Timah Hitam), Hidrogen Sulfida (H<sub>2</sub>S) dan parameter Kebisingan.



Gambar 3.7 Pengambilan Sampel Udara  
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Pada Tahun 2024 data kualitas udara ambien di wilayah Kabupaten Majalengka diambil pada wilayah permukiman dan perumahan di Desa Ujung Berung Kecamatan Sindangwangi, transportasi di Terminal Rajagaluh, perkantoran di Kantor Kecamatan Rajagaluh dan wilayah kegiatan industri di industri batu alam Kecamatan Sindangwangi. Waktu pengambilan sampel dilakukan pada Tanggal 13 Mei Tahun 2024 saat musim kemarau menggunakan metode Grab Sampler. Pengujian dan analisis parameter udara dilakukan di Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan, Perumda Tirtawening Kota Bandung. Sehingga didapatkan indeks kualitas udara di Kabupaten Majalengka yaitu 94 dengan kriteria “Sangat Baik”. Capaian dari realisasi IKU tersebut mencapai 103%, melampaui dari yang sudah ditargetkan sebesar 90,71.



Gambar 3.8 Penyuluhan Lingkungan Hidup  
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup





Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024, yaitu telah melaksanakan pengendalian pencemaran udara dan kerusakan lingkungan hidup melalui pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup pada berbagai lapisan masyarakat untuk gemar melakukan penghijauan guna menjaga kualitas udara di lingkungan rumah.

Hambatan dalam pencapaian target kinerja yaitu keterbatasan interaktif langsung dengan para pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari udara. Kebiasaan dari sebagian warga masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah. Keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah perkotaan, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan.

Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Lingkungan Hidup juga telah berupaya menindak pelanggar lingkungan hidup. Meskipun terdapat keterbatasan sarana prasarana pengujian dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan seperti alat pengukur getar, pengukur bau dan lain-lain, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu Dinas Lingkungan Hidup melakukan mediasi bagi para pihak yang bersengketa dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Upaya yang dapat dilakukan di tahun selanjutnya, antara lain:

- a. Mendorong industri agar mengikuti Program Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper)
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya pembakaran sampah melalui sosialisasi atau pembinaan melalui kader lingkungan atau komunitas hijau yang ada di Kabupaten Majalengka.

### **3. Indeks Kualitas Lahan**

Tingkat kualitas lahan diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKL menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Pada Tahun 2024, Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Majalengka yaitu 35,04 mengalami penurunan 15,93 dibandingkan dengan Tahun 2023. Capaian realisasinya sebesar 68% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 50,97.

Hal ini dikarenakan adanya penyusutan luasan hutan sebesar 6,12





Ha dari 13.566,54 Ha pada Tahun 2023 menjadi 13.560,33 Ha pada Tahun 2024 dan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) sebesar 950,95 Ha dari 7.953,26 Ha pada tahun 2023 menjadi 7.002,31 Ha pada Tahun 2024.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka yaitu:

1. Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau merupakan area terbuka yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan estetika, serta dapat memberikan manfaat bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Majalengka yang pemeliharannya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup diantaranya Taman Baribis, Taman Cicenang, Taman Panglayungan, Taman Median, Jalan dari Bunderan Cigasong sampai dengan Bunderan Munjul.

2. Tersosialisasikannya gerakan peduli lingkungan hidup kepada masyarakat

Pada Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan sosialisasi gerakan peduli lingkungan hidup kepada masyarakat sebanyak 6 kali di Desa Waringin Kecamatan Sumberjaya, Desa Cigasong Kecamatan Cigasong, Kecamatan Lemahsugih, Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji, Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya, Desa Sukasari Kecamatan Argapura, Kecamatan Leuwimunding, Hotel Horison Kertajati, dan Desa Cisambeung Kecamatan Palasah yang dihadiri oleh anggota PKK, Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa, Pengawas Sekolah, Kepala SMP se-Kabupaten Majalengka.

3. Tersusunnya DIKPLH

Pada Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun DIKPLH (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang merupakan salah satu instrumen pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah. Dokumen ini penting untuk disusun karena bermanfaat untuk mengukur kinerja pengelolaan lingkungan hidup, mengidentifikasi masalah lingkungan hidup, mengembangkan strategi pengelolaan lingkungan hidup, dan mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup dengan





pembangunan daerah. Dokumen ini dilengkapi dengan analisis DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact dan Response yang dapat membantu pemerintah dalam bentuk kebijakan baru untuk kebaikan lingkungan di masa depan. Pada DIKPLH Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ditetapkan 3 isu lingkungan prioritas yaitu persampahan, perubahan lahan dan bencana alam. Berikut inovasi Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menangani isu prioritas tersebut:

Isu Lingkungan Prioritas	Inovasi
1. Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Gerakan Jumat Bersih (Jumsih)</li> <li>2. Program Bersih Kali Bersih (Berkaliber)</li> <li>3. Program Pemberdayaan Komunitas Lingkungan</li> <li>4. Program Silihasuh Raharja</li> </ol>
2. Perubahan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Gerakan Tata Tanam (GTT)</li> <li>2. Program Revitalisasi RTH Publik</li> <li>3. Program Penyusunan RPPLHD Kabupaten Majalengka</li> <li>4. Program Langit Biru</li> </ol>
3. Bencana Alam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penanaman Pohon</li> <li>2. Program Pemetaan Wilayah Rawan Bencana</li> <li>3. Program Majalengka Raharja 112</li> <li>4. Program Sinergi Polres, TNI, dan Pemerintah Kabupaten Majalengka</li> </ol>

Gambar 3.9 Inovasi terhadap Isu Lingkungan Prioritas  
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Berikut **program-program** yang mendukung capaian indikator ini:

Tabel 3.8 Program yang Mendukung IKU 6

No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	306.030.000	300.001.900
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	478.077.000	478.077.00



No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup	2.001.285.388	999.447.950
4.	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	7.028.893.000	7.000.919.900
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	52.500.000	52.215.000

**Efisiensi** anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup tidak ada karena IKU hanya mencapai 96,21%.



## MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS DAERAH

### CAPAIAN 2024



### PERBANDINGAN DENGAN



### FAKTOR

Yang mempengaruhi

- ❖ Produktivitas (On Farm) dan Daya Serap (Off Farm) Komoditas Pertanian
- ❖ Tingkat Kemandirian Desa
- ❖ Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
- ❖ Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- ❖ Meningkatnya Investasi
- ❖ Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja

### PROGRAM

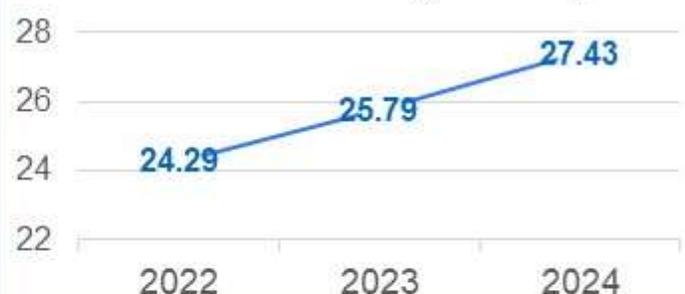
Yang mendukung

- ❖ Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- ❖ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- ❖ Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- ❖ Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- ❖ Program Pengembangan Ekspor
- ❖ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- ❖ Program Pengembangan UMKM
- ❖ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
- ❖ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- ❖ Program Penyuluhan Pertanian
- ❖ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- ❖ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- ❖ Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- ❖ Program Pemasaran Pariwisata
- ❖ Program Pelayanan Penanaman Modal

### EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja indikator ini tidak ada dikarenakan capaian IKU hanya **99,45%**

### NILAI PDRB (ADHK)





## SASARAN 6

### MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS DAERAH

Peningkatan produktivitas suatu daerah dapat diketahui melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* pada periode tertentu. PDRB dapat disajikan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga konstan (ADHK). Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar (2010=100) dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### Nilai PDRB (ADHK)

Realisasi Nilai PDRB (ADHK) Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan sebesar 1,64 triliun jika **dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023**. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, Majalengka merupakan kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Jawa Barat dengan pertumbuhan sebesar 6,38 persen, **lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Barat** sebesar 4,95%. Kontribusi PDRB (ADHK) Kabupaten Majalengka terhadap **Provinsi Jawa Barat** sebesar 6,12% dengan PDRB sebesar 448,06 triliun. **Capaian PDRB (ADHK) Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024** yaitu 99,46%, hal ini dapat diketahui dari target 27,58 triliun dan realisasi 27,43 triliun dengan PDRB per kapita sebesar Rp34.233.994. Jika **dibandingkan dengan target akhir RPD**, realisasi Tahun 2024 sudah mencapai 88% dengan target akhir sebesar 31,17 triliun.





Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2026 (Akhir RPD)	Realisasi Jawa Barat
27,58	27,43	25,79	31,17	448,06

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya indikator ini, antara lain:

#### 1. Tingkat kemandirian desa

Tingkat kemandirian desa diukur dengan Persentase Desa Mandiri yang pada Tahun 2024 mencapai 96,69% atau 176 desa dari 182 desa yang ditargetkan untuk menjadi desa mandiri. Desa Mandiri merupakan salah satu status desa dalam Indeks Desa Membangun dengan nilai  $>0,8155$ . Desa Mandiri atau yang dapat disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa yang salah satunya ditandai dengan ketahanan ekonomi. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain:

##### a. Tingkat Kemandirian BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sampai dengan Tahun 2024 terdapat 330 BUM Desa di Kabupaten Majalengka dengan status 120 aktif dan 210 tidak aktif. Adapun penyebab penghentian usaha (tidak aktif) karena mengalami kerugian terus menerus, mencemari lingkungan, dinyatakan pailit dan sebab lain yang sah. BUM Desa yang tidak aktif atau mengalami penghentian kegiatan usaha tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa sebagai Badan Hukum. BUM Desa dapat dioperasionalkan lagi melalui upaya-upaya yang relevan sehingga BUM Desa dapat aktif kembali.

BUM Desa memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka dengan aktifnya BUM Desa akan meningkatkan pendapatan asli Desa,





memberdayakan masyarakat dan mendukung Pembangunan ekonomi lokal seperti pertanian, pariwisata dan lainnya yang akan berpengaruh secara agregatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka.



Gambar 3.1 BUM Desa Aktif

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

b. Meningkatkan Pemanfaatan Sarana Prasarana Desa

Salah satu program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 untuk meningkatkan pemanfaatan sarana prasarana desa berupa **Program Padat Karya Tunai**, meskipun bersifat jangka pendek namun kegiatan ini dapat menggerakkan perekonomian di pedesaan karena mampu menyerap tenaga kerja 10.716 orang dengan anggaran sebesar Rp. 3.810.000.000 yang disalurkan kepada 16 lokasi salah satunya di Desa Mekarwangi, Kecamatan Lemahsugih. Dengan adanya program Padat Karya Tunai ini dapat memberdayakan masyarakat setempat dengan melibatkan dalam proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya.



Gambar 3.2 Program Padat Karya

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Upaya yang akan dilakukan tahun mendatang untuk meningkatkan kemandirian desa yaitu:

- a. Menyertakan modal baru dan/atau membentuk usaha baru bagi BUM Desa yang dinyatakan pailit.





- b. Melakukan bimbingan teknis kepada pengelola BUM Desa terkait manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia dan manajemen produk bagi BUM Desa yang mengalami kerugian terus menerus.
  - c. Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan lingkungan hidup untuk BUM Desa yang berpotensi mencemari lingkungan.
  - d. Menjadikan BUM Desa sebagai jaringan distribusi produk produsen dan konsumen dengan harga terjangkau.
  - e. Program Padat Karya Tunai diimplementasikan lebih tepat sasaran agar lebih dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
2. Produktivitas (*On Farm*) dan Daya Serap (*Off Farm*) Komoditas Pertanian



Gambar 3.3 Penurunan Produktivitas Pertanian  
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Berdasarkan data BPS pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 berdasarkan lapangan usaha di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi **satu-satunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi sampai -7,42%**, hal ini sejalan dengan hasil Survei BPS lainnya terkait luas panen tanaman padi mengalami penurunan 13,09% dari 100.124 Ha menjadi 87.013 Ha. Penurunan ini diakibatkan karena terjadinya *anomaly* cuaca, kekeringan dan serangan hama tikus terutama di daerah Majalengka bagian utara. Produktivitas pertanian juga menurun dari 58,77 kwintal/Ha pada Tahun 2023 menjadi 55,50 kwintal/Ha pada Tahun 2024, hal ini mengakibatkan menurunnya produksi padi sebesar 17,93% atau sebesar 588.430 ton pada Tahun 2023 menjadi 482.918 ton pada Tahun 2024.





Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan maka produksi beras sepanjang Tahun 2024 diperkirakan setara dengan 278.877 ton atau **mengalami penurunan sebesar 43.606 ton (13,52 persen)** dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar 322.483 ton.

Namun pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berupaya melakukan berbagai hal untuk meningkatkan produktivitas pertanian diantaranya:

- a. Menjamin ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dengan menyalurkan bantuan berupa benih ikan nila dan pakan ikan konsumsi yang dilaksanakan dengan berlokasi di desa Sindangwangi kecamatan Sindangwangi.
- b. Pelatihan penguatan kelembagaan petani pada Tanggal 4-6 Desember di kelompok Tani Cicarian Desa Cisalak Kecamatan Lemahsugih dan Kelompok Tani Kiara Condong Desa Sindanghurip Kecamatan Bantarujeg serta memberikan bantuan *handsprayer* semi elektrik sebanyak 100 unit untuk 10 kelompok tani tembakau.
- c. Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani pada 26 desa yang tersebar di 13 Kecamatan untuk memudahkan mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi pertanian dan hasil produksi pertanian dari dan ke lahan pertanian, serta melakukan Pembangunan jalan usaha tani pada 8 kelompok di 8 lokasi.



Gambar 3.4 Jalan Usaha Tani

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

- d. Menyalurkan benih jagung sebanyak 750 kg tersebar di 11 kelompok tani di 10 desa dan 6 kecamatan. Dengan Sasaran peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan melalui bantuan benih jagung bersertifikat.





e. Kementerian Pertanian Republik Indonesia memberikan bantuan pompa air sebanyak 463 unit, dengan rincian: Pompa air ukuran 3 inchi sebanyak 147 unit, Pompa air ukuran 4 inchi sebanyak 5 unit, Pompa air ukuran 6 inchi sebanyak 36 unit, Irigasi perpompaan sebanyak 25 unit, dan Brigade pompa air melalui Kodim 0617 Majalengka sebanyak 250 unit ukuran 3 inchi. Bantuan ini sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Majalengka. Dengan adanya fasilitas ini, kita berharap para petani dapat mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi, seperti kekurangan air dan cuaca yang tidak menentu, sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan mereka.

Upaya yang akan dilakukan tahun mendatang untuk meningkatkan produktivitas pertanian yaitu:

- a. Melakukan identifikasi kembali kepada kelompok tani dan penerima manfaat dari bantuan/subsidi yang diberikan agar lebih tepat sasaran dan mampu mendongkrak kenaikan produktivitas pertanian;
- b. Menerapkan teknologi pertanian modern seperti GPS, drone dan sensor untuk memantau kondisi tanah, tanaman, dan cuaca secara real time sehingga penggunaan pupuk air dan pestisida lebih efisien;
- c. Menggunakan benih unggul yang dapat meningkatkan hasil panen;
- d. Melakukan diversifikasi tanaman untuk mengurangi resiko gagal panen;
- e. Meningkatkan keterampilan petani melalui pelatihan dan Pendidikan, pendampingan teknis, dan memanfaatkan teknologi informasi.
- f. Meningkatkan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani dan gudang penyimpanan agar lebih terpadu.

Meskipun target pada Tahun 2024 tidak tercapai namun secara nilai PDRB Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan 1,64 T yang **dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya:**

### **1. Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri**

Perdagangan dalam negeri yakni perdagangan antar wilayah di kawasan yang masih satu negara. Sementara perdagangan luar negeri adalah perdagangan lintas batas negara. Perdagangan dalam dan luar





negeri diukur dengan indikator Laju PDRB Sektor Perdagangan yang pada Tahun 2024 sebesar 4,54%. **Realisasi tersebut melambat 0,26% dibandingkan dengan laju PDRB sektor perdagangan tahun sebelumnya.** Meskipun demikian, nilai PDRB sektor perdagangan tetap mengalami peningkatan sebesar 172,4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi Tahun 2024 yaitu 3.988,72 miliar. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan beberapa upaya, diantaranya:

a. Mengendalikan Harga dan Ketersediaan Barang

Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Majalengka melaksanakan pengawasan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting). Hasil pengawasan tersebut kemudian dilaporkan dalam Laporan Bapokting. Laporan Bapokting merupakan laporan pelaku usaha dalam mendistribusikan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang bermanfaat sebagai data pendukung dalam pengendalian inflasi. Pada Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menyusun Laporan Bapokting yang disampaikan kepada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dan Inspektorat Kabupaten Majalengka. Selain itu, laporan hasil pengawasan bapokting juga disampaikan secara digital kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi SiLinda (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat) dan kepada Kementerian Perdagangan melalui aplikasi SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok).

Pelaporan harga bapokting kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka rutin dilaksanakan dua kali dalam seminggu sehingga dalam satu tahun terhitung 96 kali, sedangkan pelaporan harga bapokting ke Kementerian Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan setiap hari kerja. Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga rutin mempublikasikan harga bapokting terbaru melalui media sosial instagram [disperdagin.majalengka](https://www.instagram.com/disperdagin.majalengka). Dalam laporan bapokting tersebut memuat data harga 36 komoditi bapokting yang ada di





Kabupaten Majalengka lengkap dengan harga grosir dan ecerannya di lima pasar Pemda yaitu Pasar Kadipaten, Pasar Talaga, Pasar Prapatan, Pasar Sindangkasih dan Pasar Maja. Data ini bermanfaat sebagai *early warning* pada komoditi yang harganya bergejolak pada saat terjadi inflasi dan untuk pemetaan wilayah sasaran yang memerlukan kebijakan stabilisasi harga dan ketersediaan bapokting.

NO	KOMODITI	30/12/2024	31/12/2024	KETERANGAN
1	BERAS MEDIUM	13.400	13.400	Tetap
2	BERAS PREMIUM	14.400	14.400	Tetap
3	CABE MERAH BIASA	56.000	56.000	Tetap
4	CABE MERAH KHITING	52.600	52.600	Tetap
5	CABE RAWIT HIJAU	41.400	41.400	Tetap
6	CABE RAWIT MERAH	65.200	65.200	Tetap
7	BAWANG MERAH SUMENEP	49.200	49.200	Tetap
8	BAWANG MERAH BIASA	41.800	41.800	Tetap
9	BAWANG PUTIH ( IMPORT )	43.600	43.600	Tetap
10	JAGUNG PIPILAN	6.800	6.800	Tetap
11	PISANG	9.200	9.200	Tetap
12	KERUPUK	25.600	25.600	Tetap
13	KACANG TANAH	26.600	26.600	Tetap

Gambar 3.5 Harga Bapokting

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Salah satu kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitasi harga dan ketersediaan bapokting yaitu operasi pasar. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menggelar operasi pasar sebanyak 7 kali, yaitu:

Tabel 3.9 Rekap Operasi Pasar Tahun 2024

No	Lokasi	Waktu	Keterangan
1	Desa Kumbang Kec. Rajagaluh	18 Maret 2024	Gebyar Belanja Murah
2	Desa Sukasari Kaler Kec. Argapura	20 Maret 2024	Gebyar Belanja Murah
3	Desa Cicanir Kec. Talaga	22 Maret 2024	Gebyar Belanja Murah
4	GGM Majalengka	27 Maret 2024	Gebyar Belanja Murah
5	Kecamatan Banjaran	4 April 2024	OPADI
6	Kecamatan Palasah	4 April 2024	OPADI
7	Desa Kawunghilir Kec. Cigasong	8 April 2024	OPADI





b. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan

Sarana Distribusi Perdagangan adalah sarana atau wadah untuk kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen yang selanjutnya dikenal sebagai pasar rakyat/tradisional. Pasar rakyat dibagi menjadi 3 jenis yaitu pasar penda, pasar desa dan pasar swasta. Sampai dengan Tahun 2024 di Kabupaten Majalengka terdapat 5 pasar penda, 44 pasar desa, sedangkan untuk pasar swasta belum ada di Kabupaten Majalengka. Selain melalui pasar, distribusi perdagangan juga dapat dilakukan melalui sarana di luar pasar berupa kios atau gerai yang berada di luar lokasi pasar rakyat. Sampai dengan Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Majalengka memiliki 9 sarana distribusi di luar pasar yang berada di Cingambul, Girilawungan, kios Pasar Balong, Kios Jatitujuh, Kios Siti Armilah, Eks Mapolres, Taman Raharja Munjul, Skywalk GGM, dan Kios Alun-Alun Majalengka.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah membangun pasar desa di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih. Pembangunan ini dilakukan karena sebagian besar masyarakat di Desa Lemahputih merupakan petani labu siam yang setiap hari pasaran (Rabu dan Sabtu) dapat memasok labu siam sebanyak 40 ton. Akan tetapi sebelum dibangunnya pasar ini, kondisi pasar yang berada di tanah milik Pemerintah Desa Lemahputih tersebut terkesan kumuh dan para pedagang hanya lesehan di alas bambu untuk menjajakan dagangannya. Setelah dibangunnya pasar ini, pedagang dapat lebih layak dalam. Melalui pasar ini juga, komoditas labu siam yang dihasilkan Desa Lemahputih akan didrop di pasar desa ini sebelum didistribusikan ke Wilayah III Cirebon. Dengan dibangunnya pasar tersebut, kedepannya Pasar Desa Lemahputih diharapkan dapat menjadi sentra labu siam.

Selanjutnya selain menyediakan sarana distribusi perdagangan melalui pasar dan luar pasar, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga telah berupaya meningkatkan kualitas pengelola pasar rakyat sebagai salah satu sumber daya yang mengelola sarana distribusi perdagangan. Pada tanggal 29 Juli 2024 telah dilaksanakan





pembinaan pengelola pasar rakyat. Pembinaan yang dilaksanakan di Hotel Achiera Jatiwangi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada para pengelola pasar rakyat sehingga pasar rakyat dapat menjadi pasar yang lebih aman, nyaman, layak kunjung dan layak beli. Pada kegiatan tersebut hadir 100 orang pengelola pasar rakyat dengan pemateri dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Kesehatan.



Gambar 3.6 Kegiatan Pembinaan Pengelola Pasar Rakyat  
Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

c. Meningkatkan Produk Dalam Negeri yang Dipromosikan

Promosi produk dalam negeri merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan agar minat masyarakat terhadap produk dalam negeri dapat meningkat dan produk dalam negeri tidak kalah saing dengan produk luar negeri (impor). Promosi produk dalam negeri di Kabupaten Majalengka dilaksanakan melalui 5 event atau pameran, antara lain:

1. Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) yang dilaksanakan pada Tanggal 28 s.d. 30 Juni 2024.
2. Pekan Olahraga dan Seni Tradisional (Porsenitas) yang dilaksanakan pada Tanggal 9 s.d. 12 Juli 2024.
3. Pameran pada kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang dilaksanakan pada Tanggal 10 s.d. 12 September 2024.
4. *West Java Expo 2024* yang dilaksanakan pada Tanggal 11 s.d. 13 Oktober 2024.
5. Pasar Minggon Industri dan Perdagangan (Pasamoan) yang dilaksanakan pada Tanggal 12 s.d. 13 Oktober.

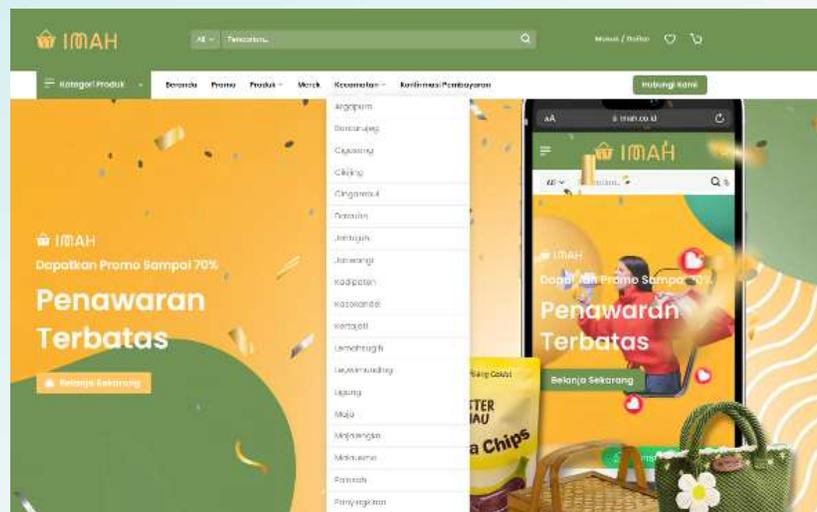




Pada kelima kegiatan tersebut dipromosikan produk-produk lokal 90 UMKM yang ada di Kabupaten Majalengka.

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka juga telah meluncurkan 3 inovasi yang bertujuan untuk mendukung UMKM dan produk lokal Majalengka, diantaranya:

1. Imah (Inovasi Majalengka Hebring) melalui *website imah.co.id* sebagai *online store* yang dapat mendekatkan produk lokal dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka kepada masyarakat.



Gambar 3.7 Website *imah.co.id*

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2. MAJA Store (Maju Majalengka Store) merupakan toko dibawah naungan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang bertempat di Bandara Kertajati. Toko ini menampung berbagai macam produk seni (*art*) dan makanan lokal khas Kabupaten Majalengka sebagai oleh-oleh wisatawan nasional maupun internasional. Sehingga diharapkan dengan adanya toko ini produk lokal Majalengka dapat dikenal oleh masyarakat luas.
3. Pojok Imah merupakan promosi dengan konsep “*little store corner*” atau rak kecil estetik tempat menyimpan berbagai macam produk UMKM. Pojok Imah ini sudah ada di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) dan hotel-hotel yang ada di Kabupaten Majalengka seperti Hotel Horison Kertajati, Hotel Fieris Kertajati, Hotel Fitra Majalengka dan di Bank BJB Majalengka. Selain dipajang, produk-produk ini juga dapat dibeli langsung dengan metode pembayaran QRIS sehingga dapat lebih mudah dalam bertransaksi.





Ketiga inovasi tersebut merupakan wujud dari kolaborasi berbagai pihak antara lain TP PKK Majalengka, Dekranasda Majalengka, Dinas PMD Kabupaten Majalengka, Dinas Perdagin Kabupaten Majalengka juga Perangkat Daerah lain termasuk hotel-hotel yang mendukung untuk penempatan Pojok Imah.

d. Meningkatkan Ekspor

Ekspor merupakan kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ekspor bermanfaat untuk memperluas jangkauan pasar di luar wilayah domestik yang memungkinkan adanya pelanggan baru atau permintaan yang lebih tinggi. Pada Tahun 2024 Kabupaten Majalengka telah mengekspor berbagai produk rotan, tekstil, elektronik/optik/logam/tembaga ke negara-negara di benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia dan Australia dengan total nilai FOB (*free on board*) sebesar 153.943.924 USD.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga telah melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor pada Tanggal 13 Juni 2025 di Hotel Archiera Jatiwangi yang dihadiri oleh 50 pelaku usaha ekspor dan pemateri dari Bea Cukai Cirebon. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku industri kecil dan menengah di Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan ekspor produknya ke luar negeri.



Gambar 3.8 Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian





Upaya yang akan dilakukan tahun mendatang untuk meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas informasi terkait harga bapakting secara akurat dan lebih luas tidak hanya pada pasar milik Pemda;
- b. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan tetap menjaga harga-harga bapakting dalam harga terjangkau;
- c. Mereviu kembali tempat distribusi perdagangan yang ada saat ini, apabila dirasa tidak efektif bisa menggunakan metode lain misalnya membuat Pasar Induk di Majalengka serta merambah pasar online untuk memotong jaringan distribusi dari produsen langsung ke konsumen;
- d. Mengembangkan dan mengoptimalkan aplikasi imah.co.id, inovasi Maja Store dan Pojok Imah;
- e. Melakukan identifikasi potensi ekspor, meningkatkan kualitas dan standarisasi produk, pemberian insentif dan kemudahan perizinan serta memfasilitasi akses ke pasar internasional untuk meningkatkan ekspor di Kabupaten Majalengka.

## **2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diukur dengan indikator PDRB akomodasi dan makan minum yang pada Tahun 2024 menyumbang 860,54 miliar. Realisasi tersebut meningkat 76,18 miliar dari tahun sebelumnya, meskipun **laju pertumbuhannya melambat 1,13% dari tahun sebelumnya dengan Tahun 2024 sebesar 9,71%**. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan antara lain:

- a. Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Pada Tahun 2024 objek wisata di Kabupaten Majalengka bertambah 4 objek wisata dari tahun sebelumnya, sehingga saat ini terdapat 54 objek wisata di Kabupaten Majalengka yang menyajikan berbagai keindahan alam. Situ Cipanten menjadi objek wisata alam yang paling banyak dikunjungi pada Tahun 2024 dengan angka kunjungan mencapai 155.242 wisatawan.





Gambar 3.9 Obyek Wisata Situ Cipanten  
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Selain objek wisata, kegiatan kepariwisataan juga ditunjang oleh akomodasi perhotelan yang memadai. Terdapat 30 hotel di Kabupaten Majalengka serta 33 tempat makan (*restaurant*) dengan berbagai konsep yang siap menjadi faktor penunjang daya tarik wisata di Kabupaten Majalengka.

#### b. Meningkatkan Pemasaran Wisata

Promosi wisata merupakan bentuk komunikasi pemasaran dalam pariwisata yang tujuannya untuk memengaruhi target wisatawan agar berkunjung ke daerah wisata yang dipromosikan. Promosi wisata juga menjadi suatu hal yang penting karena dapat menentukan citra suatu daerah terkait kepariwisataannya. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melaksanakan beberapa kegiatan promosi wisata antara lain mempublikasikan informasi wisata. Informasi wisata merupakan panduan yang memberikan pengetahuan tentang suatu destinasi wisata, fasilitas, aktivitas, serta hal-hal praktis yang diperlukan wisatawan untuk merencanakan dan menikmati perjalanan mereka. Tujuannya adalah memudahkan wisatawan memahami sesuatu yang ditawarkan tempat wisata, cara mengaksesnya, dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama berkunjung. Pada Tahun 2024





Disparbud telah melakukan publikasi sebanyak 504 postingan yang di publikasi melalui media sosial instagram disparbudmajalengka dan tiktok @disparbudmajalengka dan *website* resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka <https://disparbud.majalengkakab.go.id/>.



Gambar 3.10 Promosi Wisata  
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Promosi pariwisata juga dilakukan melalui event dan pameran. Pada Tahun 2024 ada 3 event yang dimanfaatkan untuk promosi destinasi pariwisata yaitu:

1. Peresmian Makam Pahlawan KH. Abdul Chalim yang dilaksanakan di Desa Leuwimunding yang mempromosikan Desa Wisata Religi.
2. Nyiramkeun Pusaka Karuhun Nunuk dan Gelar Adat Budaya ke 553 Tahun Nunuk di Desa Nunuk Baru yang mempromosikan Desa Wisata Nunuk dan Tenun Gadod.
3. Festival Pecunan di Desa Jatitujuh.

Pada tiga event tersebut dipromosikan pula destinasi wisata unggulan di Kabupaten Majalengka seperti Situ Cipanten, Terasing Panyaweuyan, Paralayang Gunung Panten, Cikadongdong River Tubing, Jembar Waterpark, Aryakibans, Tirta Indah, Sawah Bengkok, Curug Cipeuteuy, Buper Panten, Prabu Siliwangi, Taman Rekreasi Keliling Dunia, Bee Park, Ciboer Pass, Jatitujuh Canal Trip, Kanaga Hill, Pendakian Gunung Ciremai via Apuy, Situ Ciranca, Anggur Brazil Gentar, dan Curug Ibum Pelangi.





Selain tempat wisata, produk ekonomi kreatif dan budaya juga menjadi daya tarik pariwisata yang perlu dipromosikan. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan promosi produk ekraf pada 3 event yaitu:

- Festival Hajj 2024 di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati (BIJB).
- Saresehan Ekonomi Kreatif di Gedung Bina Asih Disparbud Kabupaten Majalengka.
- Pakauland 3 Gelar Produk Kreatif di Disparbud Kabupaten Majalengka.

Produk ekonomi kreatif yang dipromosikan antara lain Batik Miranti dan Batik Herty Elit, Anyaman Bambu, Kerajinan Tangan, Makanan dan Produk Olahan, seperti Bolu Mangga dan Kecap Segi Tiga.

Kemudian promosi budaya dilaksanakan pada 9 event yaitu:

1. Festival Kota Angin di Kabupaten Majalengka
2. Festival Desa Nunuk di Desa Nunuk Baru, Kecamatan Maja
3. Nyiramkeun Pusaka Talaga Manggung di Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga
4. Ngalaksa di Desa Borogjol, Kecamatan Lemahsugih
5. Festival Kampung Kaputren di Kampung Kaputren, Desa Puridalem, Kecamatan Jatitujuh
6. Festival Kampungan di Desa Bongas, Kecamatan Sumberjaya
7. Rampak Genteng di Kecamatan Jatiwangi
8. Festival Kawin Batu di Desa Girimukti, Kecamatan Kasokandel
9. Pakauland 3 di Aula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Majalengka

Budaya yang dipromosikan yaitu Seni Sampyong, Tari Topeng Wuwung Kawangi, Tari Tenun Gadod, Tari Belentung, dan Pusaka Talaga Manggung.

Agar destinasi pariwisata yang dipromosikan semakin banyak dan beragam, maka diperlukan data wisata sebagai basis pengambilan keputusan dalam mengembangkan tempat wisata yang potensial berdasarkan preferensi wisatawan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menyusun data wisata lengkap dengan jumlah kunjungan setiap bulannya. Data tersebut digunakan untuk memahami tren, merencanakan pengembangan, dan meningkatkan pengelolaan sektor pariwisata.





Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga telah membangun berbagai kerjasama seperti Kerjasama Peningkatan Kapasitas Bahasa Asing yang melibatkan pengelola wisata di Paralayang Gunung Panten dan Gapura Wisata, akademisi dari SMKN 1 Kadipaten dan SMKN 1 Palasah dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dalam hal kerja sama ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan selaku pengguna barang, penyedia tempat PKL serta penyedia instruktur, tempat dan modul.

c. Mengembangkan Ekonomi Kreatif

Untuk mendukung para pelaku ekonomi kreatif, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan pelatihan bagi para pelaku ekonomi kreatif sebanyak 4 kali selama Tahun 2024. Hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM ekonomi kreatif untuk mengembangkan ekosistem kreatif, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta menumbuhkan kewirausahaan dalam pengembangan produk dan layanan inovatif. Berikut pelatihan yang dilaksanakan pada Tahun 2024:

- Sosialisasi Program Usaha Dukungan Keuangan (Udunan) dan pendampingan pendaftaran NIB, HaKI, penyusunan laporan keuangan dan *business plan* pada 8 Mei 2024 bertempat di Gedung Bina Asih Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan peserta 80 pelaku ekonomi kreatif dari 17 sub sektor.
- Sosialisasi dan pendampingan Program Usaha Dukungan Keuangan (Udunan) pada 4 juni 2024 bertempat di Gedung Bina Asih Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan peserta 19 pelaku ekonomi kreatif dari 17 sub sektor.
- *Workshop* Fotografi, Pemasaran Digital dan Penyelenggaraan *Event* dalam rangka Peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional pada 24 s.d. 31 Oktober 2024 di Majalengka *Creative Center* dengan peserta 80 orang pelaku ekonomi kreatif dari 17 sub sektor.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga aktif memberikan dukungan kegiatan dan fasilitas pada beberapa event yang melibatkan para pelaku ekonomi kreatif.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Majalengka juga membina calon desa kreatif. Desa Kreatif merupakan desa yang memanfaatkan





potensi/keunggulan desa tersebut untuk dikelola secara bersama-sama oleh aktor ekonomi kreatif sehingga dapat menciptakan inovasi yang bersumber dari potensi/keunggulan desa tersebut dengan tujuan memperkuat identitas lokal, menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan daya saing daerah. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan pembinaan Desa Kreatif di Desa Nanggerang Kecamatan Leuwimunding melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di Rumah Produksi Anyaman Bambu. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pemetaan dan identifikasi potensi Desa Nanggerang sebagai desa kreatif. Pada kegiatan ini pula Pemerintah Kabupaten Majalengka berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

d. Aktivasi Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan/kreativitas intelektual atau dikenal dengan istilah paten. Pada Tahun 2024 Batik Jagat Maja berhasil mendapatkan HKI (Merk Cipta). Batik Jagat Maja merupakan motif batik Majalengka yang menggambarkan potensi dan sejarah Majalengka. Motif buah maja, daun maja dan bunganya menjadi asal usul nama Majalengka, sedangkan motif terasering, genting, palawija, kopi, anyaman bambu dan rotan merupakan potensi Majalengka. Ada pula desain Angin Muih pada Batik Jagat Maja yang diambil dari julukan Majalengka sebagai Kota Angin. Keberadaan HKI bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan, karena jika ide kreatif yang sudah dipatenkan dipakai oleh orang lain, maka orang lain tersebut harus membayarkan royalti sesuai dengan ketentuan.



Gambar 3.11 Promosi Batik Maja  
Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian





Upaya yang akan dilakukan tahun mendatang untuk meningkatkan produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu:

- a. Membuat kampung inggris sebagai objek wisata dan edukasi. Selama ini kampung inggris yang populer ada di Jawa Timur dan baru-baru ini ada di Yogyakarta, dengan adanya kampung inggris di Kab. Majalengka diharapkan menjadi alternatif kampung inggris yang lebih dekat bagi daerah Jawa Barat;
- b. Membina dan mengembangkan komunitas-komunitas wisata baik secara daring dan luring sebagai pilar perkembangan dan penyebaran informasi wisata di Kabupaten Majalengka;
- c. Tidak hanya mengeksplorasi destinasi wisata terbaru namun infrastruktur penunjang seperti akses ke tempat wisata dan tempat penunjang lainnya perlu menjadi prioritas Kabupaten Majalengka kedepannya jika ingin meningkatkan produktivitas sektor pariwisata;
- d. Meningkatkan pelatihan dan kompetensi bagi pelaku pariwisata serta memperbanyak paket trip ke Majalengka;
- e. Mengintegrasikan tempat wisata dengan para pelaku ekonomi kreatif serta melakukan *campaign* untuk warga Majalengka menggunakan produk dari para pengusaha ekonomi kreatif.

### **3. Meningkatnya Investasi**

Terkait dengan investasi, diukur dengan indikator nilai realisasi investasi yang pada Tahun 2024 menyumbang 3,595 triliun. Realisasi tersebut meningkat 446 miliar dari tahun sebelumnya dan melebihi target yang telah ditetapkan 3.150 triliun sehingga capaiannya 114,15%. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) antara lain:

#### **a. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penanaman Modal**

Pemerintah Kabupaten Majalengka mempunyai tugas dalam pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada penanam modal/pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha telah sesuai dengan standar. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko. Kemudian ada pula terkait kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk mencegah atau





mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal, termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal.

Sampai dengan Tahun 2024 ada 85.248 perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Majalengka. Perusahaan-perusahaan tersebut sebagian besar bergerak di bidang industri produk makanan dan perdagangan. Pada Tahun 2024 Dinas PMPTSP melaksanakan inspeksi lapangan ke 49 perusahaan. Inspeksi tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui keseriusan perusahaan dalam menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan perkembangan realisasi investasinya. Selain itu Dinas PMPTSP juga melaksanakan pembinaan ke 184 perusahaan sebagai upaya untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut melaksanakan kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai dengan ketentuan. Pada Tahun 2024 Dinas PMPTSP juga melaksanakan bimbingan teknis dan lokakarya non sertifikasi untuk meningkatkan pemahaman terkait ketentuan dan mekanisme dalam pelaksanaan penanaman modal dan dalam melaksanakan kewajiban penyampaian LKPM. Dinas PMPTSP juga selalu menghimbau pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM setiap triwulan melalui media sosial instagram [dpmpmsp.majalengka](https://www.instagram.com/dpmpmsp.majalengka).



Gambar 3.12 Inspeksi Lapangan ke PT. Harapan Global Apparel  
Sumber : Dinas PMPTSP





Kemudian Dinas PMPTSP juga berperan dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Pada Tahun 2024 Dinas PMPTSP telah memfasilitasi 132 perusahaan yang menemui permasalahan dan hambatan. Sebagian besar permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu terkait perizinan dasar seperti keperluan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Hasilnya perusahaan-perusahaan tersebut dibina untuk memenuhi persyaratan dasar agar selanjutnya bisa mendapatkan PBG dan SLF.

b. Meningkatkan Media Promosi Penanaman Modal

Untuk meningkatkan realisasi investasi, Dinas PMPTSP secara aktif melakukan promosi investasi melalui berbagai kegiatan dan pameran serta aktif di media sosial. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian calon investor terhadap peluang investasi di Kabupaten Majalengka. Pada Tahun 2024 Dinas PMPTSP telah mengikuti 2 kegiatan yang dimanfaatkan untuk promosi investasi, yaitu *West Java Investment Summit (WJIS)* di Bandung dan Festival Pelayanan Publik 1.0 di Kabupaten Majalengka.



Gambar 3.13 Festival Pelayanan Publik  
Sumber : Sekretariat Daerah





Upaya yang akan dilakukan tahun mendatang untuk meningkatkan investasi yaitu:

- a. Membentuk klinik investasi;
- b. Meningkatkan kompetensi pegawai yang berhubungan langsung dengan investor;
- c. Menyederhanakan proses perizinan;
- d. Memberikan insentif bagi investor dan memberikan kemudahan perizinan melalui optimalisasi MPP serta menunjukkan kredibilitas dan transparansi birokrasi di Kab. Majalengka;
- e. Meningkatkan promosi investasi.

#### **4. Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja**

Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp338.276.130,00, padahal target Tahun 2024 sebesar Rp338.000.000,00 sehingga capaiannya sebesar 100,08%. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM (Dinas K2UKM) telah melaksanakan upaya, antara lain:

- a. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja



Gambar 3.14 Peresmian Balai Latihan Kerja “Cakraningrat”  
Sumber : DK2UKM





Semakin tinggi kompetensi tenaga kerja maka produktivitas kerja akan otomatis semakin tinggi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja perlu dilaksanakan pelatihan untuk para pencari kerja atau calon tenaga kerja. Pada Tahun 2024 telah didirikan Balai Latihan Kerja (BLK) Cakraningrat Kabupaten Majalengka dengan memanfaatkan bangunan yang lokasinya berada di Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) di Desa Cikasarung Kecamatan Majalengka, yang telah diresmikan oleh Pj. Bupati Majalengka. Sebelumnya Kabupaten Majalengka termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang belum memiliki BLK. BLK merupakan sarana yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja maupun wirausaha.

Sejak berdiri pada September 2024, sampai dengan akhir Desember 2024, BLK telah melakukan kegiatan pelatihan sebanyak 2 kali yaitu:

1. Tanggal 24 September 2024 s.d. 4 November 2024 telah dilaksanakan pelatihan kepada calon tenaga kerja sebanyak 550 orang dengan rincian pelatihan menjahit sebanyak 300 orang, pelatihan tataboga sebanyak 150 orang dan pelatihan perbengkelan sebanyak 100 orang. Dari total calon tenaga kerja yang telah dilatih, sebanyak 200 orang telah terserap di berbagai perusahaan dan 350 orang disiapkan untuk wirausaha.
2. Tanggal 13 s.d. 15 November 2024 telah dilaksanakan pelatihan komputer kepada calon tenaga kerja sebanyak 80 orang. Seluruh peserta pelatihan tersebut berhasil ditempatkan di PT. Kharisma Indah Bestari Majalengka.

Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja juga bisa didapatkan melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta. Menurut Permenaker RI Nomor 6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “LPK Swasta menjadi lembaga yang akan mewadahi kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan keahlian khusus agar dapat bersaing di era globalisasi”. Sampai dengan Tahun 2024 ada 48 LPK swasta di Kabupaten Majalengka. LPK swasta ini mengadakan pelatihan berbagai macam kejuruan yang dapat diikuti oleh calon tenaga kerja. Dinas K2UKM juga telah membina 20 LPK swasta





yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pelatih dan instruktur, membantu LPK menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja, membantu LPK mendapatkan akreditasi, membantu LPK mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, membantu LPK menjalin kerja sama dengan industri, membantu LPK mengelola lembaganya dengan lebih baik, membantu LPK mencetak tenaga kerja yang unggul.

b. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri

Pada Tahun 2024 telah diidentifikasi terdapat 7.209 lowongan pekerjaan dan 15.313 pencari kerja yang terdaftar di Dinas K2UKM Kabupaten Majalengka. Hal ini tentunya memunculkan gap yang cukup besar antara lowongan dan pencari kerja. Oleh karena itu sebagai upaya untuk mendekatkan perusahaan dengan pencari kerja, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan bursa kerja (*job fair*), diantaranya:

1. Pada 27 Februari Tahun 2024 telah dilaksanakan bursa kerja bertempat di Taman Bagja Raharja yang diikuti oleh 22 perusahaan dan 2.131 orang pencari kerja dengan 4.036 lowongan kerja. Dari bursa kerja ini sebanyak 1.834 pencari kerja berhasil ditempatkan.
2. Pada 28 Mei Tahun 2024 telah dilaksanakan bursa kerja bertempat di SMKN 1 Majalengka yang diikuti oleh 23 perusahaan dan 4.495 orang pencari kerja dengan 2.318 lowongan kerja. Dari bursa kerja ini sebanyak 2.031 pencari kerja berhasil ditempatkan.
3. Pada 24 September Tahun 2024 telah dilaksanakan bursa kerja bertempat di Balai Latihan Kerja (BLK) yang diikuti oleh 30 perusahaan dan 4.718 orang pencari kerja dengan 855 lowongan kerja. Dari bursa kerja ini sebanyak 684 pencari kerja berhasil ditempatkan.

Adapun program-program yang mendukung capaian indikator ini, yaitu:

Tabel 3.10 Program yang Mendukung IKU 7

No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	365.000.000	351.385.960





2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.153.488.000	2.136.785.841
3.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	106.364.000	106.356.000
4.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	391.820.000	291.664.849
5.	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	788.271.400	778.592.512
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	57.500.000	57.500.000
7.	Program Pengembangan UMKM	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	571.222.800	571.222.800
8.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	185.000.000	178.333.500
9.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	12.482.892.000	12.289.821.723
10.	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.420.966.000	1.297.937.070
11.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.631.962.600	2.590.997.550
12.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	637.870.000	615.386.852
13.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	303.000.000	301.420.000





14.	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	731.712.626	731.692.000
15.	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	490.679.000	488.051.500
16.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.884.076.657	3.874.190.300
17.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	527.555.990	523.497.590

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Nilai PDRB (ADHK) pada sasaran Meningkatnya Produktivitas Daerah tidak ada karena IKU hanya mencapai 99,45%.



## MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS DAERAH

### CAPAIAN 2024



### PERBANDINGAN DENGAN



### FAKTOR

Yang mempengaruhi

- ❖ Ketersediaan Lapangan Pekerjaan
- ❖ Ketidaksesuaian Keterampilan dan Kebutuhan Pasar
- ❖ Meningkatnya Investasi
- ❖ Akses terhadap modal Usaha

### PROGRAM

Yang mendukung

- ❖ Program Pelayanan Penanaman Modal
- ❖ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- ❖ Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- ❖ Program Penempatan Tenaga Kerja

### EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja indikator ini sebesar 0,73%

### TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA





## SASARAN 6:

### MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS DAERAH

Sasaran ini diukur dengan **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** yang merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Yang dimaksud penganggur adalah penduduk yang tidak bekerja (sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena alasan putus asa dan sudah mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja). Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja (berumur 15 tahun keatas) yang bekerja (termasuk yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran. Sedangkan yang bukan Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Orang yang bekerja menurut BPS adalah memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu, termasuk kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator kinerja ini adalah Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### Tingkat Pengangguran Terbuka



Gambar 3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber : BPS Majalengka



Pemerintah Kabupaten Majalengka menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 di angka 4,44% sedangkan realisasi pada bulan Agustus Tahun 2024 sebesar 4,01% **sehingga capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 110,72%**. Jumlah Angkatan kerja pada Tahun 2024 sebanyak 739.144 orang dengan penduduk yang bekerja sebanyak 709.500 orang, masih terdapat 29.644 orang yang menganggur di Kabupaten Majalengka.

Pada Tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan jika **dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023**. Pada Tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka sebesar 4,12% sedangkan di Tahun 2024 sebesar 4,01%, hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan realisasi yang turun 0,11% berdasarkan data Tahun 2023. Jika capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 maka capaian Tahun 2024 lebih baik sebesar 1,98% hal ini dikarenakan capaian pada Tahun 2024 sebesar 110,72% dan capaian pada Tahun 2023 sebesar 108,74%. Jumlah Angkatan kerja meningkat 19.652 orang dan penduduk yang bekerja meningkat 19.679 orang.

**Target akhir RPD di Tahun 2026 adalah 4,37 dengan capaian 108,98%**, hal ini menunjukkan bahwa target akhir RPD telah tercapai **sehingga perlu dilakukan perbaikan target di Tahun 2025** agar penetapan target lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024.



Gambar 3.2 TPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Sumber : BPS Majalengka

Menurut data BPS jika **dibandingkan dengan Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat**, Kabupaten Majalengka berada di urutan ke 4 (empat) lebih baik daripada Kabupaten/Kota di Provinsi





Jawa Barat. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat yaitu 6,75 lebih tinggi 2,74 dari Kabupaten Majalengka.

Terdapat beberapa **faktor yang dapat memengaruhi** keberhasilan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka diantaranya Ketersediaan Lapangan Pekerjaan, Kesesuaian Keterampilan dan Kebutuhan Pasar, Peningkatan Investasi, peningkatan daya saing UMKM dan peningkatan produktivitas pertanian.

### 1. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan



Gambar 3.3 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan  
Sumber : BPS Majalengka

Pada Tahun 2024 penduduk yang bekerja di Kabupaten Majalengka terdapat 709.500 dan 29.644 orang pengangguran terbuka. **Namun penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah**, sebanyak 321.796 lulusan SD, 133.398 lulusan SMP, 98.446 lulusan SMA, 92.324 lulusan SMK, dan 63.536 lulusan D-III dan Universitas.

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyusun rencana tenaga kerja makro sebagai dasar rencana pembangunan ketenagakerjaan 5 (lima) tahun ke depan yang berbasis pendayagunaan tenaga kerja melalui pengendalian tambahan angkatan kerja baru, penciptaan kesempatan kerja sektoral, perencanaan pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan Jamsostek Ketenagakerjaan. Namun rencana tenaga kerja ini dapat direvisi secara berkala untuk menyesuaikan dengan berbagai kebijakan dan program yang ada serta perkembangan baru, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan daerah.





Gambar 3.4 Rencana Tenaga Kerja Makro  
Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Menengah Kecil

Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 telah **mengidentifikasi informasi lowongan kerja sebanyak 7.209 lowongan pekerjaan** yang didapat dari Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka, informasi tersebut disosialisasikan melalui Instagram Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Menengah Kecil.



Gambar 3.5 Informasi Lowongan Pekerjaan melalui Instagram  
Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Menengah Kecil

Untuk menyediakan lapangan pekerjaan Pemerintah Kabupaten Majalengka telah **menyelenggarakan job fair** sebanyak 3 kali yang dilaksanakan pada:



- a. Tanggal 27 februari 2024 yang bertempat di Taman Bagja Raharja yang diikuti oleh 22 perusahaan dan 2.131 orang pencari kerja dengan 4.036 lowongan kerja dan pada kegiatan tersebut berhasil menempatkan pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 1.834 orang.



Gambar 3.6 Job Fair 27 Februari 2024

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Menengah Kecil

- b. Tanggal 28 Mei 2024 bertempat SMKN 1 Majalengka yang diikuti oleh 23 perusahaan dan 4.495 orang pencari kerja dengan 2.318 lowongan kerja, pada kegiatan tersebut berhasil menempatkan pencari kerja sebanyak 2.031 orang.



Gambar 3.7 Job Fair 28 Mei 2024

Sumber : DK2UKM

- c. Tanggal 24 September 2024 bertempat di Balai Latihan Kerja (BLK) yang diikuti oleh 30 perusahaan dan 4.718 orang pencari kerja dengan 855 lowongan kerja, pada kegiatan tersebut berhasil menempatkan pencari kerja sebanyak 684 orang.





Gambar 3.8 Job Fair 24 September 2024  
Sumber : DK2UKM

Selain itu, untuk menyediakan lapangan pekerjaan Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan **program Padat Karya Tunai** di 16 lokasi yang berhasil menyerap tenaga kerja 10.716 orang. Meskipun program ini bersifat jangka pendek namun berhasil menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan melibatkan masyarakat dalam proyek infrastruktur seperti Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.



Gambar 3.9 Padat Karya Tunai di Kecamatan Leuwimunding  
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Upaya yang akan dilakukan ditahun mendatang untuk meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Majalengka adalah:

- a. Meningkatkan kegiatan identifikasi lowongan kerja kepada Perusahaan-perusahaan dan mensosialisasikan lebih intensif kepada masyarakat melalui berbagai kanal (termasuk via WA dan email);
- b. Meningkatkan jumlah *job fair* baik itu yang diadakan oleh Pemkab maupun bekerjasama dengan BLKK;





- c. Bekerjasama untuk melakukan rekrutmen langsung dengan Perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten Majalengka;
- d. Menyelenggarakan bursa kerja *online*.

## 2. Kesesuaian keterampilan dan kebutuhan pasar

Untuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka tidak cukup dengan menyediakan lapangan pekerjaan, namun diperlukan juga keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar sebagai upaya mengurangi pengangguran struktural. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah **mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) Cakraningrat** dengan memanfaatkan bangunan yang lokasinya berada di Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) di Desa Cikasarung, Kecamatan Majalengka. BLK merupakan sarana yang sangat penting untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja maupun wirausaha.



Gambar 3.10 Balai Latihan Kerja Cakraningrat  
Sumber : Sekretariat Daerah

Pada Tanggal 24 September 2024 telah dilaksanakan pelatihan menjahit dengan peserta 300 orang, pelatihan tataboga dengan peserta 150 orang, dan pelatihan perbengkelan sebanyak 100 orang, sehingga total peserta pelatihan adalah 550 orang. Berdasarkan pelatihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berhasil menempatkan sebanyak 200 orang di berbagai Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka dan sebanyak 350 orang disiapkan





untuk wirausaha. Selain itu, pada Tanggal 13 November 2024 telah dilaksanakan pelatihan komputer dengan peserta 80 orang, seluruh peserta pelatihan tersebut telah berhasil ditempatkan di PT Kharisma Indah Bestari Majalengka.



Gambar 3.11 Pelatihan Keterampilan Kejuruan Sigaret Kretek Tangan  
Sumber : Sekretariat Daerah

Untuk meningkatkan keterampilan dan kesesuaian dengan kebutuhan pasar pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka juga telah melaksanakan **pelatihan Uji Kompetensi Tenaga Kerja (UJK) Kejuruan Junior Office Operator Kawasan Buruh Tani Tembakau** kepada 780 orang, pelatihan keterampilan kejuruan sigaret kretek tangan bagi calon pekerja buruh pabrik PT. Kharisma Indah Bestari.

Upaya yang akan dilakukan ditahun mendatang untuk meningkatkan keterampilan dan kesesuaian dengan kebutuhan pasar di Kabupaten Majalengka adalah:

- a. Menambah jumlah kegiatan pelatihan di Balai Latihan Kerja;
- b. Meningkatkan Kerjasama dengan Perusahaan terkait penerimaan pekerja yang bersertifikat Balai Latihan Kerja;
- c. Meningkatkan jumlah Sarana Prasarana dan jenis pelatihan di Balai Latihan Kerja;
- d. Meningkatkan Program Magang pada Perusahaan maupun instansi pemerintah;
- e. Membuat pelatihan *online* seperti kelas-kelas bersertifikat yang dapat meningkatkan kompetensi Angkatan kerja.





### 3. Peningkatan investasi

Salah satu faktor keberhasilan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka salah satunya yaitu **meningkatnya Nilai realisasi investasi**, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka menargetkan nilai realisasi investasi sebesar 3,150 Trilyun dan berhasil direalisasikan 3,595 Trilyun sehingga capaian kinerja menjadi 114,15%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengawasan terhadap penanaman modal yang berupa inspeksi lapangan dan pendampingan ke Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Majalengka untuk mendorong Perusahaan melaksanakan kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).



Gambar 3.12 Pengawasan Penanaman Modal  
Sumber : DPMPTSP

Pada Tahun 2024 terdapat 21 Perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Majalengka terdiri dari 18 Penanam Modal Asing dan 3 Penanam Modal Dalam Negeri yang dapat menyerap 5.505 tenaga kerja Indonesia. Proyek yang dikerjakan terdiri dari industri alas kaki, industri mainan, real estate, perumahan cipta, perdagangan material bangunan, Kawasan industri, dan industri *furniture*.

Pada Bulan Desember Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka **berhasil membangun Mal Pelayanan Publik (MPP)** yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Kabupaten Majalengka. MPP adalah konsep yang bertujuan untuk menyediakan berbagai layanan publik dalam satu lokasi terpadu, sehingga memudahkan masyarakat mengakses layanan tersebut. Salah satu manfaat adanya Mal Pelayanan Publik yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi iklim investasi dengan menyederhanakan proses perizinan dan administrasi yang terintegrasi membuat proses investasi menjadi lebih efektif dan efisien.



MPP di Kabupaten Majalengka saat ini memiliki 14 Loker dan 47 Layanan yang terdiri dari DPMPTSP, Disdukcapil, Dinsos, DK2UKM, Bapenda, Disdik, Dinkes, Dishub, BJB, Dinas LH, Kantor Imigrasi, ATR/BPN, Dinas PUTR, dan Kemenag. Namun **pengunjung yang mendapatkan pelayanan masih didominasi oleh Disdukcapil** sehingga kedepannya perlu perhatian khusus untuk meningkatkan jumlah kunjungan yang ingin berinvestasi di Kabupaten Majalengka agar dapat meningkatkan lebih banyak lowongan pekerjaan.



Gambar 3.13 Jumlah Kunjungan MPP periode Februari-Maret 2025  
Sumber : Website MPP

**Upaya yang akan dilakukan ditahun mendatang** untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Majalengka adalah:

- Membuat regulasi yang lebih jelas dan sederhana;
- Membuat klinik investasi di MPP;
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi bagi petugas untuk menarik investor;
- Meningkatkan promosi investasi;
- Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk memudahkan akses pelaku usaha;
- Memberikan insentif bagi investor dan memberikan kemudahan perizinan melalui optimalisasi MPP serta menunjukkan kredibilitas dan transparansi birokrasi di Kab. Majalengka.

#### **4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Faktor keberhasilan lainnya yang dapat menekan Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Majalengka selain dari sisi ketersediaan lapangan kerja dan kesesuaian kompetensi pekerja dengan kebutuhan pasar yaitu adanya **peningkatan daya saing**





**UMKM** sehingga tidak hanya membuat lapangan kerja bagi diri sendiri bahkan dapat membuat lapangan kerja bagi orang lain.

Dengan meningkatnya daya saing UMKM akan menciptakan lapangan kerja baru dan berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran, UMKM merupakan alternatif strategi ketika sektor formal seperti Perusahaan besar belum dapat menyerap seluruh angkatan kerja. Seiring UMKM tumbuh dan berkembang akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk meningkatkan produksi, pemasaran dan distribusi.



Gambar 3.14 Pendampingan Pengajuan NIB  
Sumber : DK2UKM

Pada Tahun 2024 terdapat 48.866 UMKM yang telah memiliki NIB dari total jumlah UMKM sebesar 74.691 atau sekitar 65,52%. Hal tersebut dapat terwujud dikarenakan Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan **pendampingan secara intensif** dengan cara sosialisasi tata cara pengajuan NIB kepada 375 orang pada Bulan Februari, Juli dan Oktober 2024 yang berlokasi di Kecamatan Jatitujuh, Kecamatan Sindangwangi dan Kecamatan Sukahaji.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan **pelatihan pemasaran usaha secara digital**, hal ini menjawab perkembangan zaman yang merubah perilaku konsumen menjadi serba digital. Kegiatan ini diikuti oleh pelaku UMKM, pelaku Usaha Kecil dan Calon Wirausaha sebanyak 320 orang pada Tanggal 5-10 Agustus 2024 yang bertempat di Fieris Hotel Kertajati Majalengka.





Gambar 3.15 Pelatihan Pemasaran Digital

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Menengah Kecil

Upaya yang akan dilakukan ditahun mendatang untuk meningkatkan daya saing UMKM untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Majalengka adalah:

- a. Meningkatkan kepemilikan NIB bagi UMKM yang belum memiliki NIB sehingga usahanya akan terus tumbuh dan berkembang;
- b. Meningkatkan berbagai jenis pelatihan yang dapat membantu perkembangan UMKM dan membuka akses ke pasar yang lebih luas;
- c. Meningkatkan akses terhadap permodalan dengan bunga yang terjangkau agar semakin banyak UMKM yang dapat berkembang.

Intervensi Pemerintah Kabupaten Majalengka juga menjadi faktor keberhasilan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui **program-program** sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 Program yang Mendukung IKU 8

No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	527.555.990	523.497.590
2.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	585.147.000	521.071.000
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	18.790.505.650	18.709.356.950





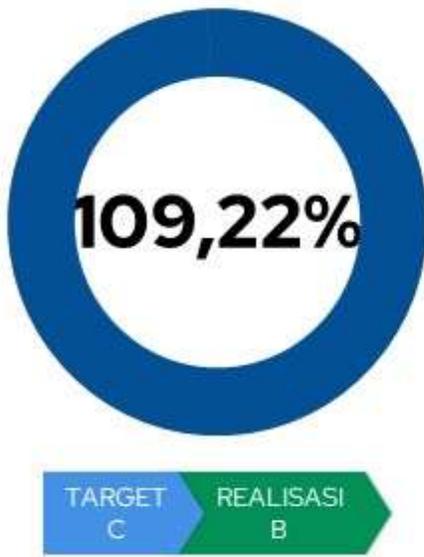
No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	416.463.948	415.894.900

**Efisiensi** anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada sasaran Meningkatnya Produktivitas Daerah yaitu 0,73% atau sebesar Rp149.852.148,00 dari pagu anggaran Rp20.319.672.588,00 dengan realisasi Rp20.169.820.440,00.



## MENINGKATNYA KONDUSIFITAS WILAYAH

### CAPAIAN 2024



### PERBANDINGAN DENGAN



### FAKTOR

Yang mempengaruhi

- ❖ Berkurangnya Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada
- ❖ Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- ❖ Meningkatnya Kualitas SDM Satpol PP
- ❖ Meningkatnya Perlindungan Masyarakat
- ❖ Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Sesuai Ketentuan
- ❖ Berkurangnya Potensi Konflik Sosial
- ❖ Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa
- ❖ Meningkatnya Kualitas Informasi Rawan Bencana
- ❖ Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- ❖ Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana
- ❖ Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi

### PROGRAM

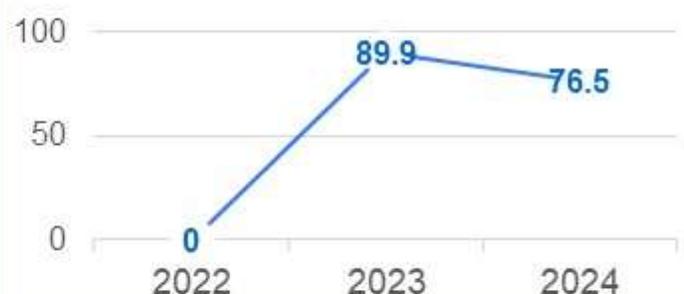
Yang mendukung

- ❖ Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- ❖ Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- ❖ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
- ❖ Program Penanggulangan Bencana

### EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja indikator ini sebesar **7,5%**

### INDEKS TRANTIBUM





## SASARAN 7:

### MENINGKATNYA KONDUSIFITAS WILAYAH

Sasaran ini diukur oleh Indeks Trantribum yang merupakan indikator yang digunakan untuk menilai Tingkat ketertiban dan ketentraman disuatu wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik itu dari aspek ketentraman dan ketertiban umum, kebencanaan dan konflik sosial. Formulasi perhitungan Indeks trantribum yaitu konversi dari jumlah koefisien capaian kinerja trantribum x 100 poin. Terdapat 5 predikat *range* angka per kategori yang ditentukan seperti Kategori A = 85 – 100 ; B = 71 – 84 ; C = 51 -70; D = 35 – 50 E = 0 - 34. Jika kategori yang didapat semakin tinggi maka situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat akan terwujud.

Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kecamatan.

#### Indeks Trantribum

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka berhasil mendapatkan predikat “B” dengan nilai 76,5 dari target predikat “C” sehingga **capaian indeks trantribum Tahun 2024 sebesar 109,22%** .

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2026 (Akhir RPD)	Realisasi Jawa Barat
70 Predikat C	76,5 Predikat B	89,9 Predikat A	85 Predikat A	-

Jika **dibandingkan dengan tahun sebelumnya**, capaian Tahun 2024 lebih rendah realisasinya sebesar 13,4 poin hal ini dikarenakan realisasi pada Tahun 2023 adalah 89,9% dan untuk capaian Tahun 2023 adalah 100% sehingga terdapat selisih 9,22% dengan capaian Tahun 2024. Perubahan formulasi pada Indikator Kinerja Utama di Satuan Polisi Pamong Praja dan Bada Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi penyebab penurunan kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Target akhir Indeks Trantribum pada RPD Tahun 2026 ditetapkan dengan predikat A atau sebesar 85,1, jika **dibandingkan realisasi Tahun 2024 dengan target akhir RPD** sudah mencapai 90,1%. Hal ini





menunjukkan, realisasi Tahun 2024 masih belum mencapai target RPD, dengan masih adanya waktu sampai dengan tahun akhir RPD diharapkan dengan upaya-upaya percepatan yang di tingkatkan diharapkan bisa mencapai target yang telah ditentukan.

Indikator ini tidak dapat **dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat** karena perbedaan formulasi perhitungan indeks trantribum di Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Sehingga Indikator ini tidak dapat dibandingkan.

Terdapat **faktor - faktor yang dapat menunjang keberhasilan** dalam meningkatkan kondusifitas wilayah, diantaranya:

### **1. Berkurangnya Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada**

Pengurangan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah bisa menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan mencapai target kondusifitas wilayah yang diantaranya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum yang efektif, dan adanya kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3.1 Penindakan Pelanggaran Perda  
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka **telah menangani pelanggaran perda** sebanyak (konfirmasi total dan rinciannya) 348, terdiri dari 35 orang terjaring operasi yustisi kependudukan dan Gerakan disiplin nasional, 31 orang terjaring penertiban pelaku prostitusi, 44 Orang gelandangan dan pengemis terjaring penertiban, dan 240 aduan masyarakat terkait Trantibum





telah ditangani. Sebagian besar pengaduan yang dilaporkan terkait adanya fenomena alam seperti pohon tumbang sebanyak 65 aduan, penertiban geng motor 52 aduan, penanganan ODGJ dan gelandangan sebanyak 49 aduan, penertiban anak sekolah 46 aduan dan pengaduan lain-lainnya sebanyak 23 aduan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka berhasil mengamankan 890,28 batang rokok ilegal yang telah beredar area Kabupaten Majalengka.



Gambar 3.2 Pengamanan Rokok Ilegal  
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk menertibkan administrasi kependudukan dan Gerakan disiplin, pada Tanggal 13 dan 14 Juni Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan operasi administrasi kependudukan dan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) di UD Putra TS dan Yogya Grand Majalengka dengan hasil 29 orang terjaring Razia. Kemudian pada Tanggal 30 dan 31 Juli Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan serupa di Pasar Jatiwangi dan Toserba Suray Jatiwangi dengan hasil 21 orang terjaring Razia.

Untuk mencegah terjadinya peningkatan pelanggaran perda dan perkara Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 telah melakukan sosialisasi kepada Pelanggar Perda dan mensosialisasikan jenis rokok ilegal kepada masyarakat.

**Upaya yang harus dilakukan dimasa** yang akan datang untuk terus menurunkan jumlah pelanggaran perda dan perkara yaitu

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Sosialisasi pemahaman peraturan daerah yang komprehensif kepada masyarakat salah satunya dengan mensosialisasikan perda dan perkara melalui spanduk, banner ataupun media sosial.





- b. Peningkatan kualitas SDM pegawai Satpol PP melalui bimbingan teknis dan uji kompetensi sehingga terdapat pegawai yang diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## **2. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Untuk menciptakan lingkungan yang aman perlu adanya penanganan terhadap gangguan trantibum. Dengan menyelesaikan gangguan trantibum, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan terjaganya ketentraman dan Ketertiban umum maka kondusifitas wilayah pun angkat meningkat.



Gambar 3.3 Pengamanan Unjuk Rasa  
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam upaya menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Majalengka, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan penanganan unjuk rasa. Selama proses unjuk rasa berlangsung Pemerintah Kabupaten Majalengka beserta Kepolisian Resort Kabupaten Majalengka berhasil menjaga keamanan dan ketertiban sehingga unjuk rasa berlangsung damai dan tidak ada kerusuhan.

Untuk mencegah terjadinya gangguan dan ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga telah melakukan koordinasi lintas sektoral dan Kerjasama antar Lembaga pada Tahun 2024.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan pemantauan potensi rawan gangguan trantibum. Pada Tahun 2024 juga Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan pengamanan hari hari tertentu dan hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru.





**Upaya yang harus dilakukan** untuk terus menurunkan gangguan trantibum di Kabupaten Majalengka dimasa yang akan datang, yaitu:

- a. Meningkatkan patroli terutama di tempat-tempat yang rawan terjadinya pelanggaran dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku.
- b. Meningkatkan kuantitas penertiban PKL, ODGJ dan Gepeng.
- c. Menambah sarana prasarana yang diperlukan untuk penanganan gangguan trantibum
- d. Sosialisasi terkait bahaya penyakit masyarakat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
- e. Meningkatkan penangan unjuk rasa yang humanis dan tidak berakhir rusuh

### **3. Meningkatkan kualitas SDM Satpol PP**

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah hal yang penting untuk memastikan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat.



Gambar 3.4 Pembinaan Anggota Satpol PP  
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berupaya meningkatkan **kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja** dengan cara membina anggota Satpol PP tentang kemampuan teknis sebanyak 2 kali dalam satu bulan sehingga pada kurun waktu satu tahun telah melakukan pembinaan sebanyak 24 kali dengan peserta 150 orang setiap kegiatan. Selain itu, telah melatih Anggota Pol PP tentang kemampuan dasar menjadi Satpol PP. Untuk melindungi dari resiko bahaya, anggota Satpol PP dan Damkar telah diikutsertakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perkotaan, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan pembinaan





anggota linmas yang sebanyak 90 orang. Linmas memiliki fungsi yang vital dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum yang bersentuhan langsung di masyarakat.

**Upaya** yang harus dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas SDM Satpol PP di Kabupaten Majalengka adalah

- a. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM aparat yang bertugas seperti mengadakan capacity building.
- b. Melakukan pelatihan penguatan fisik secara rutin.

#### **4. Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Sesuai Ketentuan**



Gambar 3.5 Evakuasi Kebakaran  
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

Penanggulangan Kebakaran dan non-kebakaran (seperti bencana alam, kecelakaan, atau keadaan darurat lainnya) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan efektivitas penanganan.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan pemadam kebakaran sebanyak 186 kejadian. Waktu tanggap (*response time*) dalam menangani kebakaran sangat krusial, di Tahun 2024 kejadian yang memenuhi *Respon Time* terdapat 98 kejadian saja sehingga kinerja Pemadam Kebakaran di Tahun 2024 hanya 52,69%. Mutu pelayanan dasar tingkat waktu tanggap Pemadam Kebakaran adalah 15 menit setelah mendapat informasi. Dengan waktu *respon time* yang relatif singkat yang hanya 15 menit banyak kendala yg mengakibatkan kejadian kebakaran yang tidak masuk dalam kategori penanganan kebakaran yang memenuhi *respon time* diantaranya:





- a. Luasnya wilayah manajemen kebakaran yang harus dijangkau;
- b. Kurangnya jumlah Anggota Pemadam Kebakaran;
- c. Kurangnya Armada Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.

Tidak hanya penanganan kebakarannya saja, langkah pencegahannya juga perlu ditingkatkan mulai dari memastikan tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan hidran di lokasi strategis seperti Gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan permukiman. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan inspeksi untuk memastikan APAR tidak melebihi batas waktu penggunaan.

Dengan adanya kendala-kendala yang di hadapi oleh Satuan Pemadam Kebakaran adapun upaya yang harus dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja Satuan Pemadam Kebakaran diantaranya:

- a. Menambah Anggota Pemadam Kebakaran
- b. Menambah Armada Mobil Pemadam Kebakaran yang layak operasional
- c. Mengirimkan anggota damkar untuk mengikuti diklat dan pelatihan dalam meningkatkan SDM dan profesionalisme tugas yang lebih baik.
- d. Memastikan seluruh lokasi strategis di Kabupaten Majalengka memiliki APAR yang belum kadaluarsa.
- e. Merelokasi titik sebaran kantor unit Pemadam kebakaran ke tempat yang lebih strategis sehingga menjangkau wilayah potensi terjadinya kebakaran.
- f. Memberikan Sosialisasi Pemahaman tentang bahaya Pemadam Kebakaran Pada Kabupaten Majalengka

## **5. Berkurangnya Potensi Konflik Sosial**

Penurunan Potensi Konflik Sosial yang meliputi Pemetaan konflik sosial di Masyarakat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama Mitra Kepolisian Resort Majalengka, Komandan Distrik 0617 Majalengka, Kejaksaan Negeri Majalengka, Yonif Raider Galuh Taruna 321, Danlanud S Sukani, Subdenpom Majalengka, Kodam III Siliwangi, Densus 88 Anti Teror, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis dan Perangkat Daerah terkait, berkolaborasi





untuk menekan potensi Konflik Sosial. Berkurangnya potensi konflik sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Meningkatkan Kemandirian dan Keberdayaan Ormas

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka yaitu sebanyak 115 Ormas. Dari 115 Ormas dilakukan pembinaan ke setiap Sekretariat Ormas sekaligus mensosialisasikan Peraturan Ormas. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka mengadakan kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Setiap ormas mengirimkan ketua, sekretaris dan bendahara mengikuti kegiatan pemberdayaan ormas yang diadakan mengikuti kegiatan pemberdayaan ormas yang diadakan di Obyek Wisata Cipanten dan Kiara Danu Kabupaten Majalengka.



Gambar 3.6 Pemberdayaan Ormas

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

b. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang kewaspadaan daerah

Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sosial yang muncul membutuhkan perhatian





dan pengetahuan yang cukup untuk mengatasi masalah secara cepat. Hal ini dapat membantu dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan masalah sosial yang mungkin muncul di masyarakat. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah sebuah forum yang dibentuk untuk mengumpulkan informasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang ancaman masyarakat atau ancaman lainnya, serta mengevaluasi kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi tersebut. Pembentukan FKDM sangat penting sebagai upaya pencegahan dan penanganan ancaman keamanan di wilayahnya. Untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pengembangan FKDM di Kabupaten Majalengka, telah dilaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya FKDM, memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi anggota FKDM, serta membentuk program reward bagi anggota FKDM yang aktif dan berprestasi. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama dalam memfasilitasi akses dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan oleh FKDM, seperti peralatan, transportasi, dan anggaran.



Gambar 3.7 Forum Kewaspadaan Dini  
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

FKDM di Kabupaten Majalengka sudah terbentuk sampai tingkat Kecamatan, terdiri dari 8 orang FKDM Kabupaten dan 3 orang FKDM setiap kecamatan. Tim Kewaspadaan Dini bertugas merencanakan, melaksanakan dan merumuskan





kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional dan memberikan rekomendasi kepada bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah. Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Majalengka sebanyak 47 Orang terdiri dari Pemda Majalengka, Polres Majalengka, Kodim 0617 Majalengka, Lanud S. Sukani, Kejaksaan Negeri Majalengka, Deninteldam Kodam III Siliwangi, Badan Intelijen Negara (BIN), Densus 88.

Untuk meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang kewaspadaan daerah diperlukan upaya sebagai berikut:

- a. Untuk merumuskan kembali *feedback* yang lebih nyata dirasakan bagi pemerintah dan masyarakat dari pelaksanaan kegiatan Meningkatkan kemandirian ormas
- b. Peningkatan Kuantitas, kualitas dan profesionalisme terhadap anggota kegiatan peningkatan Kemandirian dan Keberdayaan Ormas
- c. Menambah jumlah anggota FKDM di tingkat kabupaten dan tingkat Kecamatan
- d. Memberikan Sosialisasi Kepada anggota FKDM tentang informasi isu-isu ancaman terkini yang berkembang bagi masyarakat dan cara penanganan

## **6. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa**

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.





Gambar 3.8 Pembinaan Pendidikan Politik  
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pendidikan politik. Sasaran dari Kegiatan ini adalah Organisasi Perempuan di Kabupaten Majalengka. Pembinaan ini telah dilaksanakan bertempat di Aula Nyi Rambut Kasih Majalengka. Narasumbernya dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum serta dari Akademisi. Pembinaan pendidikan politik ini penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya generasi muda dalam pemilihan umum kegiatan ini belangsung **minimalnya satu kali** dilakukan dalam satu tahun.

Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahunnya menyalurkan bantuan dana hibah bagi sejumlah partai politik (Parpol) yang memiliki kursi sebagai wakil rakyat untuk kepentingan partai, dana hibah tersebut ditujukan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bantuan dana hibah kepada parpol tersebut digunakan untuk meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat. Dana hibah itu terdapat tiga bagian fungsinya, untuk pendidikan politik, kesekretariatan dan operasional. Namun, Parpol harus menggunakan 60 persen dari dana tersebut untuk pendidikan politik bagi masyarakat. Pemberian dana tersebut, berdasarkan PP No.5/2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Sesuai PP tersebut Pemkab Majalengka memberikan bantuan kepada parpol yang memiliki wakil di DPRD Majalengka berupa dana hibah dari APBD daerah. Jumlah bantuan kepada setiap parpol berbeda-beda,



ditentukan berdasarkan suara yang diperoleh partai politik itu sendiri pada saat pemilu. Dengan adanya pemberian hibah pihak penerima bertanggung jawab membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana hibah yang dilakukan, laporan pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Majalengka, kepada Bupati Kabupaten Majalengka dan diteruskan ke provinsi sebagai laporan pertanggung jawaban dana hibah.



Gambar 3.9 Penyaluran Bantuan Hibah  
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Guna mewujudkan dan memantapkan paham kesatuan atas dasar perbedaan, diperlukan pola wawasan kebangsaan Indonesia yang utuh. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan kegiatan Wawasan Kebangsaan *Goes to School* untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia dan memahami empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Pada Tahun 2024 kegiatan ini dilaksanakan di SMAN 2 Majalengka, SMKN 1 Lemahsugih, SMAN 1 Kadipaten, SMKN 1 Kertajati dan SMAN 1 Jatitujuh.



Gambar 3.10 Wawasan Kebangsaan *Goes to School*  
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik





Selain itu, untuk meningkatkan pengamalan ideologi dan wawasan kebangsaan juga telah dibentuk Kampung Pancasila di Desa Kawunghilir Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Pembentukan Kampung Pancasila ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dan pertimbangan yang muncul dalam konteks perkembangan zaman, pengaruh globalisasi, serta kebutuhan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang latar belakang terbentuknya Kampung Pancasila:



Gambar 3.11 Kampung Pancasila  
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selain itu kami juga melakukan pembinaan pemuda kader Kabupaten yang terseleksi dan diberikan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) yang tugas utamanya adalah mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di 3 tempat, yakni tingkat Kabupaten (Kantor Bupati), Provinsi (Kantor Gubernur), dan Nasional (Istana Merdeka). Anggotanya berasal dari pelajar SMA Sederajat kelas 1 atau 2.



Gambar 3.12 Pasukan Pengibar Bendera  
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik





Penyeleksian anggotanya biasanya dilakukan sekitar bulan April untuk persiapan pengibaran pada tanggal 17 Agustus. Di Kabupaten Majalengka Sendiri terdiri dari 32 Pasukan Paskibraka dan 45 Pasukan TNI/Polri.

Pada Tahun 2024 Kabupaten Majalengka telah melaksanakan pembinaan masyarakat dan anggota FKUB dalam pemahaman kearifan lokal. Penguatan peran FKUB dan diseminasi kerawanan ketahanan yang dihadiri oleh Tim Penganut Aliran Kepercayaan (Pakem) yang terdiri dari Anggota TNI, Polri, Kejasaaan, Tokoh Agama dan Kepala Daerah (Bupati). Dalam Setiap Triwulan atau 3 Bulan Sekali melakukan Rapat Hasil Pemantauan dilapangan Bertempat di Aula Kejaksaan Kabupaten Majalengka.



Gambar 3.13 Pembinaan Anggota FKUB  
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Adapun upaya untuk meningkatkan kualitas pembinaan kesatuan bangsa dimasa yang akan datang, yaitu:

- a. Meningkatkan jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan Wawasan Kebangsaan *Goes to School* untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia.
- b. Membentuk lebih banyak kampung pancasila sebagai upaya untuk menjaga dan memperkuat identitas budaya Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
- c. Menambah kuantitas dan kualitas sosialisasi terhadap Kesadaran Masyarakat tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- d. Menambah kuantitas berlangsungnya kegiatan sehingga lebih banyak masyarakat yang mendapat pendidikan politik.





- e. Meningkatkan jumlah pembinaan kepada masyarakat dalam pendidikan politik sehingga yang terbina bukan hanya organisasi perempuan.
- f. Membuat tim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program hibah agar tersalurkan nya hibah dapat sesuai dengan ketentuan.

## **7. Meningkatnya Kualitas Informasi Rawan Bencana**

Kualitas Informasi Rawan Bencana merupakan salah satu bagian dari Mitigasi Resko Bencana. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik dalam melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana yang mempunyai tujuan diantaranya:

- a) Meminimalisir resiko bencana;
- b) Sebagai pedoman pemerintah dalam perencanaan pembangunan;
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana;
- d) Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana ke beberapa sektor di Kabupaten Majalengka seperti ke Sektor Pendidikan, Komunitas, Pemerintah Desa yang berlokasi di Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka. Konteks dari sosialisasi antara lain adalah memberikan pemahaman jenis ancaman yang berada di daerah tersebut karena beda morfologi berbeda pula jenis ancamannya seperti jika berada di daerah perbukitan curam (Gunung Ciremai, sebagian kecil Kecamatan Rajagaluh, Argapura, Sindang, Talaga, Banjaran, Bantarujeg, Malausma, Lemahsugih, dan Cikijing bagian Utara) maka ancamannya yaitu Longsor, Erupsi Gunung Api, Gempa Bumi, Cuaca Ekstrim, Kebakaran Hutan dll. Sedangkan yang berada pada morfologi pedataran (Kadipaten, Panyingkiran, Dawuan, Jatiwangi, Sumberjaya, Ligung, Jatitujuh, Kertajati, Cigasong, Majalengka, Leuwimunding dan Palasah) maka ancamannya banjir, kekeringan dll. Selain itu juga menjelaskan perihal paradigma pencegahan sehingga ditekan untuk memtigasi bencana sehingga dapat meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana.



## 8. Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mengadakan Rakor Kesiapsiagaan menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Pilkada Serentak pada 14 November 2024 di Gedung Yudha Abdi Negara dan Kegiatan yang bertujuan mengatisipasi dan menyiapkan kesiapisagaan seluruh stakeholder dalam menghadapi musim hujan yang dimana biasanya ada dampak bencana akibat dari hidrometeorologi sehingga tujuan dari rakor ini seluruh stakeholder bahkan seluruh camat di Majalengka dapat meminimalisir dampak bencana akibat hidrometeorologi dan dampak bencana ketika pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Majalengka.



Gambar 3.14 Rakor Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana  
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Lalu ada TTX (*Table Top Exercise*) pada 25 November 2024 di Gedung Nyi Rambut Kasih yang bertujuan mensimulasikan kejadian bencana di Kabupaten Majalengka yang dipimpin oleh tenaga ahli sehingga para *stakeholder* yang diundang dalam acara tersebut dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan memberikan saran agar dapat terjadi sinkronisasi dalam efektifitas menanggulangi bencana di Kabupaten Majalengka.





## 9. Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana



Gambar 3.15 Rekap Rencana Kejadian Banjir  
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penanganan Bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menghadapi dampak dari terjadinya suatu bencana. Selama tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan penanganan bencana dengan dibantu oleh 51 orang PUSDALOPS-PB yaitu ada 293 kejadian dengan rincian 28 kejadian Banjir, 109 kejadian Longsor, 82 kejadian Cuaca Ekstrem, 2 kejadian Kekeringan, 46 kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan, 4 kejadian Gempa Bumi, 12 kejadian Kebakaran Gedung dan Pemukiman dan 10 kejadian Bencana/Musibah Lainnya, dengan jumlah korban dari dampak bencana 8.975 jiwa dengan rincian 14 jiwa meninggal dunia, 8.901 jiwa menderita, 55 jiwa mengungsi dan 5 jiwa luka-luka.



Gambar 3.16 Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Banjir  
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Dampak korban jiwa berdampak pula ke bangunan seperti hunian Masyarakat yaitu sebanyak 2.414 unit rumah mengalami kerusakan akibat bencana dengan rincian 81 unit rusak ringan, 34 unit rusak sedang, 22 unit rusak berat selain itu sebanyak 2.277 unit rumah terendam. Dampak yang masif pada tahun 2024 adalah ketika pada bulan Februari 2024 terbit Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/KEP.163-BPBD/2024 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Kertajati dimana memutuskan status keadaan tanggap darurat bencana banjir di Kecamatan Kertajati terhitung sejak 12 Februari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024. Dampak yang ditimbulkan antara lain adanya 6 Desa yang terdampak banjir anatara lain Desa Kertawinangun, Desa Pakubereum, Desa Kertajati, Desa Babakan, Desa Palasah dan Desa Bantarjati. Lebih dari 5.580 jiwa dan 2.013 KK terdampak, 1.587 unit rumah, 9 unit sarana pendidikan, 16 unit sarana ibadah, 2 unit sarana Kesehatan, 840 Ha area sawah, 200 Ha Perkebunan dan 6 akses jalan yang terendam akibat bencana Banjir, selain itu bertepatan dengan akan diadakannya pesta demokrasi atau pemilihan presiden dan wakil presiden beserta pemilihan legislatif pada Tanggal



14 Februari 2024.

Gambar 3.17 Evakuasi Korban Longsor

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka menerbitkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/KEP.274-BPBD/2024 tentang status keadaan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan Gerakan tanah di Kecamatan Cikijing,





Majalengka, Lemahsugih, Banjaran, Cingambul, Malausma, Talaga, Bantarujeg, Rajagaluh, Sindang, Jatitujuh, Jatiwangi, Kasokandel, Panyingkiran, Kadipaten dan Dawuan. Pada masa tanggap darurat ini kejadian besarnya ada di Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing dimana terjadi bencana longsor yang menutup akses jalan Provinsi penghubung antara Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan dalam kejadian longsor tersebut sempat diduga ada korban jiwa tertimbun longsor dengan adanya laporan orang hilang asal Kecamatan Cingambul.

Setelah dilakukan pencarian dan pertolongan terhadap terduga korban tertimbun longsor selama satu pekan tidak ditemukan tanda- tanda terduga korban tertimbun longsor akhirnya tim gabungan memutuskan untuk menutup masa pencarian, selang beberapa hari Masyarakat sekitar menemukan satu unit sepeda motor diduga milik korban. Mendapat laporan tersebut tim gabungan emelakukan pencarian kembali dan akhirnya dapat ditemukan satu orang korban asal Cingambul yang menjadi korban bencana longsor di Desa Sindangpanji.

**Upaya yang harus dilakukan dimasa yang akan datang** untuk meningkatkan kualitas Penanganan Bencana, yaitu:

- a. Identifikasi Resiko dan Pemetaan Bahaya
- b. Meningkatkan penyuluhan kesiapsiagaan Bencana
- c. Peningkatan Sistem Peringatan Dini Respons cepat penanggulangan bencana termasuk koordinasi antar instansi, mobilisasi relawan dan sumber daya

Berikut merupakan **program** yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai upaya Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum:

Tabel 3.12 Program yang Mendukung IKU 9

No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
1.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	960.862.700	959.877.300
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	10.271.218.200	9.249.801.335





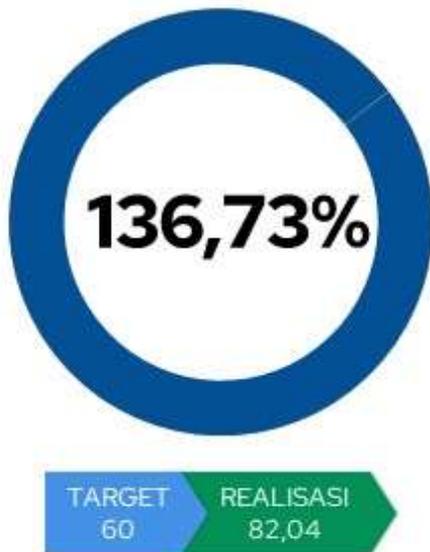
No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
		dan Pemadam Kebakaran		
3.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	319.850.000	319.800.000
4.	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.304.861.500	2.286.994.300

**Efisiensi** anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Trantibum pada sasaran Meningkatnya Kondusivitas Wilayah yaitu 7,5% atau Rp1.040.319.465,00 dari pagu anggaran Rp13.856.792.400,00 dengan realisasi Rp12.816.472.935,00.



TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG KAPABEL, BERSIH DAN AKUNTABEL SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

## CAPAIAN 2024



## PERBANDINGAN DENGAN



## FAKTOR

Yang mempengaruhi

- ❖ Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah
- ❖ Meningkatnya praktik baik reformasi birokrasi
- ❖ Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal
- ❖ Meningkatnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN
- ❖ Arsip terkelolasecara tertib
- ❖ Meningkatnya keterbukaan informasi public
- ❖ Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- ❖ Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN
- ❖ Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas
- ❖ Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien
- ❖ Strategi pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik

## PROGRAM

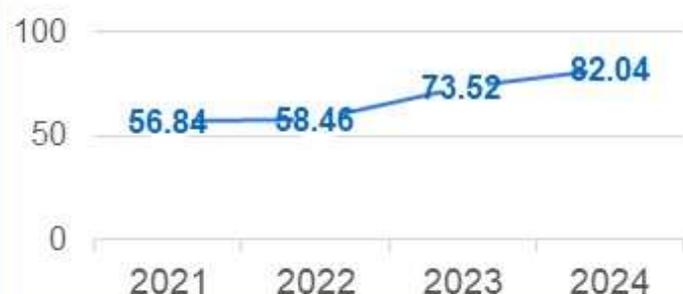
Yang mendukung

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ❖ Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- ❖ Program Perekonomian dan Pembangunan
- ❖ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- ❖ Program Kepegawaian Daerah
- ❖ Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- ❖ Program Informasi dan Komunikasi Publik
- ❖ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- ❖ Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- ❖ Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- ❖ Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- ❖ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- ❖ Program Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

## EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja indikator ini sebesar **13,93%**

## IRB





## SASARAN 8:

### **Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima**

Sasaran ini diukur dengan Indeks RB yang diperoleh dari penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas serta menggambarkan hasil pelaksanaan RB.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah instrument alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat, Kecamatan serta Dinas teknis pelaksana RB Tematik.

#### **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**

Pemerintah Kabupaten Majalengka meningkatkan kualitasnya pada reformasi birokrasi. Hal ini dibuktikan dengan Capaian Indeks RB di Kabupaten Majalengka **mencapai 136,73%**, terlihat dari **realisasi** Indeks RB di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 mendapatkan predikat A dengan nilai 82,04 dari **target** 60 dengan predikat CC. Bila **dibandingkan dengan tahun sebelumnya** lebih tinggi 8,52 Poin dari Realisasi Indeks RB Tahun 2023 mendapatkan predikat BB dengan nilai 73,52. Meskipun demikian, capaian pada Tahun 2023 lebih tinggi yaitu sebesar 146,76%.

<b>Target 2024</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Target 2026 (Akhir RPD)</b>	<b>Nilai Jawa Barat</b>
CC (60)	A (82,04)	BB (73,52)	B (70)	98,64





Adapun hasil perbandingan realisasi Tahun 2024 terhadap **RPD** telah mencapai 117,20%. Hal ini menandakan Indeks RB saat ini sudah melampaui sebesar 17,20% dari target akhir RPD. Atas hasil tersebut, target pada RPD harus disesuaikan dengan dasar Indeks RB saat ini.

Akan tetapi **jika dibandingkan dengan Indeks RB Pemprov. Jawa Barat**, Indeks RB Kabupaten Majalengka lebih rendah sebesar 16,6 Poin dari Pemprov. Jawa Barat sebesar 98,64 dengan predikat AA.

**Faktor-faktor** yang memengaruhi capaian indikator Indeks RB Kabupaten Majalengka, diantaranya:

### 1. **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berdampak pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah**

- Telah dilaksanakan evaluasi serta penyusunan rancangan Awal serta rancangan akhir RPD, RPJMD, dan RPJPD pada awal Tahun 2024 dalam perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilakukan proses konsultasi publik melibatkan berbagai pihak, yaitu DPRD, akademisi, dan masyarakat dan Musrenbang untuk menyempurnakan dokumen RPD berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Musrenbang diadakan di berbagai tingkatan, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.



Gambar 3.1 Gelar Musrenbang RKP & RPJPD 2025-2045  
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

- Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pada 54 Perangkat Daerah yaitu: Renstra, IKU, Renja, Perkin, Rencana Aksi, Laporan Kinerja, DPA, Pohon Kinerja & Cascading, Tindak lanjut LHE AKIP



Internal dan Laporan Monev Renaksi yang selaras dan tepat waktu.

- Melaksanakan rencana aksi untuk reformasi birokrasi meliputi penetapan roadmap RB, penyusunan rencana aksi pelaksanaan RB, mengelola pelaksanaan rencana aksi, monitoring dan evaluasi RB, serta menetapkan rencana aksi tindak lanjut yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.



Gambar 3.2 Penyusunan Rencana Aksi  
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

## 2. Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi

### a. Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi sesuai dengan PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2021, serta menerapkan mekanisme kerja melalui penunjukan Ketua Tim Kerja sesuai dengan PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2021. Saat ini Pemerintah Kabupaten Majalengka mempunyai peraturan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Bagi Perangkat Daerah Pasca Penyederhanaan Birokrasi, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar





Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Pada Tahun 2024 seluruh perangkat daerah telah menyusun proses bisnis, serta Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Bagian Organisasi telah mereviu SOP seluruh Perangkat Daerah.



Gambar 3.3 Keppup tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi  
Sumber: Sekretariat Daerah

#### b. SAKIP

Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yaitu 70,52 dengan Predikat BB. Mengalami kenaikan sebesar 2,52 dari Tahun 2023, yang menjadikan **Pemerintah Kabupaten Majalengka satu-satunya Pemerintah Kabupaten di wilayah Jawa Barat yang naik peringkatnya.**

Tabel 3.13 Rincian Nilai SAKIP

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	22,57	23,02
b. Pengukuran Kinerja	30	20,07	20,57
c. Pelaporan Kinerja	15	9,59	10,63
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,77	16,30
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>68,00</b>	<b>70,52</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>BB</b>

Komponen SAKIP yang mendorong peningkatan capaian RB yaitu:

- Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Bagian Organisasi berkolaborasi dengan Bappedalitbang melakukan penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Tahun 2024 yang kemudian dituangkan ke Perjanjian Kinerja dan selaras ke seluruh dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Akan tetapi pada Tahun 2024 Perjanjian Kinerja yang dituangkan dari



Cascading hanya untuk Pejabat Struktural dan penjenjangan kinerja Perangkat Daerah belum mempertimbangkan *crosscutting* kinerja, sehingga yang akan di lakukan Tahun 2025 akan menuangkan cascading ke seluruh Jabatan Fungsional dan Pelaksana serta mencantumkan *crosscutting* kinerja antar pengampu kinerja pada cascading Perangkat Daerah.



Gambar 3.4 Penyusunan Dokumen Perencanaan  
Sumber: Sekretariat Daerah

- Pengukuran Kinerja

Upaya lain yang dilakukan di Tahun 2024 adalah pada komponen pengukuran kinerja dengan melakukan pengukuran secara berkala triwulanan oleh Bappedalitbang atas realisasi kinerja kepada seluruh perangkat daerah dengan menggunakan aplikasi e-SAKIP, serta IKU level perangkat daerah telah dilengkapi dengan definisi operasional dan sumber data. Untuk Tahun 2025 akan ada upaya yang dilakukan pada pengukuran kinerja dengan melengkapi pengukuran kinerja triwulanan berupa rapor kinerja perangkat daerah yang diverifikasi oleh Bappedalitbang.

- Pelaporan Kinerja

Terkait dengan penyusunan laporan kinerja, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan Asistensi Penyusunan LKIP melalui pendampingan oleh Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Asistensi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas LKIP Pemerintah Kabupaten Majalengka yang memuat tujuh informasi wajib sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014.





Gambar 3.5 Pendampingan Penyusunan LKIP

Sumber: Sekretariat Daerah

Hasilnya penyusunan laporan kinerja Pemkab dan seluruh perangkat daerah sudah disertai dengan analisis cukup lengkap dengan melibatkan analisis ketercapaian, data pembandingan (target realisasi, tahun sebelumnya, target jangka menengah), faktor hambatan/pendukung, solusi atas permasalahan, dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja dan juga telah dikemas ke dalam infografis. Pelaporan kinerja Tahun 2023 juga telah dimanfaatkan sebagai perbaikan perencanaan dan aktivitas Tahun 2024.

Namun pada pelaporan Tahun 2023 masih ada sebagian Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya mengungkapkan analisis mendalam atas data yang disajikan. Sehingga pada Tahun berikutnya akan dilakukan desk kepada Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas pelaporan Perangkat Daerah.

- Evaluasi Internal



Gambar 3.6 Evaluasi Internal Dokumen SAKIP

Sumber: Sekretariat Daerah

Inspektorat Kabupaten Majalengka telah melakukan evaluasi atas implementasi AKIP di perangkat daerah sesuai dengan





Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan memberikan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan bimbingan teknis terkait evaluasi SAKIP kepada para evaluator, serta atas hasil evaluasi internal, sudah dimanfaatkan sebagai dasar untuk memberikan *reward and punishment* kepada perangkat daerah.



Gambar 3.7 Penghargaan SAKIP Terbaik se-Kabupaten Majalengka  
Sumber: Sekretariat Daerah

Tabel 3.14 Interval Pemberian TPP Komponen Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat Kerja	Persentase Pengurangan Capaian Kinerja Organisasi
1.	$x > 100\%$	Istimewa	0%
2.	$80\% < x < 100\%$	Baik	2%
3.	$60\% < x < 80\%$	Butuh Perbaikan	5%
4.	$20\% < x < 60\%$	Kurang	8%
5.	$0\% x < 20\%$	Sangat Kurang	10%

### c. Indeks Reformasi Hukum

Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 telah meraih predikat **AA** dengan nilai **98,74** untuk Indeks Reformasi Hukum setelah pada Tahun sebelumnya tidak mengikuti penilaian. Banyak upaya yang telah dilakukan selama Tahun 2024, terdokumentasikan dan tersosialisasikannya produk hukum pada JDIH, dengan pengelolaan JDIH yang terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan informasi hukum.





Gambar 3.8 Laman JDIH Kabupaten Majalengka  
Sumber: Sekretariat Daerah

Kemudian tingkat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi sangat tinggi, dan telah sesuai kelengkapan persyaratan untuk permohonan harmonisasi serta tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa dalam rapat pengharmonisasian sangat tinggi. Dilakukan juga pembinaan terhadap Desa hukum dan keluarga hukum melalui program Desa dan kelurahan sadar hukum serta Keluarga sadar hukum, pada Tahun 2024 bagian hukum telah melaksanakan pembinaan terhadap 8 (delapan) desa dan 180 keluarga.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Sekretariat Daerah mengadakan sosialisasi terkait Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan HAM melalui rencana aksi nasional yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM.



Gambar 3.9 Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum  
Sumber: Sekretariat Daerah

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah memiliki perancang peraturan perundang-undangan yang telah mengikuti



pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang, namun kegiatan tersebut telah dilakukan pada Tahun 2022, sehingga upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas perancang undang-undang melalui kegiatan bimbingan teknis di Tahun 2025.

#### d. Indeks Tata Kelola Pengadaan



Gambar 3.10 LHE ITKP  
Sumber: Sekretariat Daerah

Skor ITKP Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yaitu 71,70 dengan predikat Baik. Saat ini seluruh pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara elektronik, baik itu pengadaan melalui *e-purchasing*, *e-tendering*, maupun *e-dasung*. Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan pembinaan terhadap para pelaku pengadaan untuk meningkatkan kompetensi SDM.

### 3. Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan Aparatur Pengawasan yang Berkualitas dan Handal

Untuk menunjang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), diperlukan Kapabilitas APIP yang mumpuni, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Inspektorat telah membina APIP pada Tahun 2024, dan diperlukan kualitas pembinaan dan pengawasan SPIP Perangkat Daerah dengan upaya yang telah dilakukan yaitu pendampingan, pelatihan dan evaluasi evaluasi Perangkat Daerah terkait SPIP serta pemenuhan *Area of Improvement* oleh Inspektorat sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari BPKP Perwakilan Jawa Barat.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka mendapatkan Nilai 3,1 atau Level 3 pada tingkat maturitas SPIP.





Dan upaya yang akan dilakukan pada Tahun 2025 dalam menanggapi catatan dari BPKP yaitu:

- a. menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah yaitu dengan cara:
  - melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko *fraud* pada seluruh proses bisnis;
  - mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko;
  - menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja;
  - melakukan evaluasi desain dan implementasi manajemen risiko oleh Inspektorat.
- b. melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang;
- c. menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.

#### 4. Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN



Gambar 3.11 Hasil Survei Penilaian Integritas  
Sumber: Sekretariat Daerah

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas yang dilakukan KPK, data pada laman <https://jaga.id> Tahun 2024 Kabupaten Majalengka mendapatkan skor 70,25 dengan kategori Rentan, skor turun sebanyak 5.89 poin dari tahun sebelumnya.

Adapun Skor Komponen internal yang rendah yaitu dari dimensi pengelolaan SDM dan sosialisasi antikorupsi, sehingga di Tahun





2025 Pemerintah Kabupaten Majalengka akan melakukan upaya dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka tentang korupsi, salah satunya dengan cara campaign dari masing masing Perangkat Daerah kepada pegawainya.

Selain Survei Penilaian Integritas, untuk meningkatkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, ditunjang juga dengan pembangunan zona integritas pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, pada Tahun 2024 telah dilakukan pembinaan dan evaluasi tentang zona integritas menuju WBK/WBBM, yang kemudian diusulkan ke Kementerian PANRB yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun di Tahun 2024, masih belum lolos standar ZI, sehingga pembinaan dan evaluasi akan dilakukan kembali di Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan UPTD Puskesmas Majalengka.



Gambar 3.12 Rapat Pembahasan Proses Rencana Kerja Zona Integritas

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

##### 5. **Arsip Terkelola Secara Tertib**

Diukur dengan Indeks Kearsipan yang meliputi Nilai Pengawasan Kearsipan. Merupakan salah satu indikator capaian kinerja Perangkat Daerah oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai bentuk Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar Nasional.

Pengawasan Kearsipan terdiri dari Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal dilakukan ANRI dan





Pemerintah Provinsi terhadap pencipta arsip sesuai wilayah kewenangannya, sedangkan Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh pencipta arsip di lingkungan masing-masing. Pengawasan Kearsipan Eksternal dilaksanakan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan kearsipan yang terdiri dari: aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, aspek program kearsipan, aspek pengelolaan arsip inaktif, aspek penyusutan arsip, aspek sumber daya manusia kearsipan, aspek kelembagaan serta aspek prasarana dan sarana kearsipan.

Pemerintah Kabupaten Majalengka mendapatkan skor indeks kearsipan sebesar 81,70 dengan predikat A memuaskan.

LAMPIRAN I : BERITA ACARA  
 NOMOR : 5268/AR.06.04.02/DISPUSIPDA  
 TANGGAL : 8 OKTOBER 2024  
 TENTANG : PENETAPAN NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN DAN VERIFIKASI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL DAN INTERNAL KABUPATEN/KOTA

DAFTAR NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2024						KATEGORI	KET.
		NILAI ASKE	NILAI ASKI	NILAI ASKE 60%	NILAI ASKI 40%	NHP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	KABUPATEN BEKASI	94,91	80,45	56,95	32,18	89,13	A (Memuaskan)		
2.	KABUPATEN BOGOR	84,79	92,76	50,87	37,10	87,98	A (Memuaskan)		
3.	KOTA BEKASI	83,51	87,63	50,11	35,05	85,16	A (Memuaskan)		
4.	KOTA BANDUNG	80,72	90,89	48,43	36,36	84,79	A (Memuaskan)		
5.	KABUPATEN SUKABUMI	83,73	85,41	50,24	34,16	84,40	A (Memuaskan)		
6.	KABUPATEN MAJALENGKA	80,31	83,78	48,19	33,51	81,70	A (Memuaskan)		
7.	KABUPATEN CIREBON	79,71	81,88	47,83	32,75	80,58	A (Memuaskan)		
8.	KABUPATEN GARUT	81,70	72,25	49,02	28,90	77,92	BB (Sangat Baik)		
9.	KOTA CIREBON	73,90	83,53	44,34	33,41	77,75	BB (Sangat Baik)		
10.	KABUPATEN BANDUNG	68,52	88,95	41,11	35,58	76,69	BB (Sangat Baik)		

Gambar 3.13 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan  
 Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

Dalam upaya peningkatan kualitas layanan kearsipan sekaligus meningkatkan Indeks Kearsipan, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal (LAKI) dan Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) pada 54 Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Majalengka. Kemudian pemberian reward kepada 3 Perangkat Daerah terbaik dalam pengelolaan arsip dinamis.

Pemerintah Kabupaten Majalengka juga mendukung pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan unit kerja Pemerintah Kabupaten Majalengka.





Sampai dengan tahun 2024 penggunaan Aplikasi pada Perangkat Daerah sebagai perwujudan transformasi digital dalam lingkup kearsipan telah 58 Perangkat Daerah yang menggunakan. Berikut tabel transaksi pada aplikasi SRIKANDI V.3:

Tabel 3.15 Transaksi pada Aplikasi Srikandi V.3

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	SEKDA	657
2	BKPSDM	73
3	BAPPELITBANGDA	59
4	BKAD	227
5	BAPPENDA	21
6	DISARPUSDA	487
7	SETWAN	21
8	INSPEKTORAT	146
9	DKP3	24
11	DP3AKB	51
12	PUTR	24
13	RUMKIMTAN	541
14	DPTMPTSP	84
15	DINSOS	30
16	DINKES	40
17	DISDIK	52
18	DISPORA	27
19	PERINDAG	20
20	DK2UKM	30
21	KESBANGPOL	24
22	BPBD	27
23	DPMD	26
24	DISPARBUD	52
25	DISHUB	20
26	DISKOMINFO	53
27	SATPOL PP DAN DAMKAR	25
28	DISDUKCAPIL	175
29	DLH	39
30	RSUD CIDERES	27





NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
31	RSUD MAJALENGKA	18
32	RSUD TALAGA	25
33	KECAMATAN MAJALENGKA	28
34	KECAMATAN KADIPATEN	17
35	KECAMATAN KERTAJATI	233
36	KECAMATAN DAWUAN	29
37	KECAMATAN JATITUJUH	22
38	KECAMATAN JATIWANGI	27
39	KECAMATAN LIGUNG	50
40	KECAMATAN KASOKANDEL	164
41	KECAMATAN SUMBER JAYA	18
42	KECAMATAN PALASAH	26
43	KECAMATAN SINDANG	26
44	KECAMATAN SINDANGWAN	25
45	KECAMATAN RAJAGALUH	47
46	KECAMATAN LEUWIMUNDING	22
47	KECAMATAN MAJA	49
48	KECAMATAN BANJARAN	17
49	KECAMATAN LEMAHSUGIH	24
50	KECAMATAN TALAGA	19
51	KECAMATAN BANTARUJEG	26
52	KECAMATAN MALAUSMA	18
53	KECAMATAN SUKAHAJI	5
54	KECAMATAN CIKIJING	179
55	KECAMATAN ARGAPURA	17
56	KECAMATAN CINGAMBUL	35
57	KECAMATAN PANYINGKIRAN	30
58	KECAMATAN CIGASONG	22

Upaya dalam mensukseskan penerapan aplikasi Srikandi dalam perwujudan transformasi digital di Kabupaten Majalengka, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan melaksanakan pendampingan aktivasi Srikandi V.3 kepada Seluruh Perangkat Daerah. **Upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya**, mendorong seluruh Perangkat Daerah





menggunakan Srikandi secara maksimal dengan mewajibkan pembuatan surat melalui digital agar menambah jumlah transaksi pada aplikasi Srikandi.



Gambar 3.14 Pendampingan Aktivasi Srikandi V.3  
Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

## 6. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik diukur melalui indeks keterbukaan informasi publik. Kabupaten Majalengka masuk ke dalam **kategori cukup informatif dengan skor 78,92**.

Keterbukaan informasi publik dipengaruhi oleh Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan. Selama Tahun 2024 upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka yaitu meliputi dan melaksanakan *live streaming* kegiatan pemerintahan, pembuatan konten-konten tentang program pemerintah untuk dipublikasikan kepada masyarakat melalui media sosial, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Majalengka (Radika FM), pendataan media dan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) yang aktif di Majalengka. Kerjasama dengan insan media (online, cetak dan TV) baik dari insan media lokal maupun insan media nasional.



Gambar 3.15 *Live Streaming Talkshow KenCAN Data* dan Kerja Sama dengan Insan Media  
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika





Pada pelayanan Pengaduan, di Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan pembangunan Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Kedaruratan (*Quick Response* Majalengka 112).



Gambar 3.16 *Quick Response* Majalengka 112  
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Serta melakukan pendataan narahubung SP4N Lapor di seluruh perangkat daerah, dan selama Tahun 2024 ada 67 pengaduan masuk dan 64 telah diselesaikan.

REKAPITULASI  
ASPIRASI/PENGADUAN YANG DITERIMA PEMKAB MAJALENGKA MELALUI SP4N LAPOR!  
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2024

NO	BULAN	Masuk	Terdistribusi	Ditindaklanjuti	Selesai	Ditunda	Diarsipkan	Bukan Wewenang
1	Januari	7	7	7	7			
2	Februari	1	1	1	1			
3	Maret	3	3	3	3			
4	April	7	7	7	7			
5	Mei	12	12	12	12			
6	Juni	4	3	3	3	1		
7	Juli	2	2	2	2			
8	Agustus	3	3	3	3			
9	September	8	8	8	8			
10	Oktober	11	10	10	10	1		
11	November	6	6	6	6			
12	Desember	3	2	2	2	1		
	Jumlah	67	64	64	64	3		

Gambar 3.17 Rekap Pengaduan Tahun 2024  
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Namun jumlah pengaduan SP4N Lapor masih tergolong sedikit, sehingga rekomendasi untuk tahun berikutnya adalah menyusun rencana aksi untuk SP4N Lapor termasuk diseminasi SP4N Lapor kepada Perangkat Daerah dan masyarakat.

**7. Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;**

Kualitas layanan sektoral dapat dilihat dari indeks pembangunan statistiknya, Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 masuk ke dalam kategori Baik dengan nilai 2,75.

Adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu:



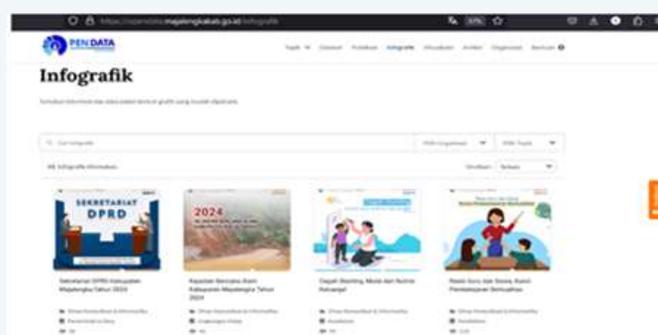


- Melakukan kegiatan pembinaan pembuatan metadata, yaitu informasi yang menjelaskan detail tentang kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui webinar KenCANData (Kenali, Cukupi dan Analisa Data) di Tahun 2024 yang telah dilaksanakan 3 kali kepada Perangkat Daerah. Metadata ini penting untuk memastikan keterpaduan, transparansi, dan keterbandingan data antar sektor sehingga dapat digunakan secara optimal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.



Gambar 3.18 Pembinaan Pembuatan Metadata  
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

- Melakukan pengumpulan, verifikasi dan *Cleansing Data* dari Perangkat Daerah untuk dipublikasikan di *Website Open Data* Majalengka ([opendata.majalengka.go.id](http://opendata.majalengka.go.id)).



Gambar 3.19 Laman Open Data Majalengka  
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

- Pencanaan dan Pembinaan Desa Cinta Statistik (Cantik) di Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi, manfaat yang diharapkan dari keberadaan program ini yaitu seluruh perangkat desa memahami mengenai proses pengumpulan data dan mampu menyajikan hasil pendataan. Manfaat selanjutnya yaitu untuk menyediakan data yang mutakhir

pada tingkat desa. Adanya data yang mutakhir akan mempermudah proses perencanaan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran (misal: program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran).



Gambar 3.20 Pencanaan Desa Cinta Statistik  
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

- Peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan statistik sektoral berkolaborasi dengan BPS mengenai kolaborasi tata kelola data dan informasi statistik sektoral, serta bimbingan teknis pengolahan, pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial.



Gambar 3.21 Pembinaan Statistik Sektoral  
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

- Pada segi kebijakan, penerapan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah baik. Sudah ada kebijakan SDI yang mengatur tata kelola data Pemerintah Kabupaten Majalengka, yang mencakup antara lain standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi dan/atau data induk. Penerapan standar data statistik, metadata statistik, dan kode referensi dan/atau data induk sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang





Sistem Pengendalian Mutu Kinerja Pemerintah Daerah berbasis Metadata di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Namun Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip SDI serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan, serta Walidata Pemerintah Kabupaten Majalengka dan pada setiap Perangkat Daerah perlu menjalankan tugas/program kerjanya secara keseluruhan.

Kemudian upaya yang akan dilakukan pada tahun berikutnya yaitu mereviu dan mengevaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip SDI serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan, menyusun dokumen Daerah Dalam Angka (DDA), pembinaan ke Perangkat Daerah dalam pembuatan Rekomendasi kegiatan statistik (Romantik) untuk di input pada aplikasi <https://romantik.web.bps.go.id/>, serta mempublikasi data-data menjadi infografis dan dipublikasi di media sosial.

#### 8. **Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN;**

Profesionalisme dan integritas ASN dapat diukur melalui sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pada Tahun 2024 penerapan sistem merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah pada **kategori IV (Sangat Baik) dengan nilai sebesar 328,5 poin.**

Penilaian sistem merit menggunakan 8 aspek, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16 Komponen Sistem Merit

No	Aspek Sistem Merit	Nilai
1	Perencanaan Kebutuhan	40
2	Pengadaan	38
3	Pengembangan Karier	82,5





4	Promosi dan Mutasi	27,5
5	Manajemen Kinerja	72,5
6	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	35
7	Perlindungan dan Pelayanan	14
8	Sistem Informasi	19
<b>Indeks Sistem Merit</b>		<b>328,5</b>

**Upaya** yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Alam yaitu:

a. Perencanaan Kebutuhan

Memenuhi dokumen ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 Tahun).



Gambar 3.22 Perencanaan Kebutuhan ASN  
Sumber: BKPSDM

b. Pengadaan

Sudah menyusun rencana pengadaan ASN berdasarkan Anjab dan ABK, Penetapan hasil penerimaan calon ASN dilakukan secara objektif dan transparan melalui CAT, penempatan CPNS yang diangkat menjadi PNS sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar, memenuhi catatan verifikasi dari KASN yaitu mengakselerasi penyusunan kebijakan internal terkait pengadaan ASN serta mutasi antar instansi yang mengatur tata cara pengadaan pegawai, untuk kemudian melaksanakannya secara konsisten.





Gambar 3.23 Seleksi Penerimaan CASN  
Sumber: BKPSDM

c. Pengembangan Karier

Pada Tahun 2024 masih dilakukan pemantapan implementasi pengembangan karier berbasis aplikasi (Sistem Manajemen Talenta Pegawai) yang merupakan aplikasi dari penerapan manajemen talenta. Pada aspek pengembangan karier masih banyak perbaikan dan pengembangan yang harus dilakukan, yaitu:

- Mengakselerasi penyusunan dan penetapan Standar Kompetensi Jabatan untuk jabatan untuk setiap jenis jabatan yang disusun, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- Melakukan *assessment* terhadap seluruh pegawai sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan penyusunan profil pegawai berdasarkan kompetensi/talenta dalam rangka pemetaan talenta dan rencana suksesi yang dikelola pada aplikasi Manajemen Talenta Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- Menganalisis data informasi kesenjangan kualifikasi dan kesenjangan kompetensi seluruh pegawai yang diperbaharui secara berkala;
- Menyusun program dan strategi pengembangan kompetensi pegawai dalam jangka menengah 5 (lima) tahun yang berbasis pada informasi kesenjangan kualifikasi, kompetensi, kinerja,





baik dalam bentuk klasikal maupun non klasikal, yang dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 10 Tahun 2018;

- Melaksanakan program praktik kerja dan pertukaran pegawai serta program *coaching* dan *mentoring* (non klasikal) sebagai bagian dari analisis kebutuhan pengembangan kompetensi yang berbasis pada kesenjangan kompetensi dan kinerja.

d. Promosi dan mutasi

Pada aspek promosi dan mutasi, sudah tercapai target, namun masih ada catatan dari tim verifikasi KASN, yaitu:

- Menyempurnakan Peraturan Bupati Majalengka tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan komposisi yang telah diterapkan dalam aplikasi Manajemen Talenta.
- Menyempurnakan kebijakan internal terkait pengisian JPT yang mengacu kepada *talent pool* dan rencana suksesi.
- Optimalisasi pengisian jabatan administrator dan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan metode *assessment*.

e. Manajemen Kinerja

Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah menerapkan metode penilaian kinerja yang objektif dan terukur untuk seluruh pegawai dengan aplikasi e-kinerja yang penilaiannya per semester dan aplikasi sinergi yang penilaiannya per bulan, dan hasil penilaian kinerja dijadikan pertimbangan utama dalam promosi jabatan dan pengembangan kompetensi pegawai. Catatan dari tim verifikasi KASN yaitu melaksanakan program/strategi penyelesaian permasalahan kinerja yang telah disusun dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.

f. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menerapkan tunjangan kinerja sudah memperhitungkan hasil penilaian kinerja sebagai faktor

yang utama disamping disiplin kerja dan memiliki kebijakan internal terkait pemberian penghargaan pegawai dan sudah melaksanakan pada Tahun 2021, 2023 dan 2024. Adapun rekomendasi dari tim KASN agar melakukan sosialisasi



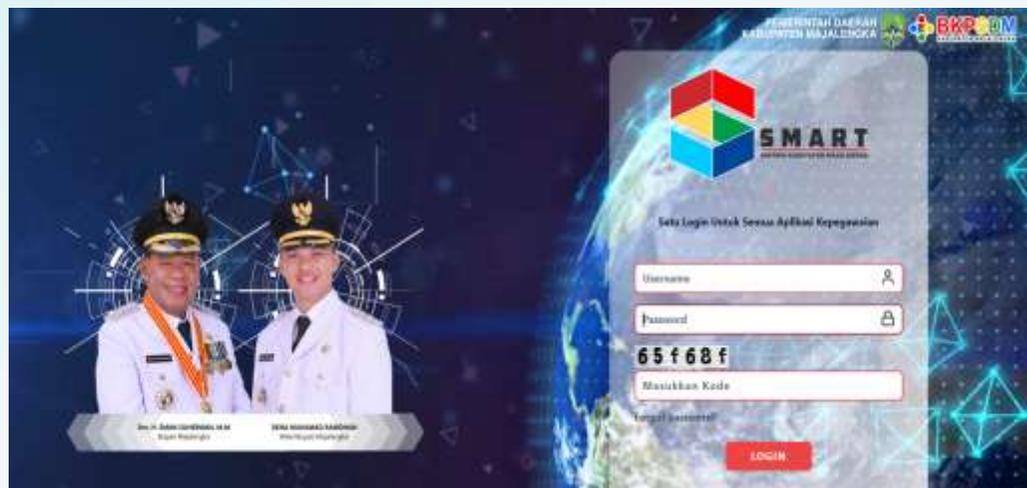


Peraturan Bupati nomor 18 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan kode Perilaku kepada seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

g. Perlindungan dan Pelayanan

Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah menetapkan kebijakan perlindungan dan/atau bantuan kepada pegawai namun belum menjadi agenda tetap/terjadwal, dan menyediakan sistem pelayanan keuangan, pelayanan kepegawaian yang memudahkan aktifitas pegawai (daftar kehadiran, permohonan cuti dll) yang terintegrasi dalam aplikasi SMART (Sistem Manajemen ASN Rinci dan Terintegrasi). Catatan dari KASN mengoptimalisasi pelaksanaan kebijakan internal terkait perlindungan untuk pegawai secara konsisten.

h. Sistem Informasi



Gambar 3.24 Aplikasi Kepegawaian SMART  
Sumber: BKPSDM

Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah membangun Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online, menyajikan data realtime serta terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai; data pelanggaran disiplin, proses penjatuhan hukuman disiplin telah menggunakan aplikasi IDIS BKN. Beberapa catatan dari KASN yaitu:

- agar mengoptimalisasi penggunaan aplikasi penilaian kinerja (SINERGI) yang terintegrasi dalam rangka pengelolaan data kinerja dengan e-kinerja BKN;
- mengakselerasi pembangunan dan penggunaan *assessment center* dalam rangka pemetaan kompetensi seluruh pegawai di



Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.

## 9. Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas

Untuk mengukur peningkatan kualitas pelayanan publik digunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan rangkuman data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Terdapat 9 Unsur dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat diantaranya Persyaratan, Prosedur, Waktu, Biaya, Produk, Perilaku, Kompetensi, Sarana dan Pengaduan. IKM diperoleh dari total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$
$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$
$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$
$$\text{Konversinilai IKM} = \text{Indeks Kepuasan Masyarakat} \times 25$$

Gambar 3.25 Metode Perhitungan Nilai IKM  
Sumber: Sekretariat Daerah

**Nilai IKM Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yaitu 85,59 dengan predikat Baik.**

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 yaitu:

- Meningkatkan kualitas tata Kelola pelayanan publik  
Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang,





jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Untuk meningkatkan kualitasnya, Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik kepada seluruh Perangkat Daerah secara *online* dan *offline*.



Gambar 3.26 Monev Pelayanan Publik  
Sumber: Sekretariat Daerah

Hasil dari monitoring dan evaluasi kemudian diberikan reward untuk 3 Lokus terbaik di 3 Kategori yaitu:

Kategori Dinas/Badan/RSUD

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. RSUD Cideres
3. Dinas Pendidikan

Kategori Kecamatan

1. Kecamatan Sindangwangi
2. Kecamatan Majalengka
3. Kecamatan Sindang

Kategori Puskesmas

1. Puskesmas Majalengka
2. Puskesmas Sukahaji
3. Puskesmas Cigasong





Gambar 3.27 Sertifikat Juara Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Majalengka  
Sumber: Sekretariat Daerah

Selain itu Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan pendampingan kepada 7 unit lokus evaluasi yang akan dinilai standar kepatuhan pelayanan publiknya oleh Ombudsman, yaitu Disdukcapil, DPMPTSP, Dinsos, Disdik, Dinkes, Puskesmas Majalengka dan Puskesmas Sukahaji. Hasil yang diperoleh Kabupaten Majalengka untuk Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Tahun 2024 mendapatkan nilai **93,06 Zona Hijau** dengan **Kualitas Tertinggi**.

Serta pendampingan kepada 3 unit lokus evaluasi yang akan dinilai kualitas pelayanan publiknya oleh KemenPAN RB, yaitu RSUD Cideres untuk mewakili kategori Pelayanan Jasa, Dinsos untuk mewakili kategori Pelayanan Barang dan Disdukcapil untuk mewakili kategori Administratif.

Adapun hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang diperoleh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Hasil PEKPPP

Lokus	Nilai	Predikat
RSUD Cideres	4,09	A-
Disdukcapil	4,58	A-
Dinsos	4,30	A-
<b>Kabupaten Majalengka</b>	<b>4,32</b>	<b>A-</b>

- Meresmikan Mal Pelayanan Publik  
Tanggal 18 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka meresmikan Mal Pelayanan Publik oleh Pj. Bupati Majalengka yang turut dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Barat dan Anggota





Ombudsman RI, setelah sebelumnya telah dilakukan uji coba dalam rentang waktu 18 November – 17 Desember 2024.



Gambar 3.28 Peresmian Mal Pelayanan Publik  
Sumber: Sekretariat Daerah

Setelah selama ini masyarakat di Kabupaten Majalengka harus mengakses berbagai layanan publik di lokasi yang berbeda, yang sering kali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini menciptakan kebutuhan yang mendesak untuk menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Majalengka dengan tujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Penyelenggaraan MPP tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka. Dengan adanya MPP, diharapkan proses birokrasi dapat dipangkas, transparansi pelayanan meningkat, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat.



Gambar 3.29 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Majalengka  
Sumber: Sekretariat Daerah





- Festival Pelayanan Publik

Sebagai puncak dari rangkaian monitoring dan evaluasi pelayanan publik di Majalengka, Pemerintah Kabupaten Majalengka menyelenggarakan “Majalengka Yanlik Fest 1.0” yaitu sebuah acara Tahunan yang diselenggarakan untuk mempromosikan pelayanan publik yang tersedia kepada masyarakat. Dalam acara ini terdapat: Pameran Pelayanan Publik dan Hasil-hasil pembangunan Tahun 2024, Penganugerahan Pelayanan Publik terbaik Tahun 2024, Peresmian Mal Pelayanan Publik, Jajanan Gratis untuk masyarakat serta konser gratis yang dibintangi Ghea Indrawari.



Gambar 3.30 Majalengka Yanlik Fest 1.0  
Sumber: Sekretariat Daerah

## 10. Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik Lebih Cepat dan Efisien

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.



Pada Tahun 2024 Indeks SPBE Kabupaten Majalengka mendapatkan **nilai 2,94 dengan Predikat Baik**. Dimana pada Tahun 2024, Aspek SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai berikut:



Gambar 3.31 Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek  
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE pada Pemerintah Kabupaten Majalengka yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah dengan adanya Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Majalengka.

- Kelemahan

Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Majalengka masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE, dan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, di mana pengaturan yang disampaikan belum memenuhi kriteria kematangan lebih dari tingkat 2.





b. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Pemerintah Kabupaten Majalengka yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah dengan adanya Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Majalengka masih belum memiliki dokumentasi tata kelola terkait Rencana dan Anggaran SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE, di mana pengaturan yang disampaikan belum memenuhi kriteria kematangan lebih dari tingkat 2.

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Majalengka yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah dengan adanya Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Majalengka masih belum memiliki dokumentasi tata kelola terkait Pembangunan Aplikasi SPBE dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, di mana pengaturan yang disampaikan belum memenuhi kriteria kematangan lebih dari tingkat 2.

d. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan Aspek Penyelenggara SPBE pada Pemerintah Kabupaten Majalengka yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah dengan adanya Tim Koordinasi SPBE.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Majalengka masih belum memiliki dokumentasi tata kelola terkait Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE, di mana pengaturan yang disampaikan belum memenuhi kriteria kematangan lebih dari tingkat 2.

e. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan Aspek Penerapan Manajemen SPBE pada Pemerintah Kabupaten Majalengka yang sudah





dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah dengan adanya Tim Koordinasi SPBE.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Majalengka masih belum memiliki penerapan terkait Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE. Serta peta rencana tidak ada program dan kegiatan yang eksplisit. Hanya muncul inisiatif strategis serta output yang diharapkan.

f. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan Aspek Pelaksanaan Audit TIK pada Pemerintah Kabupaten Majalengka belum ada satu pun indikator yang memenuhi.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Majalengka masih belum memiliki penerapan terkait Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE, serta peta rencana tidak ada program dan kegiatan yang eksplisit. Hanya muncul inisiatif strategis serta output yang diharapkan.

g. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Majalengka yang sudah dipenuhi adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara, Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

h. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Majalengka yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum





(JDIH), Layanan Publik Sektoral menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Majalengka. Atas kondisi tersebut, rekomendasi yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka di tahun berikutnya yaitu:

- Membuat Tim Akselerasi SPBE, memanggil seluruh Tim IT yang tergabung di Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- Tingkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengadopsi dokumen kebijakan, roadmap SPBE serta pendampingan implementasinya untuk dilakukan *self assessment*.
- Investasi SDM dalam peningkatan pengetahuan, praktik, dan budaya kerja (kebijakan) berbasis SPBE dengan cara diklat, sertifikasi, *sharing knowledge*, kompetisi dan lainnya.
- Menyederhanakan dan mengintegrasikan proses bisnis serta menginternalisasi pentingnya SPBE kepada perangkat daerah.
- Membangun portal layanan publik dan administrasi pemerintahan yang terintegrasi melalui satu pintu.
- Kolaborasi dalam meningkatkan infrastruktur dan implementasi SPBE dengan swasta.
- Mengalokasikan Anggaran yang tepat dan tetap untuk meningkatkan SPBE.
- Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola:
  - Menyusun dan menetapkan kebijakan arsitektur SPBE yang komprehensif mencakup 6 domain arsitektur SPBE;
  - Mengembangkan peta rencana SPBE yang terukur dengan program dan kegiatan yang jelas;
  - Menetapkan kebijakan pembangunan aplikasi yang mencakup seluruh siklus pengembangan.
- Pengembangan Manajemen SPBE:
  - Menyusun program dan kegiatan manajemen SPBE yang terarah dan terencana untuk setiap aspek manajemen;
  - Mengembangkan pedoman teknis untuk setiap aspek manajemen;
  - Membangun sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen SPBE.





- Penguatan Fungsi Audit:
  - Menyusun rencana audit TIK yang komprehensif mencakup infrastruktur, aplikasi dan keamanan;
  - Mengembangkan kapasitas tim audit internal;
  - Melaksanakan audit secara berkala dan menindaklanjuti hasil temuan.
- Pengembangan Kapasitas SDM:
  - Meningkatkan kompetensi SDM dalam tata kelola dan manajemen SPBE;
  - Mengembangkan budaya kerja berbasis elektronik

### 11. Strategi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik

Dalam menunjang pembangunan reformasi birokrasi tematik, Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 telah menyusun Rencana Aksi pelaksanaan RB tematik terkait pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, digitalisasi pemerintahan terkait stunting, penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi, kemudian mengelola pelaksanaan rencana aksi, monitoring dan evaluasi, serta menetapkan rencana aksi tindak lanjut yang akan menjadi masukkan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

Berikut **program-program** yang mendukung capaian indikator ini:

Tabel 3.18 Program yang Mendukung IKU 10

No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah (organisasi)	1.710.861.555	1.689.164.419
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	1.010.800.000	834.697.406
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	3.121.044.500	2.797.583.322





No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.428.167.500	1.287.280.610
5.	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.668.381.800	3.449.522.250
6.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Dinas Komunikasi dan Informatika	112.000.000	110.200.000
7.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.006.777.500	2.006.022.969
8.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.250.735.000	564.337.000
9.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	109.999.000	109.899.000
10.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan	1.867.539.500	1.816.476.750
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan	1.552.840.050	1.416.457.050





No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
11.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	814.325.200	802.187.700
12.	Program Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	233.726.200	232.547.400

**Efisiensi** anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima yaitu 13,93% atau sebesar Rp2.770.821.292,00 dari pagu anggaran Rp19.887.197.805,00 dengan realisasi Rp17.116.375.876,00.



**MENINGKATNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

**CAPAIAN 2024**



TARGET TINGGI → REALISASI TINGGI

**PERBANDINGAN DENGAN**



**FAKTOR**

Yang mempengaruhi

- ❖ Meningkatnya Pendapatan Daerah
- ❖ Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**PROGRAM**

Yang mendukung

- ❖ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- ❖ Program Pengelolaan barang milik daerah
- ❖ Program Pengelolaan Keuangan Daerah

**EFISIENSI ANGGARAN**

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja indikator ini sebesar **3,56%**

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

**TINGGI**      **TINGGI**      **TINGGI**

2022

2023

2024



## **SASARAN 9:**

### **Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD. Perhitungan kemampuan keuangan daerah menggunakan formulasi sebagai berikut:

- Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi belanja pegawai aparatur sipil negara;
- Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dengan dana bagi hasil dan dana alokasi umum;
- Adapun perhitungan belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan

Klasifikasi kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- Kemampuan keuangan daerah tinggi dengan besaran di atas Rp.550.000.000.000,00 (Lima ratus lima puluh milyar rupiah);
- Kemampuan keuangan daerah sedang dengan besaran Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (Lima ratus lima puluh milyar rupiah);
- Kemampuan keuangan daerah rendah dengan besaran di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah)

Perhitungan kemampuan keuangan daerah 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun anggaran 2022 yang akan dijadikan dasar penetapan perhitungan kemampuan keuangan daerah Tahun 2024.

Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan Daerah.

### **Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)**

Pemerintah Kabupaten Majalengka mempertahankan kemampuan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan Capaian kemampuan





keuangan daerah di Kabupaten Majalengka **mencapai 100%**, terlihat dari **realisasi** kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 mendapatkan predikat **Tinggi** dengan kemampuan keuangan sebesar **Rp.646.494.794.866,61** dengan **target** Tinggi. Bila **dibandingkan dengan tahun sebelumnya**, kemampuan keuangan daerah tetap mempertahankan Predikat tinggi seperti Tahun 2023, dengan capaian yang sama-sama 100%.

<b>Target 2024</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Target 2026 (Akhir RPD)</b>
Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Adapun hasil perbandingan realisasi Tahun 2024 terhadap **RPD** telah mencapai 100%.

**Faktor-faktor** yang memengaruhi capaian indikator Kemampuan Keuangan Daerah, diantaranya:

### **1. Meningkatnya Pendapatan Daerah;**

Salah satu komponen Pendapatan Umum Daerah selain dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, yaitu Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari tiga unsur yaitu:

- **Pajak Daerah**  
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, reklame, dan lainnya.
- **Retribusi Daerah**  
Pembayaran atas layanan atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah, misalnya retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi lainnya.
- **Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**  
Pendapatan dari pengelolaan aset atau kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti dividen dari perusahaan milik daerah (BUMD).
- **Lain lain pendapatan asli daerah yang sah**  
Pendapatan lain yang sah yang diperoleh daerah, seperti pendapatan dari hasil pengelolaan tanah atau sewa gedung milik daerah.

Berikut realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024:



Tabel 3.19 Realisasi PAD Tahun 2024

Uraian	Target	Realisasi	%
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>578.441.911.908,00</b>	<b>524.530.102.276,88</b>	<b>90,68</b>
Hasil Pajak Daerah	172.578.996.000,00	167.149.914.497,00	96,85
Hasil Retribusi Daerah	362.239.250.810,00	339.530.230.785,00	93,73
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.235.616.793,00	8.235.616.793,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.388.048.305,00	9.614.340.200,88	27,17

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan Tahun 2024 tidak sesuai dengan harapan. Namun, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Bapenda telah mengupayakan beberapa hal pada Tahun 2024 yaitu:

- Sosialisasi pajak daerah melalui kegiatan CFD, CFN, Launching Pojok Imah, Pesona Patriot HUT Smansa, Pertemuan Rutin DWP dan PKK, Nonton Bareng pertandingan Timnas yang di hadiri Pj. Bupati Majalengka dan masyarakat, serta inovasi sosialisasi pajak melalui video clip lagu sadar pajak dan lunas pajak untuk menysasar audiens dari media sosial dan internet.

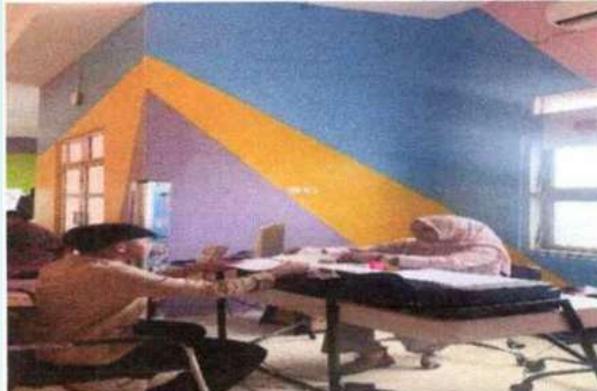


Gambar 3.1 Inovasi Sosialisasi Pajak  
Sumber: Badan Pendapatan Daerah





- Optimalisasi aplikasi DediKasi yaitu Digitalisasi Management Data Induk Pajak Terintegrasi yang berkolaborasi dengan Bapenda, DPMPTSP serta Satpol PP.
- Melakukan kunjungan silaturahmi langsung ke tempat kerja notaris untuk melakukan integrasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya (BPHTB).
- Melakukan pendampingan kejaksaan negeri majalengka untuk pemeriksaan buku PBB.
- Melayani pembayaran PBB dan BPHTB di Mal Pelayanan Publik



Gambar 3.2 Pelayanan di Mal Pelayanan Publik  
Sumber: Badan Pendapatan Daerah

- Melaksanakan Aksi Gerakan Digitalisasi Transaksi Pajak ke ASN dan Masyarakat melalui sosialisasi.
- Melaksanakan rekonsiliasi dengan perangkat daerah pengelola pendapatan asli daerah.



Gambar 3.3 Rekonsiliasi Pengelolaan PAD  
Sumber: Badan Pendapatan Daerah

- Pemberian Reward kepada Camat yang berhasil meraih pendapatan dari pajak di kecamatannya.



- Penguatan SDM pengelola pajak melalui Bimbingan Teknis MOM and DAD Champion.

Di Tahun 2024 masih ada permasalahan seperti updating data yang belum optimal, perubahan cuaca yang tidak menentu sehingga berdampak terhadap produksi pertanian, adanya tagihan klaim atas pelayanan kesehatan yang belum dibayar oleh BPJS selama 3 bulan, kondisi alat berat yang sudah tidak layak/rusak mengurangi minat penyewa sehingga lebih banyak menggunakan pihak swasta, kondisi bangunan yang kurang layak dan bangunan yang beralih fungsi.

Adapun untuk langkah ke depannya akan dilakukan, diantaranya:

- Membuat RoadMap Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Meningkatkan kualitas database potensi wajib Pajak yang terupdate dan pemungutan pajaknya
- Inovasi penyuluhan dan sosialisasi Pajak dan retribusi ke masyarakat
- Mengembangkan sistem digitalisasi pajak dan retribusi agar lebih efisien dan transparan (barcode)
- Inventarisir aset daerah dan reviu potensi pendapatannya

## **2. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Capaian kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah tercermin dari capaian Opini yang diperoleh dari hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

- **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion**

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi





keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion**

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

- **Opini Tidak Wajar atau adversed opinion**

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- **Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**

Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Pada Tahun 2023 Kabupaten Majalengka Pemerintah Kabupaten Majalengka berhasil mempertahankan kualitas pengelolaan anggaran ditandai dengan dikeluarkannya opini BPK dengan realiasi Tahun 2023 opini WTP sehingga 11 Tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Majalengka berhasil meraih opini BPK dengan opini WTP. Pada Tahun 2024 dapat dilihat dikarenakan belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Opini WTP diraih karena beberapa faktor yaitu penyelenggaraan evaluasi

akuntabilitas Keuangan yang berdampak pada efisiensi kinerja terlihat dari

meningkatnya pemenuhan tindak lanjut temuan pengawasan keuangan internal dan eksternal.

Kabupaten Majalengka juga mampu melakukan beberapa upaya seperti menyajikan LKPD secara tepat waktu dan juga karena





laporan keuangan yang disajikan dianggap memberikan informasi yang akuntabel berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan.



Daftar Opini LKPD Tahun 2019 s.d. 2023

No	Entitas Pemerintah Daerah	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
1	Prov. Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP PSH
2	Kab. Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP PSH
3	Kab. Bandung Barat	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP PSH
4	Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP PSH
5	Kab. Bogor	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
6	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP PSH
7	Kab. Cianjur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP PSH
8	Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP PSH
9	Kab. Garut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP PSH
10	Kab. Indramayu	WTP	WDP	WTP	WTP PSH	WTP PSH
11	Kab. Karawang	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP PSH
12	Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP PSH
13	Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP

Gambar 3.4 Opini LKPD Tahun 2019-2023  
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah

**Upaya** yang dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akurat dan handal untuk mencapai Opini WTP:

- Menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menyelesaikan temuan pemeriksaan BPK dan berkoordinasi dengan Inspektorat mengenai penyelesaian Temuan BPK;
- Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Penyesuaian Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD);
- Melakukan Rekonsiliasi secara berkala atas akun-akun pada Laporan Keuangan;



- Peningkatan kualitas SDM secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pengelola Keuangan di OPD;
- Pendampingan penyusunan laporan keuangan dan penatausahaan persediaan OPD; Konsinyering Laporan Keuangan; Penyempurnaan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan;
- Mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Keuangan pada 56 SKPD dan 33 BLUD.



Gambar 3.5 Bimtek Penyusunan LKPD  
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah

Optimalisasi pada program pengelolaan Barang Milik Daerah dengan melakukan upaya pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) secara legal/hukum yakni dengan pensertifikatan tanah milik pemerintah Daerah kabupaten Majalengka dengan target 739 bidang tanah dan telah direalisasikan 507 bidang tanah. Langkah/upaya yang dilakukan untuk percepatan sertifikasi tanah milik pemda antara lain dengan:

- Melakukan koordinasi percepatan sertifikasi tanah milik pemda dengan Kantor ATR/BPN Majalengka
- Menyampaikan surat Bupati tentang percepatan sertifikasi tanah milik pemda ke kantor ATR/BPN Majalengka

Selanjutnya untuk pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) dari sisi fisik telah dilaksanakan pemasangan patok dengan target 20 bidang tanah dan direalisasikan 20 bidang tanah serta pemasangan plang dengan target 30 bidang tanah dan realisasi 30 bidang tanah.



Dari sisi pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) secara administrasi telah dilakukan Langkah-langkah dan upaya sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain sebagai berikut:

- Melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Daerah dengan OPD terkait dilaksanakan 2 kali dalam setahun waktu pelaksanaan di triwulan II dan III.



Gambar 3.6 Rekonsiliasi Barang Milik Daerah  
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah

- Menyelenggarakan Bimbingan teknis (Bimtek) Penatausahaan BMD minimal 1 kali setahun
- Melaksanakan inventarisasi BMD dilaksanakan minimal 1 kali dalam 5 tahun pemerintah Daerah kabupaten Majalengka telah melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2022
- Penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pada OPD terkait setelah Rencana Kerja (Renja) OPD ditetapkan
- Melaksanakan rapat koordinasi percepatan pensertifikatan tanah milik Pemda Majalengka.

**Upaya yang harus dilakukan pada tahun mendatang** untuk pencapaian mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah melalui beberapa strategi antara lain:

- Eksekusi Kebijakan Pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku
- Pengelolaan aset terkait pencatatan dan pelaporan harus sesuai dengan ketentuan
- Menyusun perencanaan penganggaran berbasis kinerja dan sesuai prioritas pembangunan (kemiskinan, stunting, dll)





- Meningkatkan Pengawasan Internal dan Eksternal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- Mengimplementasikan sistem informasi manajemen keuangan daerah yang terintegrasi dan sistem pelaporan secara real time sehingga bisa dipantau langsung oleh Bupati
- Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan standar peraturan termuktahir
- Meningkatkan kompetensi pegawai seperti pelatihan Brevet, SAP dll.
- Penguatan komitmen bersama dan penyatuan langkah yang dituangkan dan dikendalikan dalam rencana aksi yang didukung oleh seluruh SKPD.
- Pengelolaan aset terkait pencatatan dan pelaporan harus sesuai dengan ketentuan, Sistem Informasi Manajemen Milik Daerah perlu dimanfaatkan secara optimal, tindaklanjut temuan BPK perlu difasiltasi, termasuk lewat pembuatan rencana aksi atas temuan dan rekomendai BPK untuk segera ditindaklanjuti, temuan tahun berjalan harus diantisipasi, dan penyusunan LKPD tahun berikutnya harus memperhatikan saran dan rekomendasi BPK pada LKPD tahun-tahun sebelumnya.
- *Action Plan* yang terintegrasi harus disusun dalam rencana pembangunan.
- Peningkatan evaluasi rutin dan pengawasan internal yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah juga merupakan suatu keharusan.
- Penetapan Perda APBD paling lambat bulan Desember tahun sebelumnya.
- Melakukan bimbingan teknis/sosialisasi/supervisi/pendampingan tenaga ahli tentang implementasi pengelolaan keuangan yang baik kepada seluruh pengelola keuangan yang baik kepada seluruh pengelola keuangan.

Selain itu untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan langkah-langkah konkret dan diharapkan dapat tercapainya akuntabilitas keuangan daerah yaitu:





- Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan daerah
- Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah
- Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah
- Tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah.

Intervensi Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk pencapaian target IKU Kapasitas Keuangan Daerah dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.20 Program yang Mendukung IKU 11

No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	8.423.689.178	8.184.962.978
2.	Program Pengelolaan barang milik daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.842.000.000	1.827.502.760
3.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.583.582.000	4.308.076.084

**Efisiensi** anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Kemampuan Keuangan Daerah pada sasaran Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah yaitu 3,56% atau sebesar Rp528.729.356,00 dari pagu anggaran Rp14.849.271.178,00 dengan realisasi Rp14.320.541.822,00.





## AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21 Akuntabilitas Keuangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	95,84	96,92
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	98,95	97,07
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	99,94	98,20
		Prevalensi Stunting	72,03	96,48
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	95,41	97,29
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	96,21	85,14
6	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK)	99,45	98,04
		Tingkat Pengangguran Terbuka	110,72	99,26





No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
7	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah	Indeks Trantibum	109,29	92,49
8	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	136,73	86,07
9	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	100	96,44

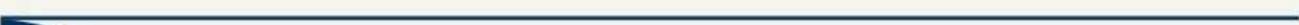


**215**

# BAB 4



**PENUTUP**





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 sudah baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis RPD yaitu sebesar 101,36%. Dari 11 (sebelas) IKU, sebanyak 4 (empat) IKU tercapai melebihi 100%. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen dan kolaborasi antar Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka dalam menjalankan tugasnya.

Ada pula 7 (tujuh) IKU yang belum tercapai maksimal sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang diantaranya (1) Persentase Penduduk Miskin, upaya yang dapat dilakukan yaitu memperbaiki tatakelola pengentasan kemiskinan dengan cara membuat data yang valid dan bisa dicek secara *real time* melalui aplikasi (melakukan kolaborasi dengan kader Posyandu, mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan memetakan Dimana saja wilayah yang merupakan kantong kemiskinan, meningkatkan pendapatan dengan memprioritaskan masyarakat miskin untuk memiliki pekerjaan serta mengurangi beban pengeluaran dengan memastikan jaminan sosial dan perlindungan sosial didapatkan oleh penduduk miskin dan hal yang tidak kalah penting adalah memastikan Garis Kemiskinan bisa turun. (2) Rata-rata Lama Sekolah, upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan mutu Pendidikan dengan cara meningkatkan akses Pendidikan, kompetensi guru dan campaign pentingnya sekolah (3) Prevalensi Stunting, upaya yang dapat dilakukan yaitu memperbaiki tata Kelola stunting dan meningkatkan intervensi spesifik dan intervensi sensitif (4) Angka Harapan Hidup, upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kualitas pelayan Kesehatan, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan mutu kualitas Standar Pelayanan (5) Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah, upaya yang





dapat dilakukan yaitu tertanya ruang dan jalan, meningkatkan kualitas perumahan dan Kawasan permukiman, meningkatkan ketersediaan air irigasi, dan meningkatkan ketertiban, keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi (6) Indeks kualitas lingkungan hidup, upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kualitas air, meningkatkan kualitas udara ambien, kualitas lahan (7) Nilai PDRB (ADHK), upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan perdagangan, meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, meningkatkan investasi, meningkatkan kemandirian desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Rata-rata efisiensi sumber daya keuangan pada Tahun 2024 yaitu sebesar 3,97% atau Rp. 131.611.808.492,00.

Pemerintah Kabupaten majalengka terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil dan berdampak bagi masyarakat.





**218**

# LAMPIRAN

**Perjanjian Kinerja**

**Cascading**

**Dokumentasi penyerahan  
LKIP kepada pimpinan**

**Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi  
pembahasan LKIP**

**Dokumentasi pemberian penghargaan  
bagi pegawai dengan kinerja terbaik**

**Prestasi Pemkab**

**Tindak Lanjut Rekomendasi LKIP 2023**

**SK Tim LKIP**





## BUPATI MAJALENGKA

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. DEDI SUPANDI**  
Jabatan : Pj. Bupati Majalengka

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Majalengka, September 2024  
Pj. BUPATI MAJALENGKA  
  
H. DEDI SUPANDI



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
KABUPATEN MAJALENGKA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	10,37
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (rata-rata lama sekolah)	7,61
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,35
		Prevalensi Stunting	17,36
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	65,18
5.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,08
6.	Meningkatnya produktivitas daerah	Nilai PDRB (ADHK)	27,58
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,10
7.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah	Indeks Tantribum	C
8.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
9.	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah Daerah	Tinggi

No.	Program	Jumlah Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,323,814,761,644.00	APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	837,528,494,542.00	APBD
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	117,185,733,908.00	APBD
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	68,872,920,690.00	APBD
5	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	349,949,600.00	APBD
6	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	10,271,218,200.00	APBD
7	Program Pemberdayaan Sosial	847,925,000.00	APBD
8	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	308,000,000.00	APBD
9	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	263,029,956.00	APBD
10	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	478,077,000.00	APBD
11	Program Pendaftaran Penduduk	47,420,000.00	APBD
12	Program Penataan Desa	3,610,000,000.00	APBD
13	Program Pengendalian Penduduk	731,800,000.00	APBD
14	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12,636,895,600.00	APBD
15	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	60,170,000.00	APBD
16	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0.00	APBD





17	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	738,199,800.00	APBD
18	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	112,000,000.00	APBD
19	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	109,999,000.00	APBD
20	Program Pengembangan Kebudayaan	112,000,000.00	APBD
21	Program Pembinaan Perpustakaan	152,467,000.00	APBD
22	Program Pengelolaan Arsip	233,726,200.00	APBD
23	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	637,870,000.00	APBD
24	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,631,962,600.00	APBD
25	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	365,000,000.00	APBD
26	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	17,976,328,000.00	APBD
27	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	27,569,612,400.00	APBD
28	Program Perencanaan Tenaga Kerja	79,618,000.00	APBD
29	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,867,539,500.00	APBD
30	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	487,809,242,564.00	APBD
31	Program Kepegawaian Daerah	4,668,381,800.00	APBD
32	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,428,167,500.00	APBD
33	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	464,094,900.00	APBD
34	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,545,509,800.00	APBD
35	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4,865,954,700.00	APBD
36	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,139,330,000.00	APBD
37	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,643,657,000.00	APBD
38	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15,499,477,000.00	APBD
39	Program Kawasan Permukiman	100,000,000.00	APBD
40	Program Penanggulangan Bencana	2,304,861,500.00	APBD
41	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	18,790,505,650.00	APBD
42	Program Perlindungan Perempuan	68,875,000.00	APBD
43	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	185,000,000.00	APBD
44	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	306,030,000.00	APBD
45	Program Pencatatan Sipil	62,175,000.00	APBD
46	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	2,983,573,315.00	APBD
47	Program Pembinaan Keluarga Berencana	9,365,705,500.00	APBD
48	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	938,915,000.00	APBD
49	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	0.00	APBD
50	Program Promosi Penanaman Modal	25,000,000.00	APBD
51	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14,308,984,900.00	APBD
52	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	78,600,000.00	APBD
53	Program Pemasaran Pariwisata	731,712,626.00	APBD
54	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12,482,892,000.00	APBD
55	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2,153,488,000.00	APBD





56	Program Perekonomian Dan Pembangunan	3,221,044,500.00	APBD
57	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,522,840,050.00	APBD
58	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,842,000,000.00	APBD
59	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	814,325,200.00	APBD
60	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5,679,736,899.00	APBD
61	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	36,182,798,000.00	APBD
62	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	503,631,000.00	APBD
63	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	0,00	APBD
64	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1,747,820,000.00	APBD
65	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	960,862,700.00	APBD
66	Program Rehabilitasi Sosial	1,282,228,200.00	APBD
67	Program Penempatan Tenaga Kerja	416,463,948.00	APBD
68	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	118,125,000.00	APBD
69	Program Penanganan Kerawanan Pangan	57,500,000.00	APBD
70	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1,011,837,438.00	APBD
71	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60,170,000.00	APBD
72	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4,667,476,400.00	APBD
73	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6,657,000,000.00	APBD
74	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	0.00	APBD
75	Program Pelayanan Penanaman Modal	527,555,990.00	APBD
76	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	650,000,000.00	APBD
77	Program Pembinaan Sejarah	15,000,000.00	APBD
78	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	247,192,330.00	APBD
79	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	31,850,000.00	APBD
80	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	406,149,800.00	APBD
81	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	291,820,000.00	APBD
82	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	164,364,000.00	APBD
83	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8,423,689,178.00	APBD
84	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10,271,218,200.00	APBD
85	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	169,000,000.00	APBD
86	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2,108,689,200.00	APBD





87	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3,413,324,000.00	APBD
88	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	674,727,900.00	APBD
89	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4,060,882,900.00	APBD
90	Program Hubungan Industrial	461,372,800.00	APBD
91	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1,632,602,086.00	APBD
92	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	0.00	APBD
93	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	17,700,000.00	APBD
94	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3,884,076,657.00	APBD
95	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	0.00	APBD
96	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	585,147,000.00	APBD
97	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	50,000,000.00	APBD
98	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	303,000,000.00	APBD
99	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	50,000,000.00	APBD
100	Program Pengembangan Ekspor	788,271,400.00	APBD
101	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2,038,876,400	APBD
102	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	118,775,000.00	APBD
103	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	400,000,000.00	APBD
104	Program Penanganan Bencana	1,112,364,000.00	APBD
105	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	99,150,000.00	APBD
106	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	52,500,000.00	APBD
107	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	286,208,600.00	APBD
108	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0.00	APBD
109	Program Pengelolaan Permuseuman	25,175,000.00	APBD
110	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	90,000,000.00	APBD
111	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	105,000,000.00	APBD
112	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41,000,000.00	APBD
113	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	319,850,000.00	APBD
114	Program Penyelenggaraan Jalan	110,080,538,707.00	APBD
115	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	130,267,000.00	APBD
116	Program Perlindungan Khusus Anak	92,055,000.00	APBD
117	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	57,500,000.00	APBD
118	Program Penyuluhan Pertanian	1,420,966,000.00	APBD
119	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	106,364,000.00	APBD





120	Program Penataan Bangunan Gedung	3,173,900,000.00	APBD
121	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	5,000,000.00	APBD
122	Program Pengembangan UMKM	571,222,800.00	APBD
123	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	0.00	APBD
124	Program Penyelenggaraan Jalan	110,080,538,707.00	APBD
125	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10,000,000.00	APBD
126	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	400,000,000.00	APBD
127	Program Pengelolaan Persampahan	7,028,893,000.00	APBD
128	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	70,700,000,000.00	APBD
		<b>3,311,599,699,477.00</b>	



Majalengka, September 2024

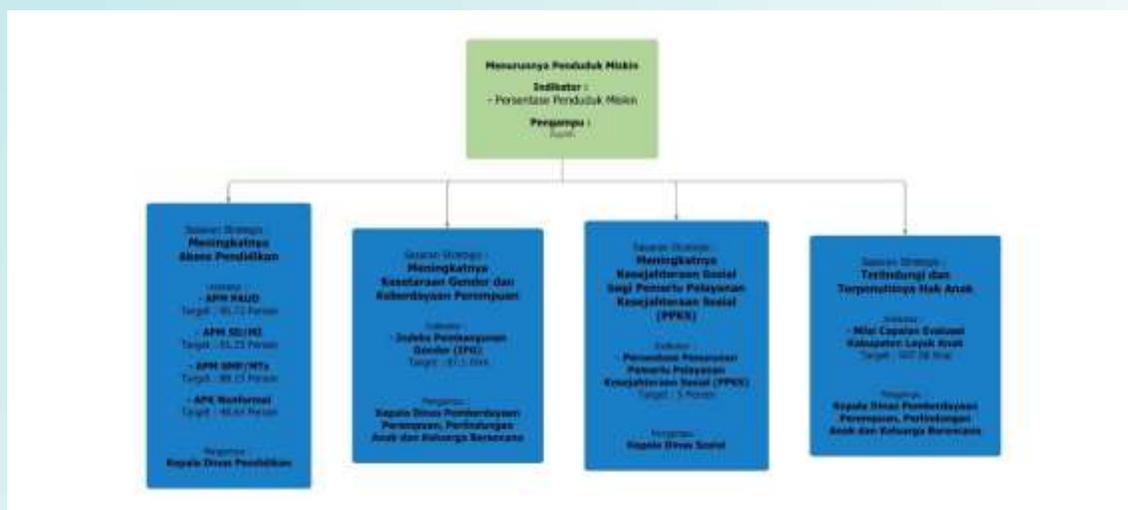
Pj. Bupati Majalengka,

*H. Dedi Supandi*  
H. DEDI SUPANDI

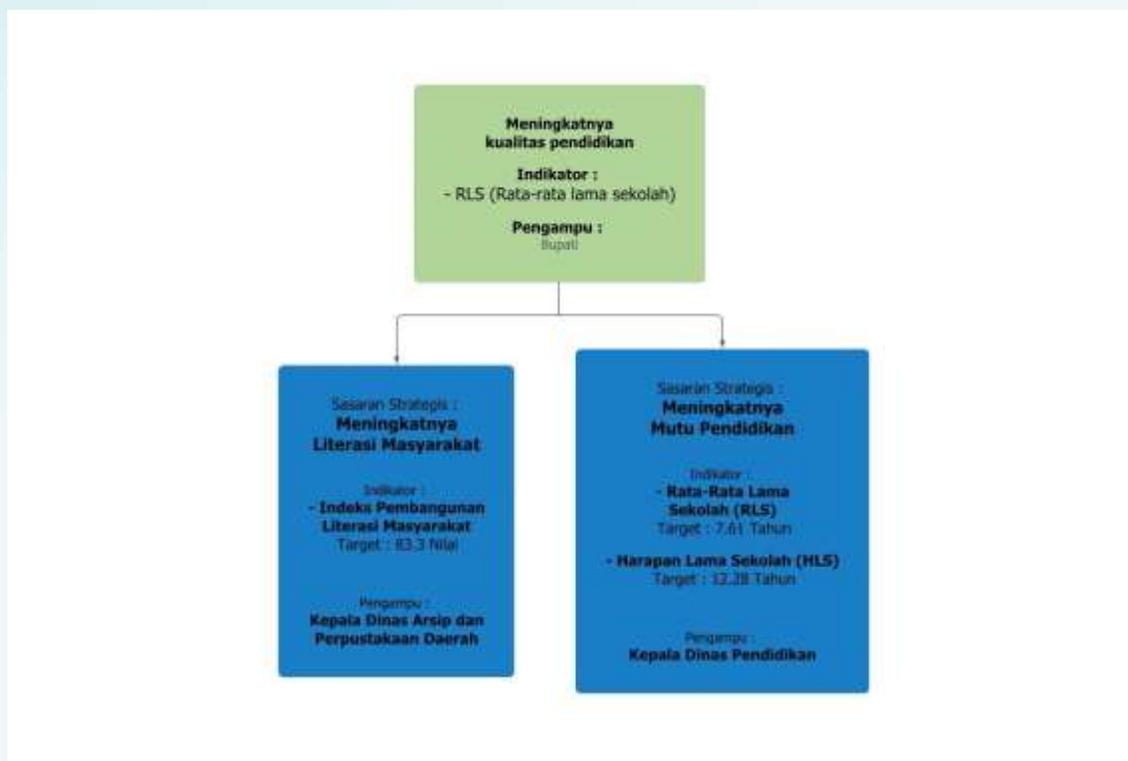


## CASCADING

### SASARAN 1

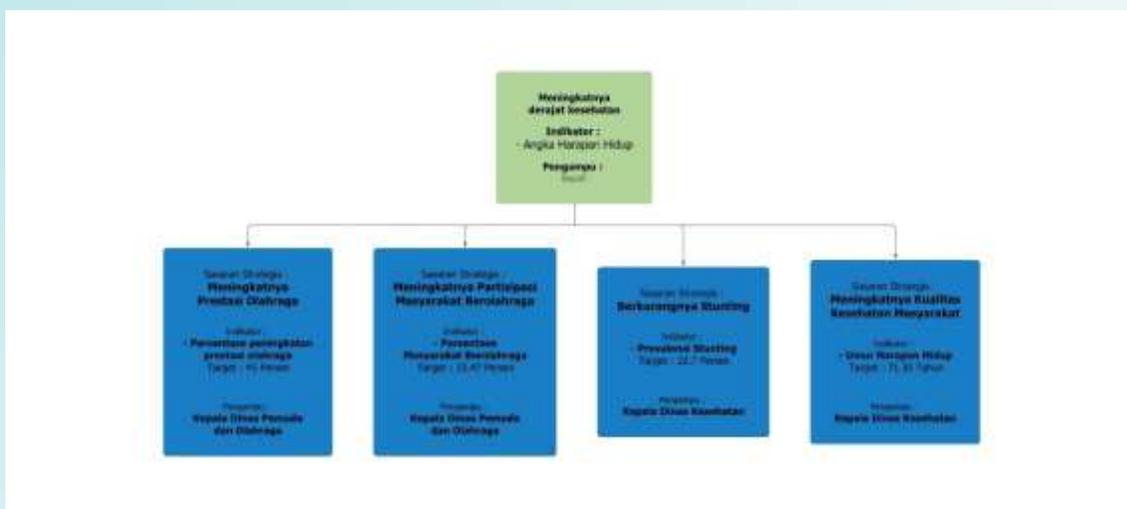


### SASARAN 2

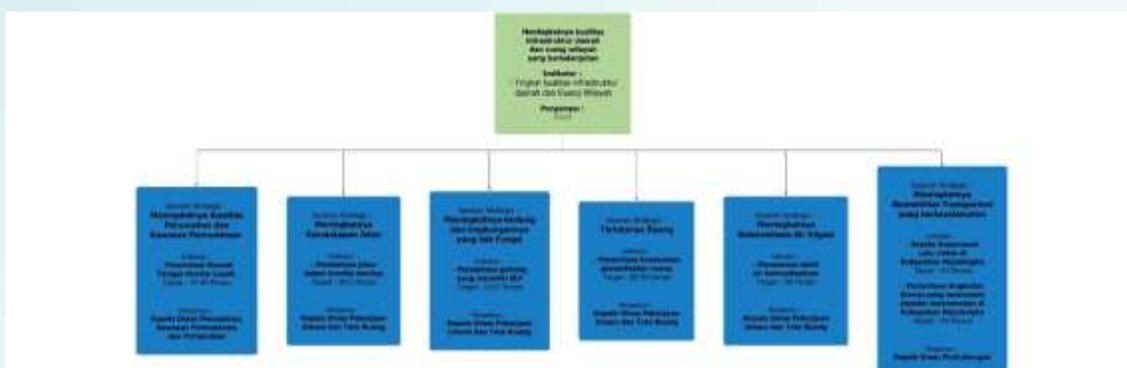




### SASARAN 3



### SASARAN 4



### SASARAN 5

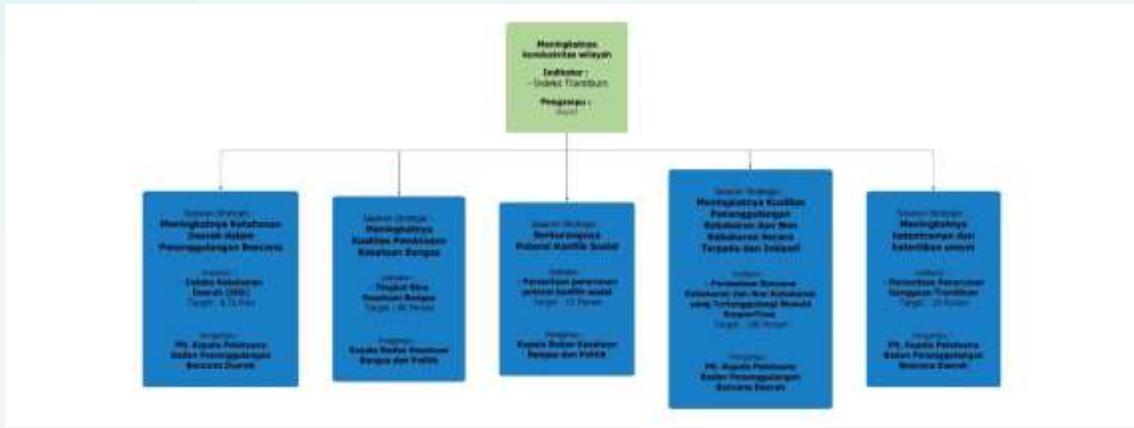




### SASARAN 6



### SASARAN 7



### SASARAN 8





## SASARAN 9





## LKIP MENJADI PERHATIAN UTAMA PIMPINAN





## LKIP MENJADI KEPEDULIAN SELURUH PEGAWAI

- Telah dipublikasikan melalui aplikasi absensi yang digunakan lebih dari 11.000 pegawai setiap absen masuk dan absen pulang



- Telah dipublikasikan di grup seluruh Kepala Perangkat Daerah





- LKIP telah dipublikasikan di aplikasi e-sakip





## LKIP MEMENGARUHI BUDAYA KERJA





## PRESTASI PEMKAB









## LKIP DIGUNAKAN DALAM PENYESUAIAN AKTIVITAS

### Rekomendasi LKIP 2023

Upaya yang harus dilakukan dimasa mendatang untuk memastikan seluruh Masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan yang layak adalah

- Membentuk Lembaga Pelatihan Kerja Digital atau bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja
- Memudahkan akses terhadap kredit/pembiayaan dengan bunga rendah
- Meningkatkan bantuan produksi sektor pertanian terutama pupuk murah dan tersedia
- Merevitalisasi Pasar

### Tindak Lanjut di Tahun 2024

#### Peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) Cakraningrat





## Rekomendasi LKIP 2023

**BerAKHLAK** **#bangga  
melayani  
bangsa**

a. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap jalan kabupaten yang kondisinya sudah baik dan sedang agar tetap dalam kondisi mantap, melanjutkan rekonstruksi, peningkatan, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi terhadap jalan kabupaten yang saat ini kondisinya rusak dan rusak berat.

b. Membuat layanan pengaduan jalan rusak baik itu di media sosial atau melalui *call center* guna memberikan tanggapan berupa aksi nyata perbaikan jalan berdasarkan aduan dari Masyarakat.

c. Memetakan wilayah angkutan umum secara online sehingga mudah di akses oleh seluruh Masyarakat (terkait rute dan moda transportasi yang tersedia)

d. Memperbanyak pembangunan TPS3R, pengadaan sarana persampahan, membuat desain pengangkutan sampah di perkotaan dan perdesaan serta menggagas pengelolaan sampah terpadu.

## Tindak Lanjut di Tahun 2024

URC Tambal Jalan telah menanganani 649 titik di 70 lokasi





## LKIP DIGUNAKAN DALAM PENYESUAIAN PERENCANAAN KINERJA TAHUN BERIKUTNYA

Rekomendasi LKIP 2024

Target akhir RPD di Tahun 2026 adalah 4,37 dengan capaian 108,98%, hal ini menunjukkan bahwa target akhir RPD telah tercapai sehingga perlu dilakukan perbaikan target di Tahun 2025 agar penetapan target lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024.



Gambar 3.2 TPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Sumber: BPS Majalengka

Adapun hasil perbandingan realisasi Tahun 2024 terhadap RPD telah mencapai 117,20%. Hal ini menandakan Indeks RB saat ini sudah melampaui sebesar 17,20% dari target akhir RPD. Atas hasil tersebut, target pada RPD harus disesuaikan dengan dasar Indeks RB saat ini.

Tindak Lanjut pada Dokumen Perencanaan Tahun 2025

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KABUPATEN MAJALENGKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	10,09
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (rata-rata lama sekolah)	7,71
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,65
		Prevalensi Stunting	21,1
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	67,28
5.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,26
6.	Meningkatnya produktivitas daerah	Nilai PDRB (ADHK)	29,31
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4
7.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah	Indeks Tantribum	A
8.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Indeks Reformasi Birokrasi	A
9.	Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	Kapasitas Keuangan Daerah	Tinggi



## LKIP DIGUNAKAN DALAM EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA





## SK TIM LKIP



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Achmad Yani No.1 Kecamatan Majalengka, Kabupaten  
Majalengka 45418  
Telepon (0233) 281002 – 281443 Fax. (0233) 281475  
Email : setda.majalengka@gmail.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 100.3.3.5/KEP. –ORGANISASI/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal

Pj. Sekretaris Daerah

Aeron Randi



- 3 -

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.5/KEP. –ORGANISASI/2025  
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN  
MAJALENGKA.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.  
b. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.  
c. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.  
d. Anggota : 1. Mila Melisa, S.H.,M.H., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
2. Afrizal Ashary Ghazwan, S.M., Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
3. Rizkie Tubagus Shakti, S.M., Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
4. Rima Rahmawati Putri, S.AP., Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
5. Dini Meilinda, S.E., Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
6. Budiyanto, S.E., Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

Pj. Sekretaris Daerah  
  
Aeron Randi



- 4 -

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.5/KEP. -ORGANISASI/2025  
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN  
MAJALENGKA.

TUGAS PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pengarah  
Memberikan Arahan Kebijakan dan Petunjuk Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- b. Ketua
  1. memimpin, mengoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Majalengka;
  2. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
  3. bertanggungjawab atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- c. Sekretaris
  1. menganalisis data capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  2. menyajikan hasil analisis data capaian kinerja Pemerintah Kabupaten; dan
  3. menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- d. Anggota
  1. menghimpun data hasil capaian kinerja;
  2. melakukan verifikasi terhadap hasil analisis dan capaian kinerja.
  3. mengevaluasi data hasil verifikasi dan validasi sebagai bahan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka; dan
  4. membantu penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pj. Sekretaris Daerah  
  
Aeron Randi